



PEMERINTAH
KABUPATEN
BADUNG

2021

LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020**





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP. (0361) 9009245,9009246, Fax : (0361) 9009245

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung untuk Tahun 2020 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Badung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas. Laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mangupura, 26 Maret 2021

Inspektur Kabupaten Badung,



Luh Suryaniti, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690323 198903 2 012

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,



Atas Asung Kerta Wara Nugraha dari Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Bupati wajib menyusun Laporan Kinerja (LKjIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahun keempat dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPJMD Semesta Berencana 2016-2021. Sesuai Visi RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 yaitu “**Memantapkan Arah Pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera**” akan diwujudkan dengan 13 tujuan yang terdiri dari 20 sasaran strategis dan diukur dengan 21 indikator kinerja utama (IKU). Laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten Badung tahun 2020 berisikan laporan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat serta kepada masyarakat sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus meningkatkan efektivitas program/kegiatan (*refocusing program*) dengan mengutamakan program prioritas sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021 untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui perubahan *mindset* dan penyelarasan program/kegiatan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *efektif, efisien, akuntabel* dan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Badung mulai dirasakan manfaatnya hal ini tampak dari perubahan *mindset* dan disiplin ASN sebagai tuntutan dari budaya kinerja yang lambat laun mulai tumbuh dan akan terus kami dorong serta *efisiensi*

anggaran sebagai akibat adanya penyesuaian program/kegiatan dengan sasaran RPJMD.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja khususnya kepada jajaran Kementerian PAN dan RB atas perhatian dan pembinaannya selama ini, untuk selanjutnya dengan komitmen dan kerja keras, kami bertekad untuk bisa lebih baik untuk mewujudkan implementasi akuntabilitas kinerja di Kabupaten Badung.

Sekian dan Terima kasih

Om Santih, Santih, Santih, Om

Mangupura, 5 Maret 2021

Bupati Badung,



NYOMAN GIRI PRASTA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Badung sangat berkomitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dari penerima amanah kepada pemberi amanah yang dibuat dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) menguraikan tentang hasil capaian serta faktor pendorong dan penghambat dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi dalam kurun waktu satu tahun yang tertuang dalam RPJMD.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 dengan visi **“Memantapkan Arah Pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”** terdiri dari 9 (sembilan) misi, 13 (tiga belas) Tujuan, 20 (dua puluh) sasaran strategis dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama (IKU).

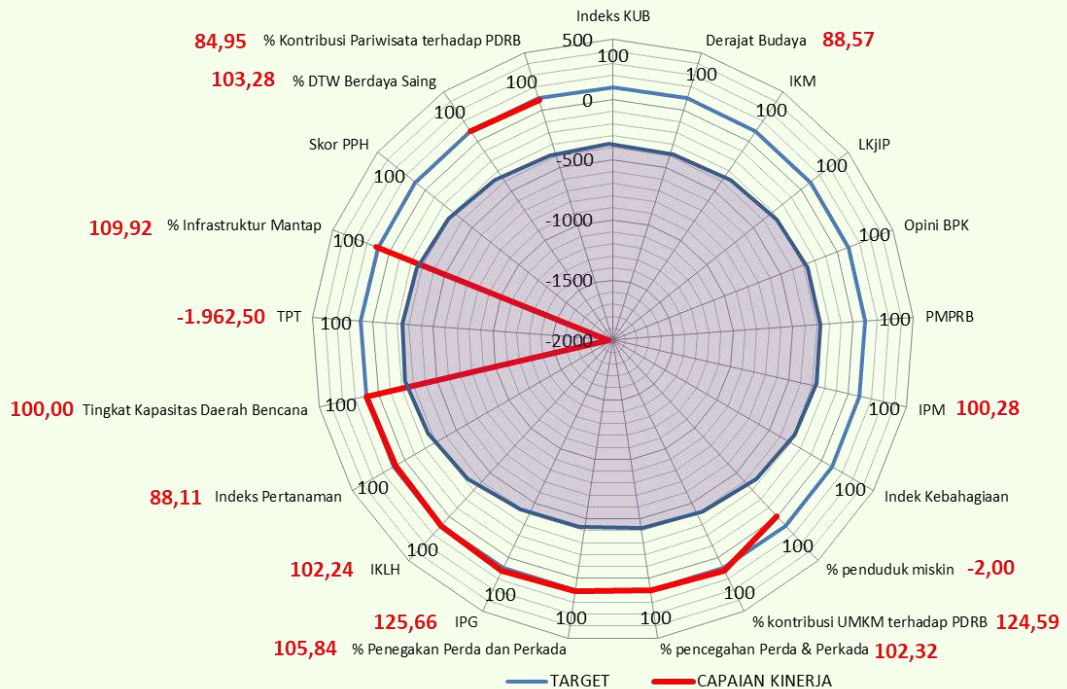
RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 13 tujuan, 20 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja utama (IKU). Untuk tahun 2020 (sampai Maret 2020) terdapat 7 (Tujuh) indikator kinerja utama (IKU) yang belum dapat dilaporkan hasil capaian kinerjanya terdiri dari:

- a. Indikator Kinerja Utama yang tidak dilaksanakan pengukuran melalui survey sebanyak 4 indikator, yaitu: **Indeks kerukunan umat beragama, Indeks kepuasan masyarakat, Indek Kebahagiaan, dan Skor Pola Pangan Harapan.**
- b. Indikator Kinerja Utama yang belum di *release*/terbit sebanyak 3 indikator, yaitu: **Opini BPK** dari BPK RI dan indikator **Katagori akuntabilitas Kinerja Kabupaten, Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)** dari Kementerian PAN-RB Republik Indonesia.

Capaian kinerja sasaran strategis RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung untuk tahun 2020 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja secara keseluruhan dari 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama (IKU) telah mencapai kinerja rata-rata sebesar -34,70% lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 104,38% dan capaian rata-rata tahun 2018 sebesar 101,94%.

Hasil pengukuran terhadap 21 indikator kinerja utama diperoleh hasil antara lain: melebihi target (>100%) sebanyak 8 indikator kinerja utama (38,10%), sesuai target (100%) sebanyak 1 indikator kinerja utama (4,76%) dan dibawah target (<100%) sebanyak 5 indikator kinerja utama (23,81%) dan tidak ada Hasil pengukuran/belum terbit sebanyak 7 indikator kinerja utama (33,33%)

Hasil pengukuran indikator kinerja utama (IKU) terhadap 14 indikator menunjukkan lebih dominan mencapai target yaitu sebanyak 9 indikator (64,30%) dan 5 indikator yang belum mencapai target (< 100%) sebesar 35,70%. Hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD semesta berencana 2016-2021 untuk tahun 2020 seperti berikut :



Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 1.356.993.556.381,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.223.623.428.734,- sehingga prosentase penyerapan sebesar 90,17%.

Rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator tiap sasaran strategis seperti berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	78,35	Tidak dilaksanakan survei	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2		3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	84	74,4	88,57
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3.	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	81	Tidak dilaksanakan survei	
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4.	Katagori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	78,40	Data belum diterbitkan	
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5.	Opini BPK	Nilai	WTP	Data belum diterbitkan	
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6.	Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	73,50 (BB)	Data belum diterbitkan	
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,37	81,6	100,28
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8.	Indek Kebahagiaan	Nilai	75,5	Tidak dilaksanakan survei	
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Persentase penduduk miskin	%	1,00-0,60%	2,02	-2,00
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10.	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,85	9,78	124,59
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11.	Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	%	90	92,09	102,32
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12.	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	90	95,26	105,84
13.	Meningkatnya pengarusutamaan gender	13.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	76	95,5	125,66

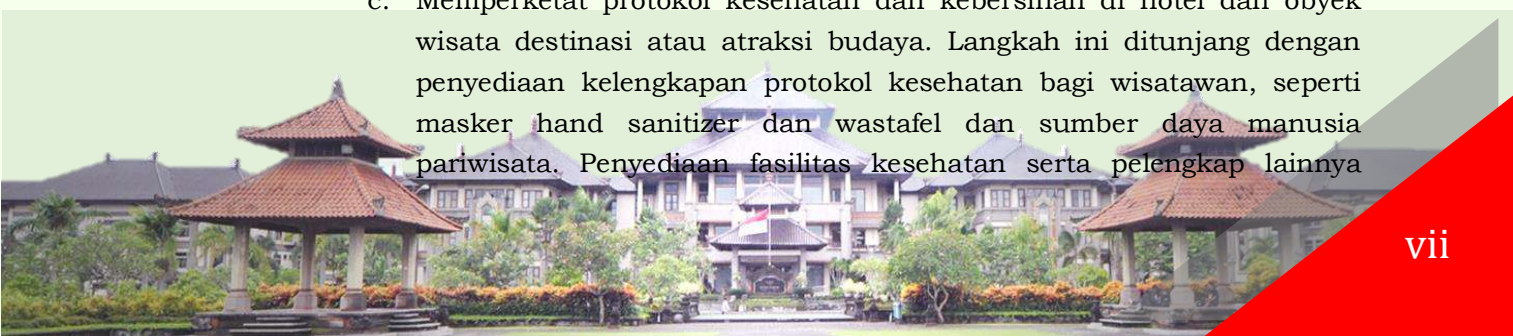


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2		3	4	5	6	7
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	69,3	70,85	102,24
		15.	Indeks Pertanian	Nilai	233	205,3	88,11
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16.	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4	Level 4	100,00
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17.	Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,32	6,92	- 1962,50
17.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	18.	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	89,38	98,25	109,92
18.	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	96,5	Tidak dilaksanakan survei	
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20.	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	72,00	74,36	103,28
20.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21.	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	28,97	24,61	84,95
Rata-rata Kinerja Kabupaten							-34,70

Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja yang < 100%, sehingga sesuai target RPJMD semesta berencana 2016-2021 antara lain :

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian adat dan budaya melalui :
 - a. Mengidentifikasi dan mendata secara akurat cagar budaya dan sekaa (kelompok) seni yang ada
 - b. Meningkatkan pembinaan serta perlindungan dari aspek legal dalam pengelolaan pelestarian budaya
 - c. Pemberian bantuan anggaran untuk pemeliharaan/perawatan warisan budaya.
2. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan melalui :
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan)

- b. Pemberdayaan ekonomi rumah tangga sasaran melalui pelatihan keterampilan, pemberian bantuan untuk kelompok usaha ekonomi produktif (UEP)
 - c. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
3. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indicator indeks pertanaman melalui :
 - a. Meningkatkan intensifikasi tanaman
 - b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna
 - c. Meningkatkan pendampingan Penyuluh untuk pemanfaatan pekarangan serta penambahan irigasi/pengairan (pembangunan sumber-sumber air).
4. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing tenaga kerja melalui :
 - a. Melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan Peraturan Perusahaan dan pengesahannya.
 - b. Melakukan pembinaan tentang norma-norma ketenagakerjaan secara berkesinambungan.
 - c. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan baik di dalam maupun di luar negeri.
 - d. Meningkatkan sosialisasi sistem informasi industri dan tenaga kerja (SIINAGA) yang berbasis teknologi berupa aplikasi yang dapat diunduh oleh pencari kerja untuk mencari lowongan pekerjaan dan bagi pengguna tenaga kerja (perusahaan)
 - e. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan 8 standar mutu LPK
 - f. Melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan ke lokasi LPKS (pemohon) yang didukung dengan anggaran
5. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pelestarian adat dan budaya melalui :
 - a. Informasi Kepariwisata Kabupaten Badung tentang Protokol Kesehatan CHSE (*Cleanliness, Hygiene, Safety, Environment*).
 - b. Pemulihan Kepariwisata Kabupaten Badung dengan mengutamakan Implementasi Protokol Kesehatan CHSE di Destinasi Wisata.
 - c. Memperketat protokol kesehatan dan kebersihan di hotel dan obyek wisata destinasi atau atraksi budaya. Langkah ini ditunjang dengan penyediaan kelengkapan protokol kesehatan bagi wisatawan, seperti masker hand sanitizer dan wastafel dan sumber daya manusia pariwisata. Penyediaan fasilitas kesehatan serta pelengkap lainnya



- seperti ruang karantina mandiri, termal detector, rapid test kit.
- d. Penyusunan rencana darurat dan penanganan sektor pariwisata yang menyangkut keamanan dan keselamatan wisatawan.
 - e. Penyusunan kebijakan transportasi kepariwisataan untuk kepastian perjalanan wisatawan.
 - f. Melakukan sinergisitas antar pemangku kepentingan pariwisata untuk mendukung Gerakan Era New Normal.
 - g. Melakukan koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi dengan pemerintah pusat tentang pemulihan kepariwisataan.



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	PENDAHULUAN 1
	1.1. Latar Belakang 1
	1.2. Gambaran Umum 3
	1.3. Gambaran Perekonomian 6
	1.4. Gambaran IPM 12
	1.5. Gambaran Pemerintahan 13
	1.6. Sumber Daya Manusia 17
	1.7. Sumber Daya Keuangan 19
	1.8. Isu Strategis 20
	1.9. Arah Kebijakan 22
	1.10. Ruang Lingkup 27
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 28
	2.1. RPJMD Semesta Berencana 2016 – 2021 28
	2.2. Perjanjian Kinerja 34
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 36
	3.1. Potret Pengukuran dan Capaian Kinerja tahun 2019 36
	3.2. Analisis Capaian Kinerja 39
	3.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan 134
	3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran 136
	3.5. Prestasi/Penghargaan 138
BAB IV	PENUTUP 140
	4.1. Kesimpulan 140
	4.2. Upaya Perbaikan Kinerja 142

LAMPIRAN :

Lampiran I	: Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020	144
Lampiran II	: Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020	145
Lampiran III	: Hasil Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020	147
Lampiran IV	: Hasil Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2020	149
Lampiran V	: Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintahkabupaten Badung Tahun 2016-2021	151



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung 4
Tabel 1.2	Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2018-2020 5
Tabel 1.3	Jumlah, Tipe dan Jumlah Jabatan Struktural Di Kabupaten Badung Tahun 2020 13
Tabel 1.4	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Badung Tahun 2020 17
Tabel 1.5	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepangkatan di Kabupaten Badung Tahun 2019-2020 18
Tabel 1.6	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2019-2020 18
Tabel 1.7	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut status jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2019-2020 19
Tabel 1.8	Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2020 20
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 30
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020 35
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020 37
Tabel 3.2	Kategori Desa Adat dan Cagar Budaya di Kabupaten Badung Tahun 2020 47
Tabel 3.3	Kategori Subak Lestari dan Sekaa yang Berkembang di Kabupaten Badung Tahun 2020 48
Tabel 3.4	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 49
Tabel 3.5	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020 68
Tabel 3.6	Indeks Pembangunan Manusia Negara-Negara ASEAN tahun 2020 70
Tabel 3.7	Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2020 79
Tabel 3.8	Distribusi PDRB Kabupeten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 82
Tabel 3.9	Jenis Potensi Pelanggaran yang dapat di Cegah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2020 84
Tabel 3.10	Jenis Pelanggaran yang Ditangani Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2020 87
Tabel 3.11	Jumlah Pelanggaran dan Pelanggaran yang Ditangani di Kabupaten Badung Tahun 2019-2020 87
Tabel 3.12	Tingkat Kapasitas Daerah dan Indeks Resiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 103

Tabel 3.13	Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020	104
Tabel 3.14	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2020	108
Tabel 3.15	Tingkat Pengangguran terbuka di Indonesia Tahun 2018-2020	109
Tabel 3.16	Distribusi Panjang Jalan dan Kondisi Jalan per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020	113
Tabel 3.17	Kondisi Saluran Irigasi di Kabupaten Badung Tahun 2020	114
Tabel 3.18	Jumlah Produksi Perikanan dan Kebutuhan Ikan di Kabupaten Badung Tahun 2015-2020	117
Tabel 3.19	Target dan capaian Produksi Perikanan di Kabupaten Badung Tahun 2020	118
Tabel 3.20	Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Badung Tahun 2020	120
Tabel 3.21	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Badung Tahun 2020	121
Tabel 3.22	Distribusi PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	124
Tabel 3.23	Anggaran Hibah Pariwisata untuk Kabupaten Badung Tahun 2020	127
Tabel 3.24	Sasaran Strategis, Jumlah Program/Kegiatan, Pagu dan Realisasi Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2020	135
Tabel 3.25	Hasil analisis Efektivitas dan Efisiensi Program/Kegiatan di Kabupaten Badung Tahun 2020	137
Tabel 3.21	Penghargaan/Prestasi Kabupaten Badung Tahun 2020	138



DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>	
Grafik 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung tahun 2020	5
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2015-2020	6
Grafik 1.3	Garis Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2015-2020	7
Grafik 1.4	Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2015-2020	8
Grafik 1.5	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2015-2020	9
Grafik 1.6	PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan Kabupaten Badung tahun 2015-2020	10
Grafik 1.7	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Badung tahun 2015-2020	11
Grafik 1.8	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Badung Tahun 2015-2020	12
Grafik 1.9	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung Tahun 2010-2020	13
Grafik 1.10	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung	14
Grafik 1.11	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019-2020	19
Grafik 2.1	Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021	32
Grafik 2.2	Cross Cutting Program Terhadap Sasaran RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021	33
Grafik 3.1	Target dan Capaian Indiator Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	40
Grafik 3.2	Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2017-2019	41
Grafik 3.3	Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung dan Indonesia Tahun 2015-2019	42
Grafik 3.4	Perbandingan Komponen Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2018-2019	43
Grafik 3.5	Perbandingan target dan Realisasi Indikator Derajat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya Tahun 2017-2021	46
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	50
Grafik 3.7	Kategori Perangkat Daerah Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2015-2019	51

Grafik 3.8	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2019	52
Grafik 3.9	Hasil Kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2019	53
Grafik 3.10	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	56
Grafik 3.11	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2019	56
Grafik 3.12	Perbandingan Hasil Penilaian Komponen AKIP Kabupaten BADung Tahun 2018-2019	57
Grafik 3.13	Perbandingan efisiensi Anggaran dan Program/Kegiatan dengan Penerapan SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2017-2020	58
Grafik 3.14	Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	61
Grafik 3.15	Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Indeks PMPRB) Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	63
Grafik 3.16	Perbandingan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2016-2019	64
Grafik 3.17	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit dan Hasil Kabupaten Badung Tahun 2016-2019	64
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	67
Grafik 3.19	Capaian Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2018-2020	67
Grafik 3.20	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020	69
Grafik 3.21	Target dan Capaian Indikator Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	72
Grafik 3.22	Perbandingan Hasil penilaian Indikator Indeks Kebahagiaan menurut komponen Di Kabupaten Badung Tahun 2018-2019	73
Grafik 3.23	Target dan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	77
Grafik 3.24	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2015-2020	77
Grafik 3.25	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2017-2019	78
Grafik 3.26	Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupeten Badung Tahun 2017-2021	81
Grafik 3.27	Target dan Capaian Indikator Persentase Pencegahan Perda dan Perkda di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	84
Grafik 3.28	Target dan Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkda di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	86
Grafik 3.29	Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	89



Grafik 3.30	Perbandingan indeks pembangunan gender di Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020	90
Grafik 3.31	Target dan Capaian Indikator IKLH Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	92
Grafik 3.32	Capaian Komponen IKLH Kabupaten Badung Tahun 2016-2020	93
Grafik 3.33	Perbandingan Hasil IKLH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2020	93
Grafik 3.34	Target dan Capaian Indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	96
Grafik 3.35	Target dan Capaian Kriteria Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung tahun 2017-2021	98
Grafik 3.36	Capaian Kriteria Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung tahun 2020	98
Grafik 3.37	Desa Tangguh Bencana Kabupaten Badung Tahun 2014-2020	104
Grafik 3.38	Sekolah Aman Bencana Kabupaten Badung Tahun 2014-2020	105
Grafik 3.39	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupeten Badung Tahun 2017-2021	107
Grafik 3.40	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupeten Badung Tahun 2019-2020	109
Grafik 3.41	Target dan Capaian Indikator Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	113
Grafik 3.42	Target dan Capaian Indikator Skor Pola Panga Harapan (PPH) di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	116
Grafik 3.43	Perbandingan Skor PPH Kabupaten Badung dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2019	117
Grafik 3.44	Target dan Capaian Indiaktor Persentase Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing di Kabupeten Badung Tahun 2017-2020	120
Grafik 3.45	Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupeten Badung Tahun 2017-2021	123
Grafik 3.46	Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Badung Tahun 2015-2020	125
Grafik 3.47	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Badung Tahun 2020	125
Grafik 3.48	Perkembangan usaha sarana pariwisata di Kabupaten Badung tahun 2016-2020	126



DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
Gambar 3.1	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Badung Tahun 2019	99
Gambar 3.2	Indeks Resiko Bencana di Indonesia Tahun 2019	103





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kinerja dapat disusun berdasarkan penerapan manajemen kinerja dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pencapaian kinerja disajikan dengan informasi ketercapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan



demikian, Laporan Kinerja ini menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung sesuai RPJMD Tahun 2016-2021 kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang terbaru.

Penyusunan LKjIP Tahun 2020 ini memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu :

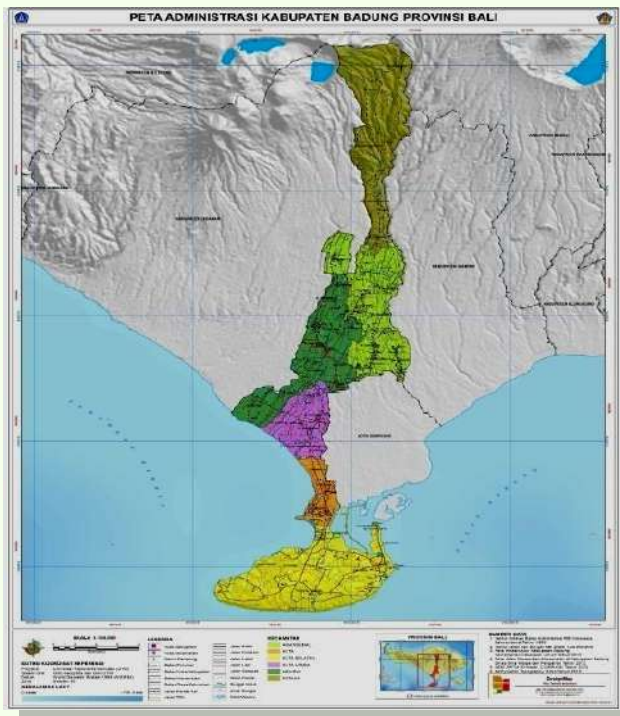
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;



1.1. Gambaran Umum

1.2.1 Gambaran Geografis

Badung merupakan salah satu dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali yang terletak dibagian paling selatan dari pulau Bali. Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara $8^{\circ}14'20''$ - $8^{\circ}50'52''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}05'03''$ dan $115^{\circ}26'51''$ Bujur Timur. Batas wilayah



Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Gianyar, Bangli dan Kota Denpasar di sebelah Timur, Kabupaten Tabanan disebelah barat serta Samudera Indonesia di sebelah Selatan.

Secara administratif, terbagi atas 6 wilayah kecamatan terdiri dari 46 desa dan 16 kelurahan. Dari seluruh kecamatan yang ada, kecamatan Petang merupakan kecamatan terluas dengan luas 115 Km² sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 17,52 km².

Disamping memiliki desa/kelurahan yang sering disebut desa dinas, terdapat 122 desa adat, 531 Banjar adat dan Sekaa Teruna

yaitu kelompok pemuda/pemudi (sekaa) yang bernaung dibawah desa adat sebagai bentuk kearifan lokal. Keberadaan desa dinas dan desa adat selama ini berjalan harmonis karena memiliki fungsi yang berbeda dimana desa dinas melayani administrasi pemerintahan sedangkan desa adat khusus melaksanakan fungsi pelestarian adat, agama dan budaya.

Secara geografis Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 km² atau sekitar 7,43 persen luas wilayah Provinsi Bali, dengan wilayah terluas Kecamatan Petang sebesar 115 km² atau 27,48% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan kecamatan Kuta dengan wilayah terkecil, yaitu seluas 17,52 km² atau 4,19 % dari



total luas wilayah Kabupaten Badung. Secara rinci luas wilayah Kabupaten Badung menurut kecamatan seperti pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kuta Selatan	101.13	24.16
2.	Kuta	17.52	4.19
3.	Kuta Utara	33.86	8.09
4.	Mengwi	82	19.59
5.	Abiansemal	69.01	16.49
6.	Petang	115	27.48
TOTAL		418.52	100

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2020

Kabupaten Badung mengalami 2 musim yaitu ; musim kemarau dan musim penghujan. Hal ini dipengaruhi oleh arus angin yang melintasi daratan serta banyaknya uap air yang dikandungnya.

Curah Hujan dengan kondisi normal sampai cukup tinggi. Curah hujan yang paling tinggi pada bulan Desember sebesar 337,10 mm dan Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 0,30 mm. Sedangkan untuk hari hujan paling tinggi pada bulan Desember sebanyak 26 hari dan terendah bulan Agustus sebanyak 4 hari.

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Rata-rata Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/January	153,00	20	100,00
Februari/February	213,80	21	97,28
Maret/March	283,60	18	92,06
April/April	68,20	8	100,00
Mei/May	121,90	17	98,75
Juni/June	49,20	15	100,00
Juli/July	6,30	7	100,00
Agustus/August	0,30	4	100,00
September/September	58,80	8	100,00
Oktober/October	60,50	15	100,00
November/November	85,00	15	100,00
Desember/December	337,10	26	63,95

Sumber : BPS Kabupaten Badung, 2021

1.2.2 Gambaran Demografi

Penduduk Kabupaten Badung sampai dengan data semester II tahun 2020 sebanyak 492.826 jiwa, yang terdiri dari 245.697 jiwa penduduk laki-laki (49,85%) dan 247.129 jiwa penduduk perempuan (50,15%). Distribusi Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Mengwi yaitu sebanyak 124.752 jiwa atau 25,31% dari total penduduk Kabupaten Badung, sementara kecamatan Petang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 31.225 jiwa (6,34%). Jumlah penduduk menurut Kecamatan seperti tabel 1.2 berikut :



Tabel 1.2
Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin
di Kabupaten Badung Tahun 2018-2020

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI	WANITA	2020	%	2019	2018
1	Kuta	27.168	26.758	53.926	10,94	53.626	52.352
2	Mengwi	62.136	62.616	124.752	25,31	124.365	121.651
3	Abiansemal	46.726	47.563	94.289	19,13	94.200	92.391
4	Petang	15.740	15.485	31.225	6,34	31.196	30.812
5	Kuta Selatan	53.386	53.697	107.083	21,73	105.927	100.725
6	Kuta Utara	40.541	41.010	81.551	16,55	81.250	78.744
	Kabupaten	245.697	247.129	492.826	100,00	490.564	476.675

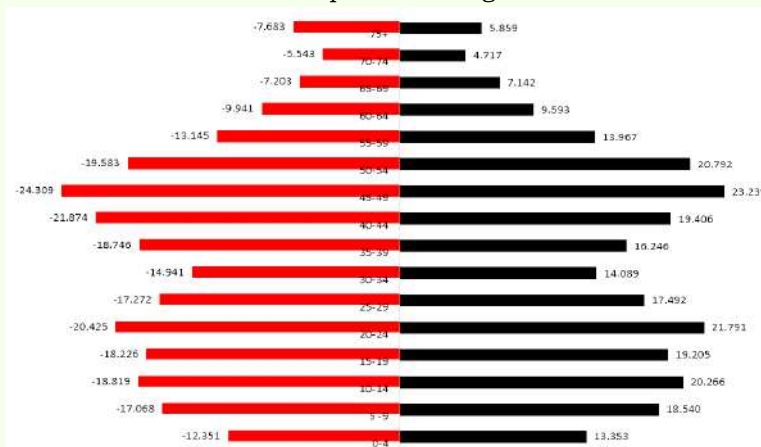
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung 2020

Pertambahan penduduk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 2.262 orang. Distribusi pertumbuhan jumlah penduduk menurut kecamatan menunjukkan pertumbuhan penduduk terbanyak di wilayah Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 1.156 jiwa atau sebesar 51,11%, hal ini disebabkan oleh migrasi penduduk pendatang akibat dari pertumbuhan obyek wisata.

Distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok umur 45 – 49 tahun yang paling banyak jumlahnya sebanyak 47.548 jiwa. Dari gambaran distribusi penduduk dapat dijelaskan bahwa kelompok umur produktif (35 -54 tahun) yang paling banyak atau disebut bonus demografi. Adapun distribusi penduduk menurut kelompok umur secara lengkap seperti grafik berikut :

Grafik 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Badung tahun 2020



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, 2020



1.3. Gambaran Perekonomian

1.3.1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung tahun 2015 – 2018 rata-rata diatas 6% dan melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan Nasional, sedangkan untuk tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di provinsi bali dan tingkat nasional cenderung menurun dan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Nasional turun secara signifikan mencapai 2,19. Untuk Provinsi Bali mengalami penurunan yang drastis diatas angka Nasional mencapai minus 12,21%, hal ini disebabkan karena perekonomian lebih dominan ditopang sektor pariwisata, sehingga dengan adanya pandemi COVID 19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional secara lengkap seperti grafik berikut :

Grafik 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2015-2020



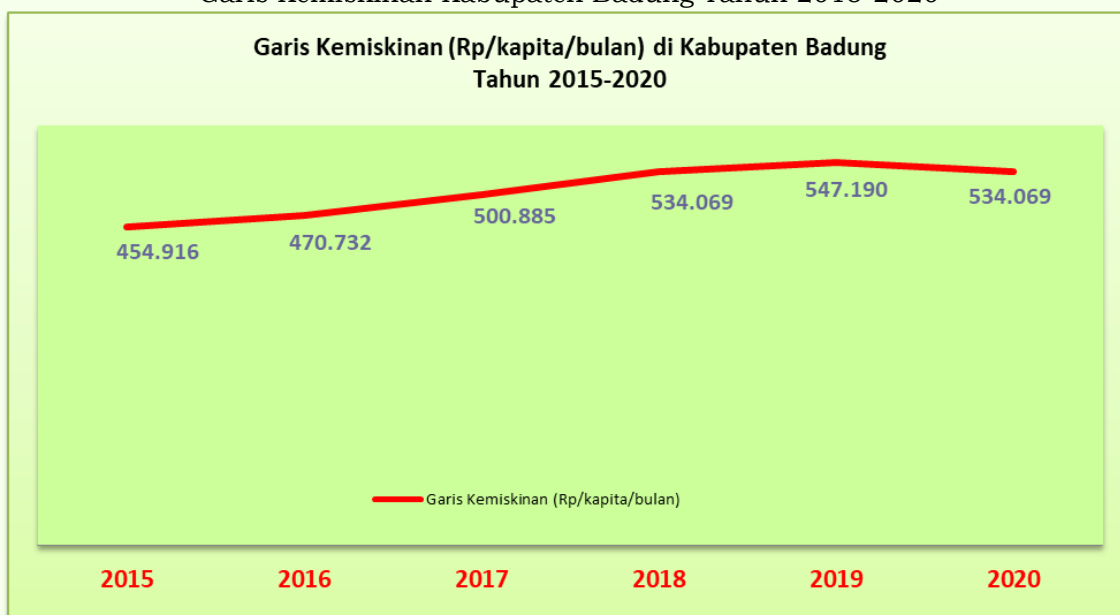
Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020



1.3.2. Kemiskinan

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah atau lebih rendah dari besaran yang disebut sebagai Garis Kemiskinan. Batas pengelompokan garis kemiskinan Kabupaten Badung cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 454,916/kapita/bulan menjadi sebesar 534.069/kapita/bulan pada tahun 2020. Secara lengkap garis kemiskinan di Kabupaten Badung seperti grafik berikut:

Grafik 1.3
Garis Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2015-2020



Sumber Data : Hasil Pengolahan Data BPS Kabupaten Badung Tahun 2020

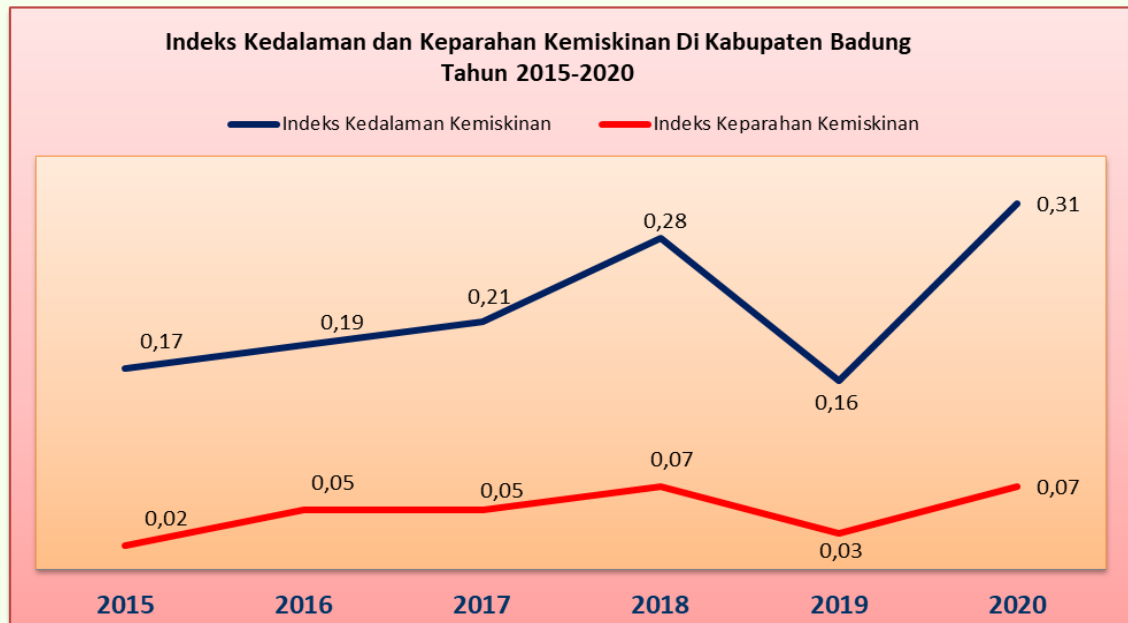
Indikator lain yang bisa disampaikan mendampingi indikator tingkat kemiskinan wilayah, di antaranya adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)/*poverty gaps index* dimaksudkan untuk menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan atau jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Untuk mengetahui masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin digunakan ukuran *poverty severity index*. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dimaksudkan untuk menunjukkan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Badung periode tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa indeks kemiskinan mengalami peningkatan linier dengan indeks kedalaman kemiskinan, namun tahun 2019 mengalami penurunan dengan



indeks kedalaman kemiskinan 0,16 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,03. Secara rinci Perkembangan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan seperti pada grafik berikut :

Grafik 1.4
Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahannya
di Kabupaten Badung Tahun 2015-2020



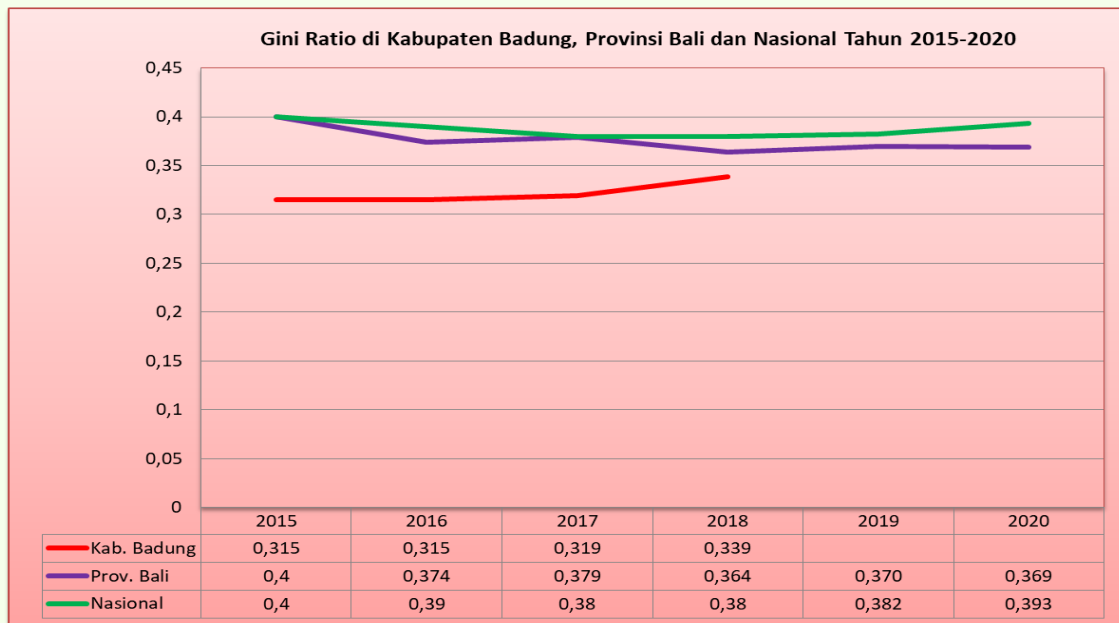
Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020

Indikator lain yang biasa juga disertakan mendampingi indikator kemiskinan di antaranya adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk. Salah satu ukuran ketimpangan yang biasa digunakan adalah Gini Ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) menjadi alat dalam mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adapun kategori nilai indeks gini rasio yaitu: $0 < 0,35$ menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, kisaran $0,35 - 0,5$ menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan kisaran nilai indeks gini rasio $> 0,5$ menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada Tahun 2015 hingga Tahun 2018 menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Badung masih dalam tingkat ketimpangan rendah, namun trennya menunjukkan adanya kecenderungan meningkat. Kondisi ini perlu diantisipasi melalui berbagai program pembangunan agar tidak bergerak naik menjadi ketimpangan sedang atau bahkan tinggi.



Gini ratio Kabupaten Badung tersedia data sampai tahun 2018 sebesar 0,339, termasuk kategori tingkat ketimpangan yang rendah, sedangkan untuk tahun 2019-2020 tidak tersedia data. Perkembangan gini ratio Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2015 - 2020 dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 1.5
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2015-2020



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Badung sangat serius untuk mengendalikan kemiskinan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung yang pro rakyat seperti:

1. Program kesehatan yang menanggung semua masyarakat (*Universal Health Coverage*) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) serta Program Krama Badung Sehat yaitu program yang melengkapi pelayanan kesehatan yang menanggung pelayanan kesehatan diluar tanggungan JKN KIS.
2. Program Bedah rumah dan rehab rumah bagi masyarakat miskin
3. Program pemberian santunan lansia bagi masyarakat berumur diatas 72 tahun.
4. Program Santunan Kematian yaitu setiap masyarakat yang meninggal diberikan santunan kematian sekaligus akte kematian.
5. Program santunan penunggu pasien untuk masyarakat Badung yang anggota keluarganya mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit.
6. Program lainnya yang bersifat meringankan beban masyarakat untuk kegiatan sosial, budaya dan keagamaan.



1.3.3 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDRB Badung atas dasar harga berlaku pada tahun 2015-2020 menunjukkan peningkatan secara linier dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami nilai penurunan. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB tahun 2015-2019 juga mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan selama tahun 2015-2019 Kabupaten Badung mengalami pertumbuhan ekonomi diatas 6 (enam) persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh kategori, tidak dipengaruhi inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Badung tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan adanya pandemi COVID-19 sehingga berdampak pada menurunnya produksi serta pertumbuhan ekonomi. Gambaran PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada tahun 2015-2020 seperti grafik berikut :

Grafik 1.6
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Badung tahun 2015-2020



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020



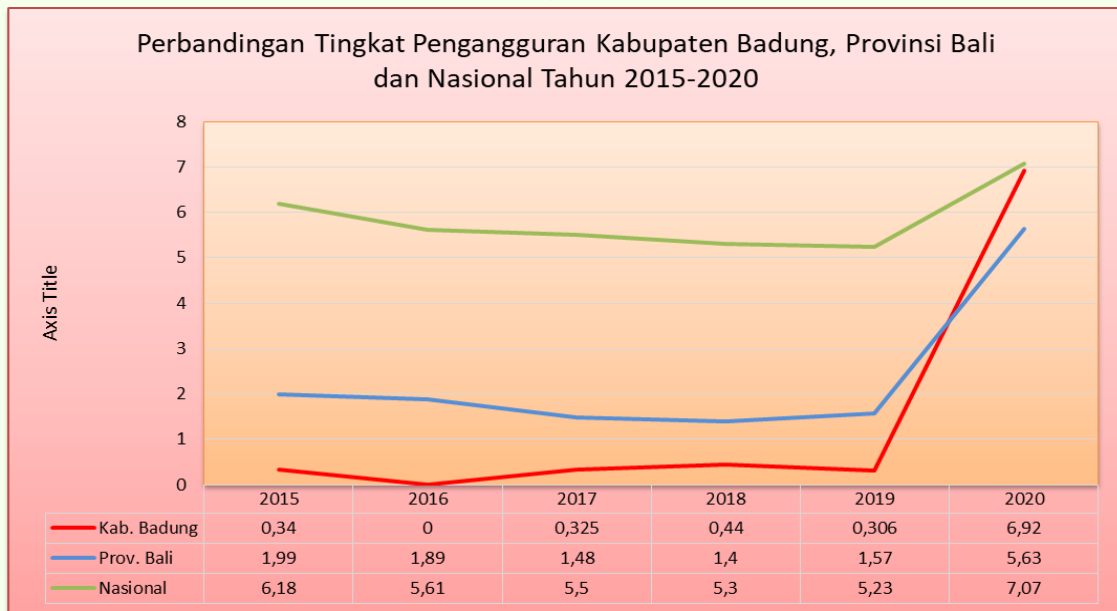
1.3.4. Gambaran Tenaga Kerja

Tenaga kerja dapat diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain atau masyarakat.

Ukuran untuk menilai keberhasilan dalam ketenagakerjaan, salah satunya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Angka pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2015-2020 berfluktuatif, namun di tahun 2020 sebesar 6,92% artinya mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya. Gambaran tingkat pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2015-2020 seperti tabel berikut:

Grafik 1.7

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Badung tahun 2015-2020



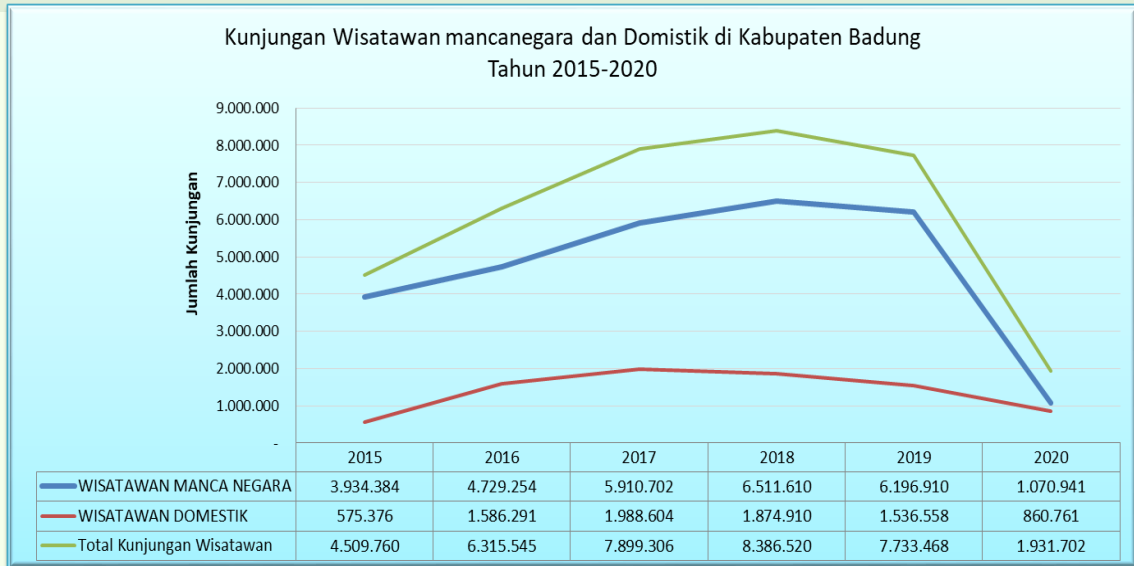
Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020

1.3.5. Gambaran Kepariwisata

Kabupaten Badung merupakan pusat pengembangan dan tujuan wisata di Bali dan Nasional, karena memiliki banyak kawasan destinasi wisata yang sudah terkenal di mancanegara. Perkembangan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara mengalami perkembangan yang meningkat sejak tahun 2015-2020 dan mencapai puncak pada tahun 2018 dengan kunjungan wisatawan sebanyak 8.386.520 orang dan tahun berikutnya mengalami penurunan. Perkembangan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung dari tahun 2015-2020 seperti grafik berikut :



Grafik 1.8
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Badung Tahun 2015-2020



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2020

Kunjungan wisatawan ke Badung didominasi wisatawan manca Negara. Wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung berasal dari Negara Australia sebanyak 226.106 orang.

1.4. Gambaran IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Badung tahun 2010-2020 menunjukkan kualitas pembangunan manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan di tahun 2020 sebesar 81,60 termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Perkembangan secara lengkap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung dari tahun 2010-2020 seperti grafik berikut :



Grafik 1.9
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung Tahun 2010-2020



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung, 2020

1.5. Gambaran Pemerintahan

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan kabupaten, serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut maka susunan perangkat daerah telah mencerminkan kapasitas daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai potensi daerah. Adapun bagan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Badung seperti gambar berikut :



Grafik 1.10

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung



Berdasarkan peraturan daerah ini dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan mengacu prinsip efektivitas dan efisiensi serta Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dibandingkan tahun 2016, jumlah Perangkat Daerah mengalami pengurangan dari 53 menjadi 38 Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sekretariat, 1 Inspektorat, 7 badan, 21 Dinas, 6 kecamatan dan 1 (satu) RSUD.

Berdasarkan Perangkat Daerah dan UPT yang dibentuk terdapat satuan organisasi atau jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020 sebanyak 877 jabatan struktural. Secara lengkap jumlah, tipe dan jumlah jabatan struktural/eselon seperti tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah, Tipe dan Jumlah Jabatan Struktural
Di Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
1	Sekretariat Daerah;	A	1	6	12		36		55
2	Sekretariat DPRD;	B		1	3		9		13
3	Inspektorat;	A		1	5		3		9
4	Dinas Pariwisata;	A		1	1	4	15		21
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;	A		1	1	4	15		21



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
6	Dinas Kebudayaan;	A		1	1	4	15		21
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	A		1	1	8	27		37
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	A		1	1	5	18		25
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;	A		1	1	4	15		21
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;	A		1	1	4	15		21
11	Dinas Pertanian dan Pangan;	A		1	1	6	21		29
12	Dinas Komunikasi dan Informatika;	A		1	1	5	18		25
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	A		1	1	4	15		21
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;	A		1	1	4	15		21
15	Satuan Polisi Pamong Praja;	A		1	1	4	15		21
16	Dinas Kesehatan;	A		1	1	4	15		21
17	Dinas Sosial;	B		1	1	3	11		16
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	B		1	1	5	17		24
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	B		1	1	3	11		16
20	Dinas Perikanan;	B		1	1	3	11		16
21	Dinas Perhubungan;	B		1	1	3	11		16
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	B		1	1	3	11		16
23	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan; dan	B		1	1	3	11		16
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	B		1	1	3	11		16
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	A		1	1	4	15		21
26	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung;	B		1	1	3	8		13
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	B		1	1	3	11		16



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan	C		1	1	2	6		10
29	Badan Penelitian dan Pengembangan;	C		1	1	2	8		12
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;			1		4	11		16
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;			1	1	3	9		14
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada	C			1	4		8	13
33	Kecamatan Petang;	A			1	1	5	2	9
34	Kecamatan Abiansemal;	A			1	1	5	2	9
35	Kecamatan Mengwi;	A			1	1	5	2	9
36	Kecamatan Kuta Utara;	A			1	1	5	2	9
37	Kecamatan Kuta; dan	A			1	1	5	2	9
38	Kecamatan Kuta Selatan.	A			1	1	5	2	9
39	Kel. Kapal						1	4	5
40	Kel. Abianbase						1	4	5
41	Kel. Lukluk						1	4	5
42	Kel. Sading						1	4	5
43	Kel. Sempidi						1	4	5
44	Kel. Kerobokan Kaja						1	4	5
45	Kel. Kerobokan						1	4	5
46	Kel. Kerobokan Kelod						1	4	5
47	Kel. Seminyak						1	4	5
48	Kel. Legian						1	4	5
49	Kel. Kuta						1	4	5
50	Kel. Tuban						1	4	5
51	Kel. Kedonganan						1	4	5
52	Kel. Benoa						1	4	5
53	Kel. Tanjung Benoa						1	4	5
54	Kel. Jimbaran						1	4	5
55	UPTD						55	55	110
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
	TOTAL JUMLAH		1	36	54	117	530	139	877

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020



1.6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Badung menurut perangkat daerah sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 7.628 orang. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara lengkap seperti berikut:

1.6.1. Distribusi Menurut Pendidikan

Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut tingkat pendidikan tercatat, tingkat pendidikan yang paling banyak sarjana strata 1 sebanyak 4.162 orang (54,56%) sedangkan yang paling kecil dengan tingkat pendidikan strata 3 (Doktor) sebanyak 4 orang (0,05%).

Tabel 1.4
Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut tingkat pendidikan
di Kabupaten Badung Tahun 2019-2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2020				2019
		LAKI	WANITA	JUMLAH	%	
1.	SD	46	14	60	0,79	74
2.	SLTP	115	32	147	1,93	175
3.	SLTA	1059	493	1552	20,35	1761
4.	DIPLOMA I/II	64	70	134	1,76	187
5.	DIPLOMA III/IV	138	584	722	9,47	663
6.	S1	1844	2318	4162	54,56	4494
7.	S2	445	402	847	11,10	856
8.	S3	4	0	4	0,05	2
	Jumlah	3715	3913	7628	100	8212

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kab. Badung Tahun 2019-2020

1.6.2. Distribusi Menurut Kepangkatan

Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan tercatat, kepangkatan pegawai yang paling banyak golongan III/a sebanyak 1.247 orang (16,35%) sedangkan pegawai dengan kepangkatan I/a tidak ada. Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan seperti table 1.5 berikut :



Tabel 1.5

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepangkatan di Kabupaten Badung Tahun 2019-2020

NO	GOLONGAN	2020				2019
		LAKI	WANITA	JUMLAH	%	
1	I/a	0	0	0	0,00	2
2	I/b	4	6	10	0,13	10
3	I/c	16	3	19	0,25	31
4	I/d	35	4	39	0,51	52
5	II/a	130	50	180	2,36	209
6	II/b	135	36	171	2,24	264
7	II/c	385	200	585	7,67	752
8	II/d	395	197	592	7,76	444
9	III/a	544	703	1247	16,35	1250
10	III/b	395	501	896	11,75	1179
11	III/c	361	586	947	12,41	855
12	III/d	433	640	1073	14,07	1019
13	IV/a	453	428	881	11,55	1242
14	IV/b	396	540	936	12,27	863
15	IV/c	32	15	47	0,62	38
16	IV/d	5	0	5	0,07	2
		3.719	3.909	7.628	100,00	8.212

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kab. Badung Tahun 2019-2020

1.6.3. Distribusi Menurut Eselon

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut eselon tahun 2020, tercatat pegawai dengan jabatan eselon yang paling banyak eselon IV sebanyak 589 orang (74,14%) sedangkan yang paling kecil dengan eselon V sebanyak 12 orang (2,07%). Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jabatan eselon seperti tabel berikut:

Tabel 1.6

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2019-2020

NO	ESELON	2020				2019
		LAKI	WANITA	JUMLAH	%	
1.	Eselon II	29	3	32	3,10	27
2.	Eselon III	119	43	162	20,69	180
3.	Eselon IV	345	244	589	74,14	645
4.	Eselon V	7	5	12	2,07	18
	Jumlah	500	295	795	100,00	870

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kab. Badung Tahun 2019-2020



1.6.4. Distribusi Menurut Jenjang Jabatan

Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenjang jabatan tercatat, jabatan yang paling banyak adalah fungsional umum/staf sebanyak 3.744 orang (49,08%) sedangkan yang paling kecil dengan jabatan struktural sebanyak 795 orang (10,42%).

Tabel 1.7

Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut status jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2019-2020

NO	JABATAN	2020				2019
		LAKI	WANITA	JUMLAH	%	
1.	Struktural	500	295	795	10,42	870
2.	Fungsional Tertentu	1081	2008	3089	40,5	3259
3.	Fungsional Umum/Staf	2134	1610	3744	49,08	4083
	Jumlah	3715	3913	7628	100	8212

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kab. Badung Tahun 2019-2020

1.7. Sumber Daya Keuangan

Anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung disusun dengan target pendapatan sebesar Rp. 4.633.547.455.621,99, dengan realisasi sebesar Rp. 3.850.437.575.643,84 atau sebesar 83,10%. Sedangkan belanja direncanakan sebesar Rp. 4.793.391.784.707,68 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.821.313.758.726,33 (58,86%).

Grafik 1.11

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019-2020





Secara rinci anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Badung tahun 2020 seperti tabel berikut:

Tabel 1.8
Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Pendapatan	4.633.547.455.621,99	3.906.157.463.643,84	84,30
	Pendapatan Asli Daerah	2.701.549.221.693,04	2.116.974.302.051,93	78,36
	Dana Perimbangan	568.349.154.472,00	567.546.105.116,00	99,86
	Lain-lain Pendapatan yang sah	1.363.649.079.456,95	1.221.637.056.475,91	89,59
2	Belanja	4.793.391.784.707,68	3.877.165.048.143,33	80,88
	Belanja Tidak Langsung	2.781.605.222.380,57	2.147.806.666.422,64	77,21
	Belanja Langsung	2.011.786.562.327,11	1.729.362.381.720,69	85,96
	Surplus/(defisit)	-159.844.329.085,69	28.988.415.500,511	-18,14
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	278.775.207.361,18	279.401.874.053,18	100,22
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	278.775.207.361,18	278.775.207.361,18	100,00
	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal		500.000.000,00	-
	Penarikan kembali pokok dana bergulir		126.666.692,00	-
	Pembiayaan Netto	278.775.207.361,18	279.401.874.053,18	100,22
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	118.930.878.275,49	308.525.690.970,69	259,30

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Badung Tahun 2020 (unaudited)

1.8. Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan pembangunan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan



permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Dalam upaya untuk mencapai target capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021, maka yang menjadi isu strategis pada tahun 2020 antara lain :

1. Dampak pandemi covid-19 di Indonesia semakin meningkat tiap harinya dengan cakupan wilayah terdampak yang semakin meluas, sehingga berdampak pada aspek sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Pada bulan Maret 2020 kemudian ditetapkan sebagai kondisi darurat dan bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Presiden tersebut, telah dikeluarkan pula Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Dalam Keputusan Bersama ini pun telah diinstruksikan kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah dan melakukan rasionalisasi belanja dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal.
Dengan adanya pandemi COVID 19 menimbulkan dampak *multifier effect* terhadap segala aspek kehidupan termasuk kesehatan, sosial serta ekonomi.
2. Penurunan kunjungan pariwisata mancanegara dan domestik yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.
3. Meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.
4. Peningkatan daya dukung Pemulihan serta pengembangan perekonomian masyarakat sebagai dampak pandemi COVID 19.
5. Peningkatan kualitas pelayanan dasar/publik berbasis teknologi informasi.



6. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1.9. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan daerah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan.
- b) Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal
- c) Revitalisasi adat, dan karya seni.
- d) Restorasi warisan budaya daerah.
- e) Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya.
- f) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba.
- g) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima
- h) Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset pura (pelaba pura)
- i) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral

2. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Arah Kebijakan :

- a) Mempercepat proses pelayanan publik yang prima (tepat, cepat, akurat) didukung teknologi informasi.
- b) Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- c) Menerbitkan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP).
- d) Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi.

3. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government.

Arah Kebijakan :



- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
- b) Melakukan Evaluasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c) Meningkatkan inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Badung.
- d) Meningkatkan kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintah).
- e) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- f) Meningkatkan kualitas bantuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- g) Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah.
- h) Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal.
- i) Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
- j) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- k) Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan Bimtek/sejenisnya terhadap PNS.
- l) Memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dengan DPRD.
- m) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik.

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.

Arah Kebijakan :

- a) Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20%.
- b) Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi.
- c) Memantapkan mutu pendidikan dasar mendukung wajar 12 tahun.
- d) Memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional agama hindu.
- e) Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif
- f) Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu
- g) Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi.
- h) Pemenuhan sarana prasarana workshop tenaga pendidik
- i) Pemenuhan kualitas gedung pendidikan.
- j) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang terakreditasi.
- k) Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- l) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care).
- m) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia.
- n) Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.
- o) Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.



- p) Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah.
- q) Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.
- r) Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar.
- s) Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan.
- t) Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta perawatan kesehatan masyarakat.
- u) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- v) Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.
- w) Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).
- x) Peningkatan pelayanan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang.
- y) Mengembangkan pusat informasi dan konseling remaja di tingkat sekolah/ perguruan tinggi.
- z) Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS.
- aa) Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam perlindungan sosial.
- bb) Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya.
- cc) Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial.

5. Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Arah Kebijakan :

- a) Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing.
- b) Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi.

6. Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan.
- b) Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM .
- c) Penegakan Hukum dan HAM.
- d) Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e) Meningkatkan kualitas hidup perempuan.



7. Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Arah Kebijakan :

- a) Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b) Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan.
- c) Meningkatkan penataan masyarakat terhadap dokumen lingkungan.
- d) Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah.
- e) Rehabilitasi kualitas lingkungan dan cadangan sumber daya alam
- f) Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
- g) Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h) Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- i) Peningkatan sistem informasi lingkungan.
- j) Meningkatkan kualitas database lingkungan.
- k) Meningkatkan parstisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan.
- l) Meningkatkan pengelolan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- m) Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
- n) Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.
- o) Pembentukan TRC kebencanaan yang memadai.
- p) Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat.
- q) Penanganan pasca bencana yang komperehensif.
- r) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana.

8. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Arah Kebijakan :

- a) Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi
- b) Melaksanakan akreditasi terhadap LPK.
- c) Meningkatkan jumlah dan kualitas Assesor.
- d) Mengoptimalkan penyelesaian hubungan industrial (Perjanjian Kerja Sama).
- e) Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan
- f) Membuka akses kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri
- g) Membuka akses kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri
- h) Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
- i) Mengembangkan dan Mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.



- j) Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis.
- k) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- l) Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas.

9. Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Arah Kebijakan :

- a) Mengintensifkan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
- b) Mengembangkan Pertanian dan Perkebunan berdasarkan potensi wilayah.
- c) Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah.
- d) Optimalisasi ketersediaan sumber daya air.
- e) Mempertahankan kesuburan tanah.
- f) Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu.
- g) Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.
- h) Meningkatkan kesejahteraan petani
- i) Memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pasca panen hasil Pertanian dalam bentuk Koperasi Tani.
- j) Membuka akses pemasaran hasil-hasil pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata
- k) Merevitalisasi fungsi jineng /klumpu/gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.
- l) Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga.
- m) Pelestarian plasma nutfah tanaman langka.
- n) Mengembangkan Pertanian Organik.
- o) Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian.
- p) Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.
- q) Memantapkan program Badung Go Organik .
- r) Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan.
- s) Peningkatan infratraktur pertanian.
- t) Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani.
- u) Menyusun regulasi tentang penampungan dan pemasaran hasil pertanian.
- v) Mengembangkan pariwisata alternatif
- w) Peningkatan kualitas DTW dan desa wisata sesuai standar kepariwisataan.
- x) Melaksanakan promosi pariwisata.
- y) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat.
- z) Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata.
- aa) Mengembangkan paket wisata berbasis pertanian.

Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021 serta kondisi pandemi COVID 19 yang



menimpa masyarakat kabupaten Badung maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2020 yaitu :

1. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selaras dengan prioritas kebijakan PPNSB Kabupaten Badung yaitu, Sandang, Pangan dan Papan, Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Bidang Pariwisata.
2. Penanggulangan masalah kesehatan dan sosial akibat dampak pandemi COVID 19
3. Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID 19
4. Pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dengan memperluas pemanfaatan teknologi informasi.

1.10. Ruang Lingkup

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2020 disusun dengan sistematika laporan sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Menyajikan secara ringkas rencana dan capaian kinerja Kabupaten Badung Tahun 2020.

Bab I Pendahuluan

Menyajikan latar belakang, data umum yang menyangkut gambaran Kabupaten Badung, aspek strategis serta arah kebijakan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menyajikan mengenai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja tahun 2020 yang memuat hasil pengukuran kinerja dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja serta akuntabilitas keuangan

Bab IV Penutup

Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja tahun 2020 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

2.1. RPJMD Semesta Berencana

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.



RPJMD Kabupaten Badung disusun sebagai penjabaran visi, misi dan program dari bupati dan wakil bupati terpilih sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode (lima) tahun. Sesuai peraturan perundang-undangan maka setelah pasangan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk periode Tahun 2016-2021 pada tanggal 17 Pebruari 2016 oleh Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-758 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Badung Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor



131.51-759 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Badung Provinsi Bali, telah menyusun RPJMD yang merupakan periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025.

Sasaran pokok dari RPJPD periode ketiga tersebut yakni meningkatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang guna terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjabarkan visi-misi dan program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD, secara substansi berpedoman pada prinsip-prinsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang merupakan implementasi dari Ajaran Tri Sakti yaitu : **berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan**. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga mengadopsi filosofis kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karna serta Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka.

RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 ditujukan untuk melanjutkan kembali kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Badung dalam lima Tahun kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Kabupaten Badung sebagai berikut :

RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG 2016-2021

VISI

MISI

MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG
BERLANDASKAN TRIHITA KARANA MENUJU MASYARAKAT
YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan
5. Memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yg menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya





Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD
Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
Visi :			
“MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”			
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama			
1.	Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Indek kerukunan umat beragama
		2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi			
2.	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Indeks kepuasan masyarakat
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government			
3.	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	4. Katagori akuntabilitas kinerja kabupaten
		5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5. Opini BPK
		6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	6. Katagori penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan			
4.	Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7. Indeks pembangunan manusia
		8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8. Indek Kebahagiaan
		9. Menurunnya angka kemiskinan	9. Persentase penduduk miskin
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan			



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
5.	Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	10. Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10. Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
6.	Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	11. Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada	11. Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada
		12. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12. Persentase penegakan Perda dan Perkada
7.	Terwujudnya Pengarasutamaan Gender	13. Meningkatnya Pengarusutamaan gender	13. Indeks pembangunan gender (PG)
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana			
8.	Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	14. Indek kualitas lingkungan hidup
			15. Indeks pertanian
9.	Terwujudnya Penanggulangan bencana secara terpadu	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16. Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah			
10.	Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17. Tingkat pengangguran terbuka
11.	Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	18. Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya			
12.	Meningkatnya ketersediaan pangan	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19. Skor pola pangan harapan
13.	Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor Pertanian dan Perikanan	19. Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20. Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing



Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana 2016-2021, Bupati dan Wakil terpilih telah ditetapkan 5 (lima) program prioritas daerah sebagai penjabaran **Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB)** sebagai berikut:

Grafik 2.1.

Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021



Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien serta membangun akuntabilitas kinerja yang semakin baik, maka Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 telah dirumuskan secara terukur dan akuntabel. Untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan Kabupaten Badung yang lebih fokus, efektif, efisien dan akuntabel maka masing-masing sasaran strategis dilakukan penyesuaian serta *cross cutting program*. Adapun contoh penyesuaian program untuk pencapaian sasaran strategis RPJMD seperti berikut :



Grafik 2.2.

Cross Cutting Program Terhadap Sasaran RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021



Keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan Indikator kinerja Utama maka setiap sasaran RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan pendekatan pohon kinerja.

Untuk mencapai target indikator sasaran pembangunan sesuai perencanaan RPJMD semesta berencana, dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah (isu strategis) maka tema pembangunan tahun 2020 :

“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan”.



Musrenbang RPKD Kabupaten Badung Tahun 2019 di Kecamatan Mengwi, Selasa (12/2/2019)



2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Tujuan perjanjian kinerja adalah : 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 4) sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward* dan *punishment*); 5) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 6) Sebagai dasar dalam perjanjian sasaran kinerja pegawai.



Perjanjian Kinerja tahun 2020 disusun mengacu pada Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2016 – 2021, dan telah ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2020 seperti berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1 Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	78,35
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2 Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	84
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	81
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4 Katagori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	78,40 (BB)
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5 Opini BPK	Nilai	WTP
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6 Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	73,50 (BB)
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7 Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,37
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8 Indek Kebahagiaan	Nilai	75,5
9	Menurunnya angka kemiskinan	9 Persentase penduduk miskin	%	1,00-0,60
10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10 Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,85
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11 Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	%	90
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12 Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	90
13	Meningkatnya pengarusutamaan gender	13 Indeks pembangunan gender (PG)	Nilai	76
14	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14 Indeks kualitas lingkungan hidup (KLH)	Nilai	69,30
		15 Indeks Pertanaman (IP)	Nilai	233
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16 Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17 Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,320
17	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	18 Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	89,38
18	Meningkatnya produksi pangan harapan	19 Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	96,5
19	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20 Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	72
20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	28,97



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Potret Pengukuran dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati yang efektif serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja, telah dilakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target kinerja untuk mengarahkan agar program pembangunan daerah dapat difokuskan untuk mencapai sasaran strategis secara efisien serta semakin memacu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung yang dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 13 tujuan, 20 sasaran dan 21 indikator kinerja utama (IKU). Untuk tahun 2020 terdapat 7 (Tujuh) indikator kinerja utama (IKU) yang belum dapat dilaporkan hasil capaian kinerjanya terdiri dari:

1. Indikator Kinerja Utama yang tidak dilaksanakan pengukuran melalui survey sebanyak 4 indikator, yaitu: **Indeks kerukunan umat beragama, Indeks kepuasan masyarakat, Indek Kebahagiaan, dan Skor Pola Pangan Harapan.**
2. Indikator Kinerja Utama yang belum di *release*/terbit sebanyak 3 indikator, yaitu: **Opini BPK** dari BPK RI dan indikator **Katagori akuntabilitas Kinerja Kabupaten, Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)** dari Kementerian PAN-RB RI.

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran sesuai RPJMD 2016-2021 memiliki *progress* yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya namun tidak bisa



dipungkiri ada capaian kinerja yang tingkat kemajuannya perlu lebih ditingkatkan karena memang mengalami dinamika permasalahan yang cukup tinggi.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja utama (IKU). Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Badung tahun 2020 seperti berikut:

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	78,35	Tidak dilaksanakan survei	
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	84	74,4	88,57
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	81	Tidak dilaksanakan survei	
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4. Katagori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	78,40	Data belum diterbitkan	
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5. Opini BPK	Nilai	WTP	Data belum diterbitkan	
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6. Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	73,50 (BB)	Data belum diterbitkan	
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,37	81,6	100,28
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8. Indek Kebahagiaan	Nilai	75,5	Tidak dilaksanakan survei	
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9. Persentase penduduk miskin	%	1,00-0,60%	2,02	-2,00



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10. Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,85	9,78	124,59
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11. Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	%	90	92,09	102,32
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12. Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	90	95,26	105,84
13.	Meningkatnya pengarusutamaan gender	13. Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	76	95,5	125,66
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	69,3	70,85	102,24
		15. Indeks Pertanian	Nilai	233	205,3	88,11
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16. Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4	Level 4	100,00
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17. Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,32	6,92	- 1962,50
17.	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	18. Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	89,38	98,25	109,92
18.	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19. Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	96,5	Tidak dilaksanakan survei	
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20. Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	72,00	74,36	103,28
20.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	28,97	24,61	84,95
Rata-rata Kinerja Kabupaten						-34,70



3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama

Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali yang paling dinamis dan heterogen dari perspektif agama, sosial-budaya-politik sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perhatian serius tentang kerukunan umat beragama untuk menjaga wilayah Kabupaten Badung. Kerukunan Umat beragama di Kabupaten Badung menjadi perhatian yang serius sehingga menjadi salah satu indikator pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Indikator Sasaran strategis RPJMD meningkatnya toleransi hidup beragama adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006, yang dimaksud kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai. Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai.

Indeks Kerukunan Umat Beragama dinilai dari tiga indikator yang digunakan dalam riset ini yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Kementerian Agama RI juga membuat kategori Indeks Kerukunan Umat Beragama menjadi beberapa kategori nilai, yaitu : sangat tinggi (di atas 80), tinggi (antara 60-80), sedang (di bawah 60-40), dan rendah (40 ke bawah).

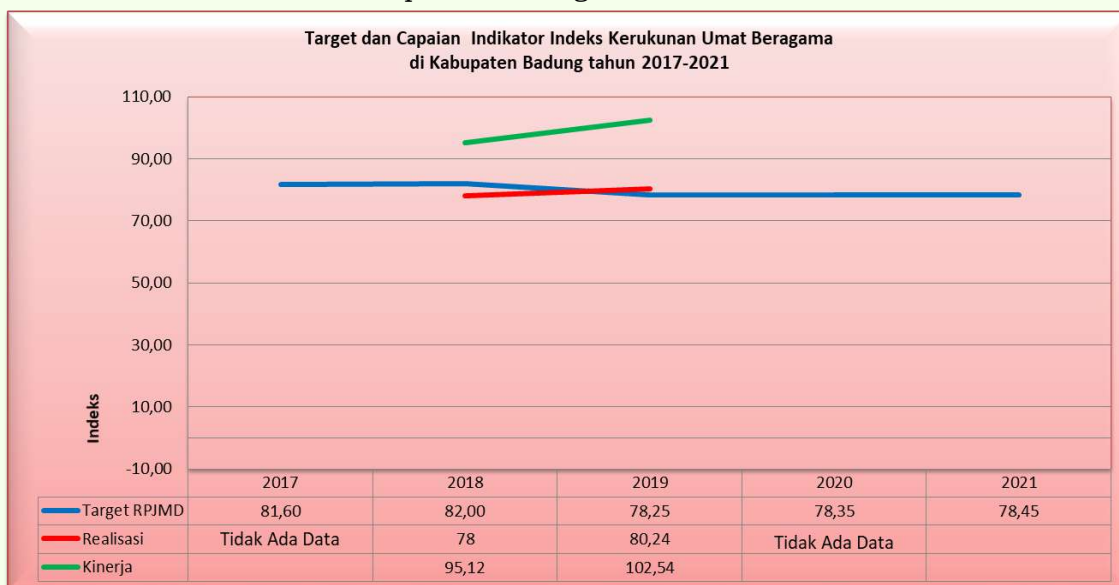
Pengukuran indeks kerukunan umat beragama untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan oleh karena adanya refocusing anggaran untuk pengendalian COVID 19 serta adanya penurunan pendapatan daerah terutama dari sektor pariwisata dampak



pandemi COVID-19. Oleh karena itu nilai indeks kerukunan umat beragama untuk tahun 2020 tidak ada dan kinerjanya tidak bisa diukur.

Sebagai perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya toleransi hidup beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2019 sebesar 80,24 dari target yang ditetapkan sebesar 78,25 sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,54%. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung termasuk kategori sangat tinggi. Secara lengkap target dan capaian indikator indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung seperti pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Target dan Capaian Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama
di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Hasil capaian indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2018 dengan capaian sebesar 78 dari target yang ditetapkan sebesar 82 sehingga menunjukkan trend peningkatan sebesar 2,24 poin.

Berdasarkan data yang ada maka hasil capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan bahwa capaian telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 80,24 sampai capaian pada tahun 2019 dari target yang ditetapkan akhir RPJMD sebesar 78,45.

Hasil capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 73,83. Kategori Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional termasuk tinggi. Secara lengkap perbandingan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama seperti grafik berikut :



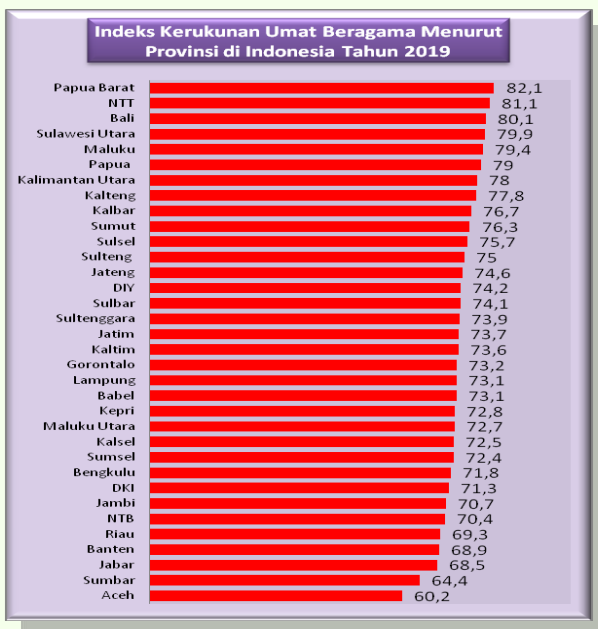
Grafik 3.2

Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2017-2019



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

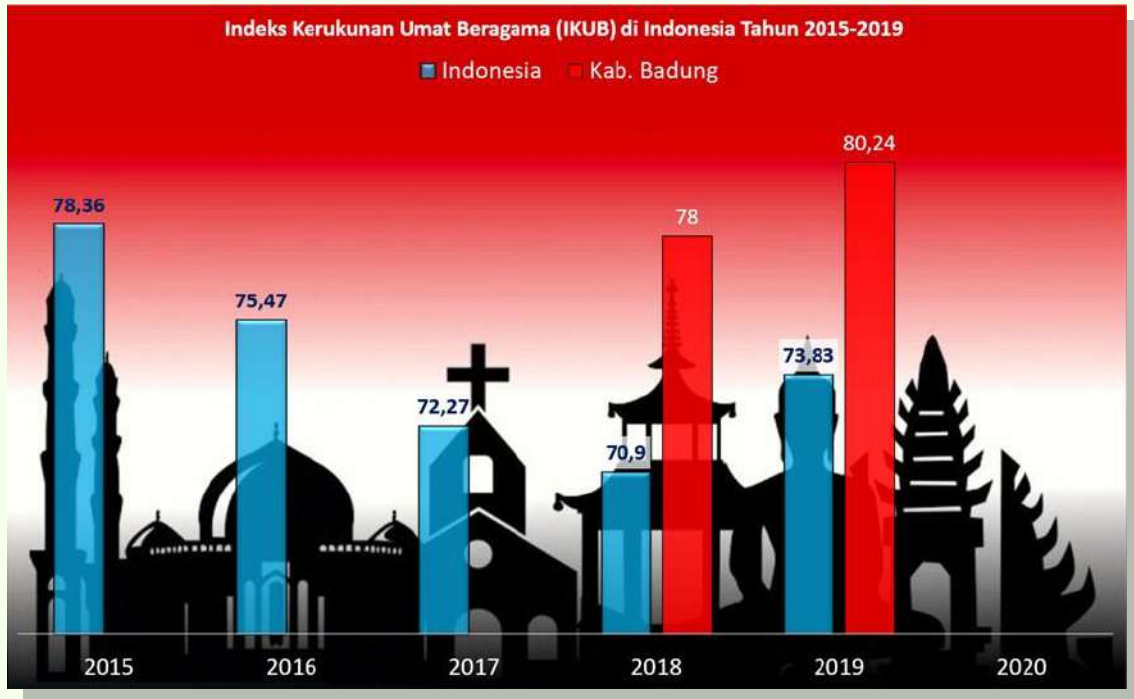
Berdasarkan data Kementerian agama, indeks kerukunan umat beragama (KUB) di Indonesia tahun 2019 berada pada angka 73,83. Dari data indeks KUB tersebut, diketahui pula bahwa provinsi dengan indeks toleransi tertinggi adalah Papua Barat yang mencapai angka 82,1 dan masuk kategori sangat tinggi. Provinsi Bali menduduki urutan ke 3 (tiga) dengan indeks kerukunan umat beragama sebesar 80,1. Sementara itu, Provinsi Aceh memperoleh nilai terendah di antara provinsi lain dengan nilai 60,2 (kategori KUB termasuk sedang).



Sebagai pembandingan Indeks Kerukunan Umat beragama di Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengembangan (litbang) Kementerian Agama diperoleh informasi bahwa indeks kerukunan umat beragama tahun 2019 sebesar 73,83, tahun 2018 sebesar 70,90, tahun 2017 sebesar 72,27, tahun 2016 berada diangka 75,47, angka tersebut naik 0,11 % ketimbang Tahun 2015, yakni sebesar 75,36.



Grafik 3.3
Indeks Kerukunan Umat Beragama
di Kabupaten Badung dan Indonesia Tahun 2015-2019



Berdasarkan grafik 3.3 capaian indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung lebih tinggi dibandingkan dengan indeks kerukunan umat beragama di Indonesia, ini berarti rata-rata masyarakat di Kabupaten Badung memiliki hubungan harmonis sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan dimensi dari tingkat kerukunan umat beragama (KUB) di Kabupaten Badung tahun 2019 menunjukkan capaian pada dimensi Toleransi dengan nilai sebesar 83,89, Kesetaraan sebesar 77,48 dan Kerjasama sebesar 79,27, sehingga nilai rata-rata kerukunan umat beragama sebesar 80,24 yang berarti tingkat kerukunan umat beragama termasuk kategori sangat tinggi di Kabupaten Badung.

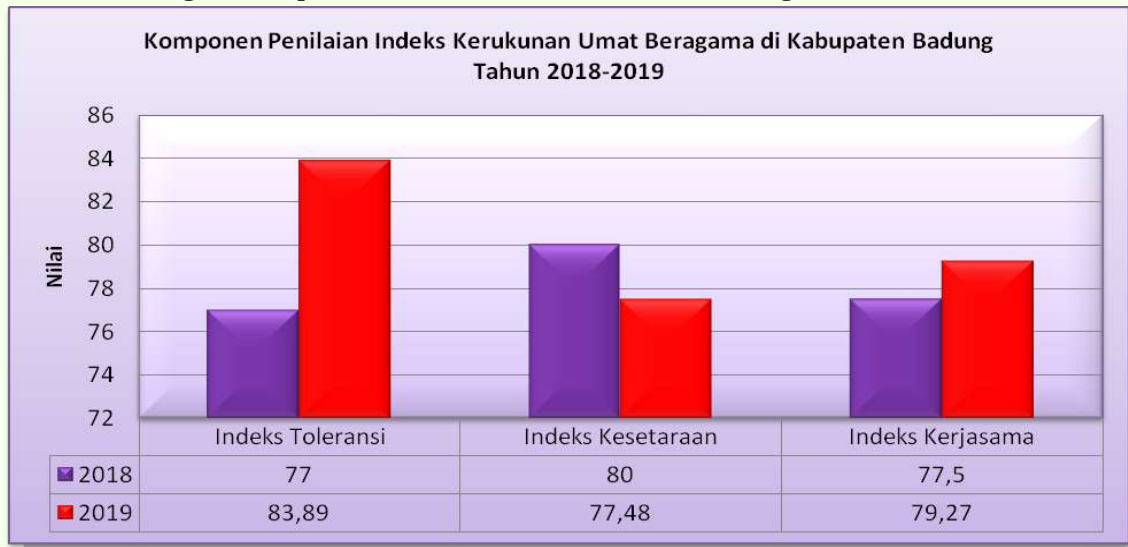
Terciptanya kerukunan umat beragama yang tinggi di Kabupaten Badung tidak terlepas dari tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberagaman. Adanya rasa saling menghargai antar sesama umat beragama, peran serta tokoh agama dalam memberikan pemahaman bagi umatnya, serta tingginya sinergitas tokoh adat dan tokoh masyarakat antar agama yang menciptakan suatu kerukunan



umat beragama. Secara lengkap perbandingan komponen indeks KUB di Kabupaten Badung seperti grafik berikut:

Grafik 3.4

Perbandingan Komponen Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2018-2019



Sasaran meningkatnya toleransi hidup beragama didukung 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan. Program yang mendukung pencapaian target sasaran ini adalah program penguatan ideologi dan pengembangan pengawasan kebangsaan (wasbang). Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 118.582.574.537,64,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 108.192.474.157,- sehingga penyerapannya sebesar 91,23%.

Beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi indeks kerukunan umat beragama dengan kategori nilai sangat tinggi di Kabupaten Badung antara lain :

- 1) Kesadaran terhadap konstitusi empat pilar pokok yang sudah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai nilai-nilai perekat bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat nilai tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai yang digali dari budaya asli bangsa Indonesia. Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai tersebut dipegang teguh secara konsekwen oleh semua lapisan masyarakat dalam keberagaman hidup beragama.
- 2) Peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung senantiasa membangun sinergisitas agar terbangun keharmonisan yang baik di lingkungan desa dan kelurahan sehingga tercipta tri kerukunan umat beragama yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah



- 3) Peran tokoh agama sebagai *opinion leader* terhadap umatnya sudah berjalan dengan baik sehingga kerawanan konflik yang akan muncul sangat rendah dan bahkan belum pernah muncul konflik tersebut.
- 4) Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai kebijakan yang mengayomi seluruh agama dan aliran kepercayaan yang ada dengan membangun komunikasi dan kerukunan lintas agama dengan mengedepankan aspek-aspek persamaan bukan menggali perbedaan-perbedaan yang memang sudah pasti ada.
- 5) Berdasarkan aspek idiologis, historis serta sosiologis masyarakat Kabupaten Badung memiliki latar belakang pendidikan, wawasan dan pemahaman, serta tingkat intelektual yang baik menjadi nilai kekuatan pada aspek toleransi masyarakat Kabupaten Badung khususnya pada daerah yang heterogenitasnya tinggi.

Walaupun indeks KUB di Kabupaten Badung termasuk kategori sangat tinggi namun ada beberapa tantangan kedepan yang mempengaruhi kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung antara lain :

1. Semakin meningkat kecenderungan umat beragama yang cenderung lebih eksklusif atau bersifat radikal dan intoleran dan pandangan subyektif dalam memandang kebenaran agama lain.
2. Munculnya sikap militan yang sangat berlebihan dalam kehidupan beragama.
3. Kondisi sosial budaya masyarakat yang membawa umat mudah melakukan otak-atik terhadap apa yang ia terima, sehingga kerukunan dapat tercipta tetapi agama itu kehilangan arti, fungsi maupun maknanya.
4. Makin bergesernya pola hidup berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong ke arah kehidupan individualistis.

Strategi yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kerukunan umat beragama yaitu Pemerintah Kabupaten Badung akan meningkatkan perannya dalam tri kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, serta kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama meliputi :

- 1) Meningkatkan peran dan sinergitas FKUB, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat guna meminimalisir konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan, baik itu yang bersifat *in-group* ataupun *out-group*.
- 2) Pemerintah Kabupaten Badung berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif seperti melalui penguatan pendidikan multikultural dari tingkat Kabupaten sampai ke Desa dan Kelurahan.
- 3) Membangun dan mengembangkan FGD dari tingkat Kabupaten sampai desa dan kelurahan, melaksanakan outing, dan jambore pada generasi muda lintas agama sehingga akan tumbuh pemahanan ajaran agama secara komprehensif



menjadikan interaksi sosial yang lebih akrab antar pemuda lintas agama dan masyarakat

- 4) Memperhatikan semua aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, budaya dan mayoritas pemeluk agama dalam memberikan bantuan sarana-prasana maupun dana sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial pada masyarakat yang dapat memicu kerentanan hubungan antar umat beragama.
- 5) Memperkuat dasar-dasar tri kerukunan beragama antara lain: kerukunan internal umat beragama, antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah.
- 6) Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
- 7) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif yang mendukung pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
- 8) Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementif bagi kemanusiaan yang mengarah kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
- 9) Meningkatkan pemahan umat beragama untuk menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat.

Analisis Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Pelestarian Adat dan Budaya

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budia atau akal). Bentuk lain dari kata budaya dalam bahasa inggris disebut *culture*. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas. Unsur-unsur budaya seperti bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi, dan palaratan, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem religi serta sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan.

Kabupaten Badung yang merupakan bagian dari Provinsi Bali memiliki kebudayaan yang adiluhung bersifat local genius sehingga perlu dilestarikan. Di era globalisasi dewasa ini kebudayaan lokal (kearifan lokal) sangat dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang membawa dampak positif maupun negatif terhadap eksistensi budaya tersebut. Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan wisata, sehingga secara langsung akan beradapan dengan budaya asing. Demikian juga dengan perkembangan teknologi informasi akan membawa dampak langsung terhadap eksistensi kebudayaan masyarakat Kabupaten Badung.



Penetapan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya dengan indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya diharapkan dapat menumbuhkan sinergitas/harmonis antara pelaksanaan pembangunan dengan lestarnya budaya, seperti pengembangan pariwisata harmonis dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

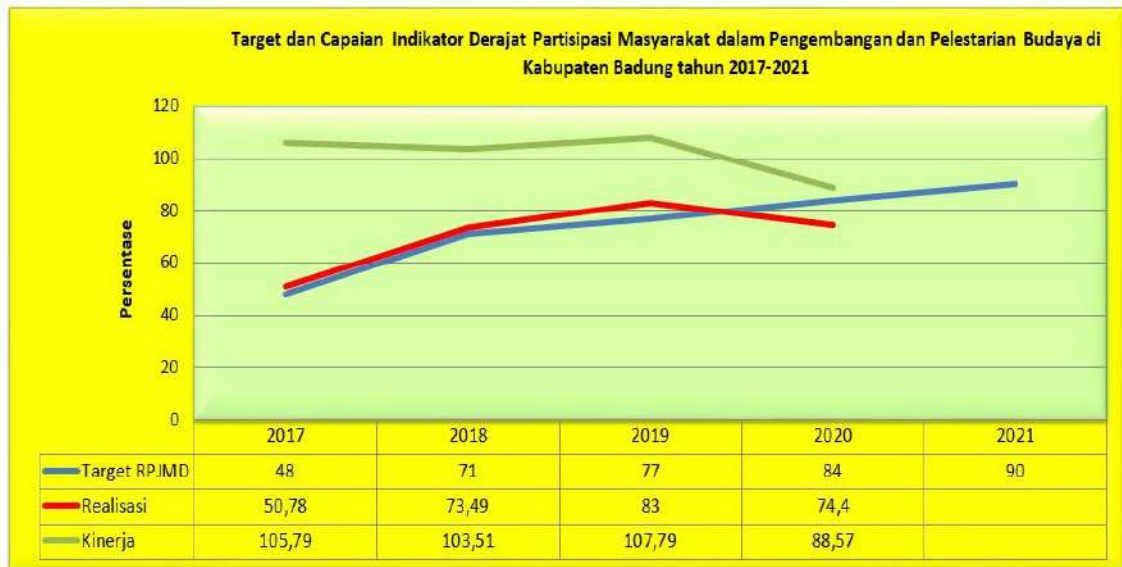
Indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya diukur dengan formula Jumlah desa budaya/adat maju dibagi dengan jumlah desa budaya/adat yang ada dikalikan seratus) + (jumlah organisasi budaya/sekaa tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya/sekaa kali seratus) dibagi 2 (dua).

Hasil capaian indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya tahun 2020 sebesar 74,4% dari target yang ditetapkan sebesar 84% sehingga capaian kinerja sebesar 88,57%. Hasil capaian kinerja untuk tahun 2020 dibawah target yang ditetapkan.

Hasil capaian pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 83% dari target yang ditetapkan sebesar 77%, berarti capaian pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan hasil capaian tahun 2020 masih dibawah target yang ditetapkan akhir RPJMD sebesar 90% namun tren capaian 2020 menurun bila dibandingkan dengan periode tahun 2017-2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sebagai perbandingan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya di Kabupaten Badung seperti grafik berikut:

Grafik 3.5

Perbandingan target dan Realisasi Indikator Derajat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya Tahun 2017-2021



Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung tahun 2019



Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya ditinjau dari kategori tingkat kemajuan desa adat menunjukkan bahwa semua desa adat (122 desa adat) di Kabupaten Badung termasuk kategori desa adat maju.

Sedangkan berdasarkan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Badung menunjukkan dari 61 cagar budaya yang ada semuanya dalam kategori lestari. Secara Kategori desa adat dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Badung seperti tabel berikut :

Tabel 3.2
Kategori Desa Adat dan Cagar Budaya di Kabupaten Badung Tahun 2020

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA ADAT	JML DESA ADAT		JUMLAH CAGAR BUDAYA	JML. CAGAR BUDAYA LESTARI
			BERKEM BANG	MAJU		
1.	Petang	27	-	27	22	22
2.	Abiansemal	34	-	34	7	7
3.	Mengwi	38	-	38	16	16
4.	Kuta Utara	8	-	8	4	4
5.	Kuta	6	-	6	-	-
6.	Kuta Selatan	9	-	9	12	12
	Kabupaten	122	-	122	61	61

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2020

Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat disertai pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya. Dalam organisasi subak, dikenal adanya beberapa perangkat. Perangkat-perangkat yang ada dalam subak adalah pekaseh (ketua subak), petajuh (wakil pekaseh), penyarikan (juru tulis), petengen (juru raksa), kasinoman (kurir), dan beberapa yang lainnya. Subak merupakan salah satu warisan dunia yang diakui oleh UNESCO.

Keberadaan subak di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa seluruhnya termasuk dalam kategori lestari atau dari 214 kelompok tani semuanya (100%) lestari. Sedangkan menurut komponen jumlah sekaa/kelompok tari, tabuh dan Kidung/Kekawin telah mendapatkan pembinaan, dari 2280 sekaa/kelompok yang aktif sebanyak 1505 sekaa atau 66%. Secara Lengkap jumlah subak dan sekaa/kelompok seni menurut kecamatan di Kabupaten Badung, seperti tabel berikut:



Tabel 3.3
Kategori Subak Lestari dan Sekaa yang Berkembang
di Kabupaten Badung Tahun 2020

No.	KECAMATAN	JUMLAH SUBAK	JUMLAH SUBAK LESTARI	JUMLAH SEKAA YANG ADA			JUMLAH SEKAA YANG AKTIF		
				TARI	TABUH	KIDUNG/ KEKAWIN	TARI	TABUH	KIDUNG/ KEKAWIN
1	Petang	43	43	81	97	13	42	25	10
2	Abiansemal	53	53	157	228	89	59	73	25
3	Mengwi	70	70	127	473	285	62	150	151
4	Kuta Utara	18	18	136	175	35	73	93	16
5	Kuta	3	3	9	86	18	5	40	10
6	Kuta Selatan	27	27	58	173	40	25	88	25
	Kabupaten	214	214	568	1232	480	266	469	237

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2020

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya didukung oleh 3 program dan 44 kegiatan. Program pendukung meliputi: program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya dan Program Pengelolaan keragaman budaya. Kegiatan yang dilaksanakan seperti pembinaan lembaga adat (desa adat, sekaa teruna, subak dan kelompok-kelompok kesenian). Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 118.571.440.726,64,- dengan realisasi sebesar Rp. 108.183.603.657 dengan serapan anggaran sebesar 91,24%.

Beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan Indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya antara lain : adanya pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan pembinaan terhadap kelompok seni sangat terbatas serta adanya rasionalisasi anggaran sehingga berkurangnya cakupan aktivitas seni dan budaya.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dalam pencapaian target indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya adalah meningkatnya komitmen pemerintah terhadap eksistensi budaya, adat dan seni, meningkatnya eksistensi adat masyarakat, menguatnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat, dan meningkatnya pelestarian seni dan warisan budaya melakukan inventarisasi serta sosialisasi terhadap situs budaya daerah serta pelestarian warisan budaya daerah

Strategi yang akan dilaksanakan untuk terus meningkatkan indikator ini adalah mengidentifikasi dan mendata secara akurat cagar budaya dan sekaa (kelompok) seni yang ada, meningkatkan pembinaan serta perlindungan dari aspek legal dalam pengelolaan pelestarian budaya, pemberian bantuan anggaran untuk pemeliharaan/perawatan warisan budaya.



Analisis Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Salah satu evaluasi implementasi pelayanan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat (SKM).

Indeks kepuasan masyarakat dihitung dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur). Unsur Survei Kepuasan Masyarakat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ini meliputi: 1) persyaratan 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Waktu Penyelesaian 4) Biaya/Tarif 5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan 6) Kompetensi pelaksana 7) Perilaku pelaksana 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dan 9) Sarana dan Prasarana. Berdasarkan kesembilan unsur maka diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat seperti tabel berikut :

Tabel 3.4
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik



Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan indikator hasil survei kepuasan masyarakat atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diharapkan dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai standar yang cepat, mudah, murah, nyaman dan ramah sebagai wujud pelayanan prima.

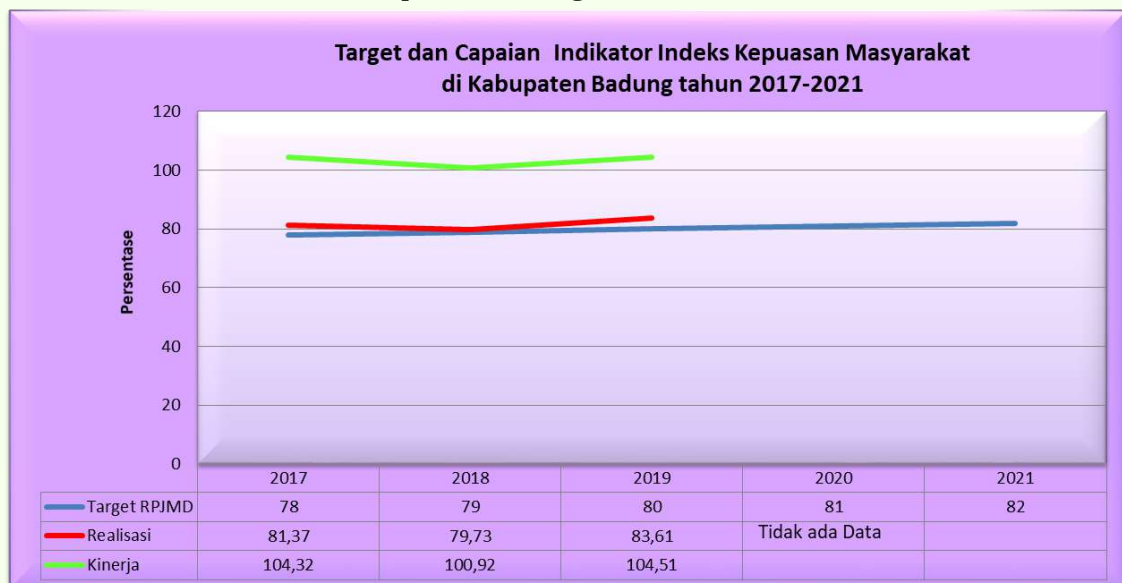
Pengukuran indeks kepuasan masyarakat untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan oleh karena adanya refocusing anggaran untuk pengendalian COVID 19, pelaksanaan survey tidak bisa dilakukan ditengah pandemi COVID19 dengan penerapan protokol kesehatan serta adanya penurunan pendapatan daerah yang signifikan/bermakna terutama penerimaan pajak hotel dan restoran (PHR) dari sektor pariwisata dampak pandemi COVID 19. Oleh karena itu nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 tidak ada dan kinerjanya tidak bisa diukur.

Sebagai gambaran capaian indikator indeks kepuasan masyarakat dapat diinformasikan bahwa hasil capaian indikator indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 sebesar 83,61 dari target yang ditetapkan sebesar 80 sehingga kinerjanya sebesar 104,51%, berarti capaian pada tahun 2019 telah melampaui target dan indeks kepuasan masyarakat kategori baik. Capaian target tahun 2019 lebih baik, bila dibandingkan dengan tahun 2018 dengan capaian sebesar sebesar 79,73 dengan predikat baik.

Hasil capaian tahun 2019 telah melampaui dari target yang ditetapkan akhir RPJMD sebesar 82, namun trend capaian dari tahun 2017-2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Secara lengkap perbandingan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Badung seperti grafik berikut:

Grafik 3.6

Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2019



Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung tahun 2015-2019 berdasarkan perangkat daerah menunjukkan bahwa perangkat daerah lebih banyak termasuk kategori baik dan tidak pernah ada perangkat daerah dengan kategori kurang baik atau tidak baik. Secara lengkap kategori indeks kepuasan masyarakat menurut perangkat daerah sebagai berikut:

Grafik 3.7

Kategori Perangkat Daerah Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2015-2019



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2019

Penilaian indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Badung juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat, dimana Pemerintah Kabupaten Badung sebagai *role model* pelayanan publik Nasional tahun 2019.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Balitbang Kabupaten Badung dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat menurut perangkat daerah. Perangkat daerah dengan

Badung raih penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif dalam IGA 2020

© Sabtu, 19 Desember 2020 19:38 WIB





indeks kepuasan masyarakat paling tinggi dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 92,17 sedangkan yang paling rendah dicapai oleh Kecamatan Kuta Selatan dengan capaian sebesar 77,85. Secara lengkap nilai indeks kepuasan masyarakat menurut perangkat daerah seperti grafik berikut:

Grafik 3.8

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2019



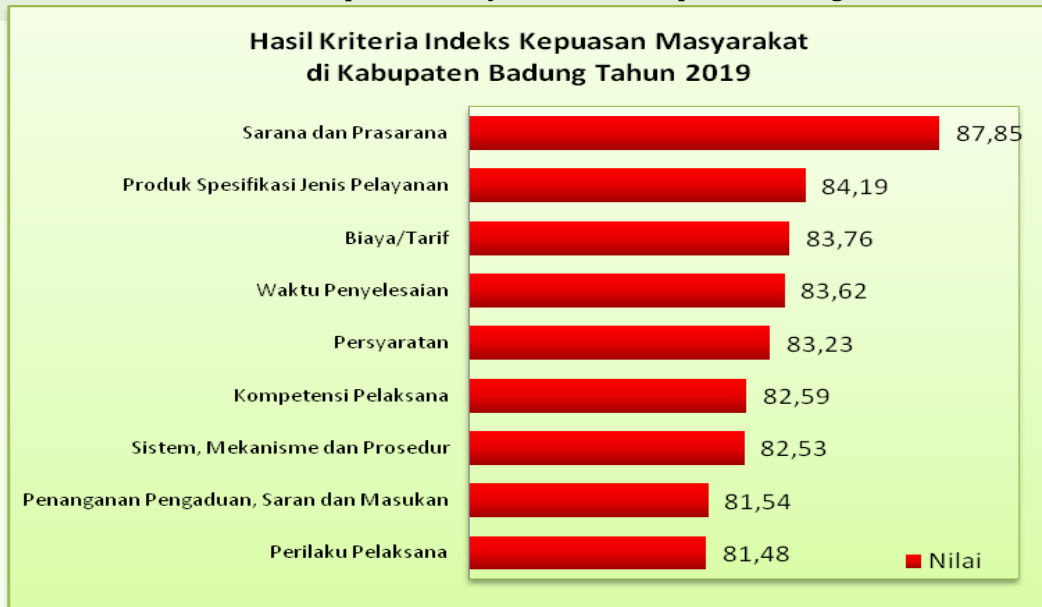
Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2019

Berdasarkan unsur kepuasan masyarakat, diperoleh informasi bahwa dari sembilan unsur maka unsur yang paling tinggi nilainya adalah sarana dan prasarana sebesar 87,85% dan yang terendah nilainya adalah perilaku pelaksana sebesar 81,48. Secara lengkap capaian unsur kepuasan masyarakat sebagai berikut :



Grafik 3.9

Hasil Kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2019



Program inovatif dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung secara nyata dilapangan, mendapat apresiasi positif dari berbagai lapisan masyarakat.

Melalui sasaran ini diharapkan mampu mendorong seluruh OPD untuk terus menumbuhkan dan mengembangkan berbagai program inovatif dalam pelayanan publik. Upaya yang dilakukan melalui



pembinaan dan evaluasi bekerjasama dengan ORI dan akademisi Perguruan Tinggi dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan memperkuat kualitas SDM pelayanan publik. Disamping itu pula, tahun 2019 Kabupaten Badung meraih penghargaan inovasi pelayanan publik



dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan masuk Top 99 dan Top 45. dari 3.400 inovasi terbaik Nasional tahun 2019 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan satu inovasi yang masuk nominasi TOP 99 yaitu **Gerakan Badung Sehat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (GARBASARI)** dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Sedangkan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Badung meloloskan dua inovasi yaitu **Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) Berbasis Kearifan Lokal** dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan inovasi **Aplikasi FishGo** dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) mendapat penghargaan TOP 99 kemudian berlanjut meraih penghargaan TOP 45 serta berhak mewakili Indonesia di *United Nations Public Service Awards* (UNPSA) tahun 2020.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik didukung oleh 18 program dan 69 kegiatan. Program pendukung meliputi: Program Peningkatan Kapasitas pelayanan public, Program penataan administrasi kependudukan, program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan berupa kegiatan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan (SOP) dan Proses bisnis, Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik sampai ke tingkat desa upaya tersebut diperkuat dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan program lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan seperti pembinaan lembaga adat (desa adat, sekaa teruna, subak dan kelompok-kelompok kesenian). Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 71.367.516.732,86,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.625.458.652,- dengan serapan anggaran sebesar 69,54%.

Selanjutnya untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat maka langkah-langkah perbaikan kedepan meliputi :

- 1) Meningkatkan survey kepuasan masyarakat pada seluruh perangkat daerah berbasis teknologi informasi sehingga lebih update dan dapat terukur secara teratur.
- 2) Meningkatkan pembinaan kepada unit pelayanan public.
- 3) Meningkatkan inovasi pelayanan public sehingga lebih responsive, cepat, akurat dan berkeadilan
- 4) Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima), untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
- 5) Mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
- 6) Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap



petugas dalam memberikan pelayanan.

- 7) Meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi, telepon, SMS center, Email, dan atau penempatan Kotak Saran.

Analisis Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, hal ini terlihat dalam RPJMD 2016-2021 dengan perumusan sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja predikat/kategori Akuntabilitas Kinerja (AKIP).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dengan demikian maka setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan akuntabilitas kinerja atau dengan kata lainnya bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaporkan hasil dari setiap anggaran yang dipergunakan serta faktor keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi.

Pengukuran indikator kategori akuntabilitas kinerja kabupaten untuk tahun 2020 belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Sebagai gambaran capaian indikator kategori akuntabilitas kinerja kabupaten dapat diinformasikan bahwa tahun 2019 sebesar 77,90 termasuk kategori kinerja sangat baik. Hasil capaian kinerja pada tahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan RPJMD sebesar 78, namun telah mencapai target sesuai kategori BB (sangat Baik).

Hasil capaian indikator kinerja AKIP tahun 2019 lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2018 sebesar 77,85. Sedangkan hasil capaian indikator kinerja AKIP tahun 2019 masih dibawah target akhir RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 yang ditargetkan sebesar 80,10 (A). Secara lengkap hasil capaian nilai laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Badung tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :



Grafik 3.10

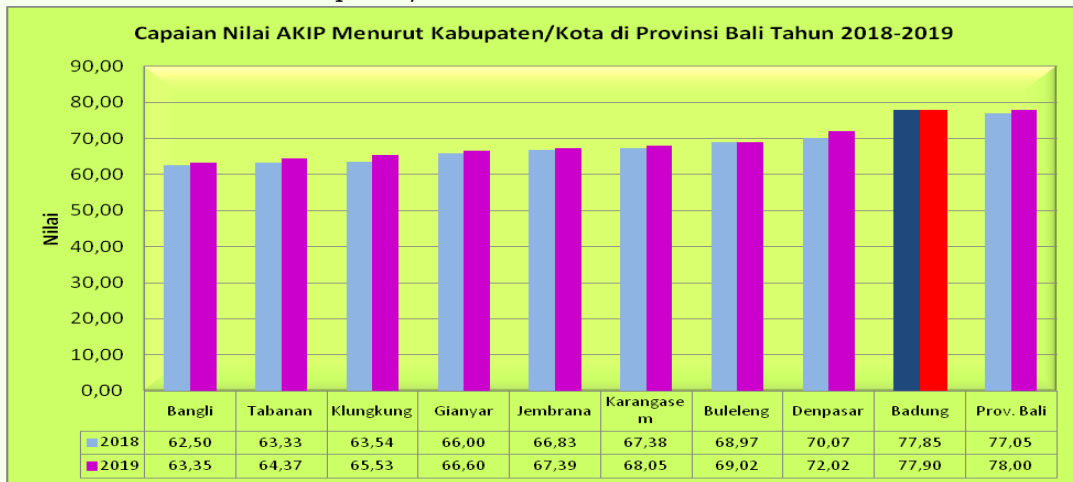
Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Hasil capaian nilai AKIP Kabupaten Badung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Bali menunjukkan nilai AKIP tertinggi. nilai AKIP Provinsi Bali dibandingkan dengan nilai AKIP Kabupaten Badung menunjukkan nilai AKIP Provinsi Bali lebih tinggi 0,10 poin. Perbandingan nilai AKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat seperti grafik berikut :

Grafik 3.11

Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2019

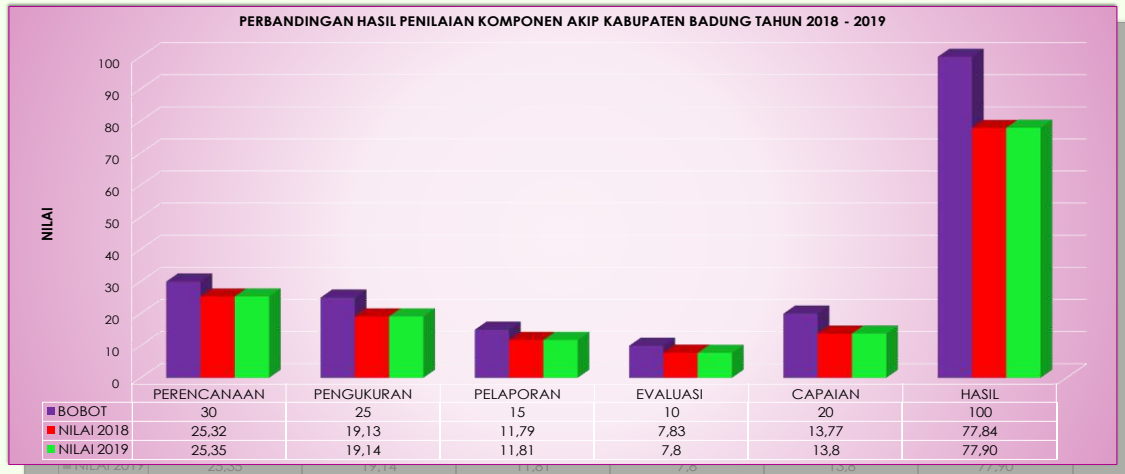




Sedangkan menurut 5 (lima) komponen penilaian AKIP diperoleh informasi bahwa hasil penilaian untuk evaluasi internal mengalami penurunan, sedangkan 4 komponen lainnya mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut kecil.

Grafik 3.12

Perbandingan Hasil Penilaian Komponen AKIP Kabupaten Badung Tahun 2018-2019



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten didukung oleh 4 program dan 9 kegiatan. Program pendukung meliputi: program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur, Perencanaan dan Penganggaran perangkat daerah, Program Peningkatan Kapasitas pelayanan publik dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.084.775.545,- dengan realisasi sebesar Rp. 962.403.530,- dengan serapan anggaran sebesar 88,72%.

Faktor pendorong terhadap pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten antara lain: Adanya komitmen Pimpinan kepala daerah untuk meningkatkan SAKIP, Adanya Tim SAKIP kabupaten yang memberikan bimbingan SAKIP ke perangkat daerah, Dukungan anggaran untuk implementasi kegiatan, Revisi RPJMD, penyempurnaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan penyelarasan dokumen perencanaan serta *refocusing* program melalui *cross cutting* program telah menunjukkan peningkatan kualitas AKIP di Kabupaten Badung.

Faktor yang masih menjadi penghambat dalam implementasi SAKIP antara lain: komitmen beberapa pimpinan OPD masih belum optimal dimana implementasi SAKIP masih bersifat administratif (dokumen SAKIP), perubahan aturan pada perencanaan dan keuangan, implementasi pohon kinerja kedalam dokumen anggaran belum dapat dilakukan, evaluasi internal kinerja oleh OPD belum optimal, dan belum optimalnya tindak lanjut OPD terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat.



Strategi dan upaya untuk lebih meningkatkan nilai SAKIP antara lain: revisi pedoman pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Badung melalui penyusunan peraturan bupati tentang implementasi SAKIP dan pedoman pelaksanaannya, pembinaan/bimtek SAKIP kepada kepala perangkat daerah, pelaksanaan evaluasi internal capaian kinerja.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengimplementasikan SAKIP menjadi budaya kinerja melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja serta secara bertahap mengubah mindset ASN agar lebih berorientasi kinerja melalui upaya penyelarasan program dan kegiatan agar sesuai dengan sasaran RPJMD. Melalui penerapan Pohon Kinerja dan *refocusing program* mampu mencegah *inefisiensi* anggaran dan kini telah dirasakan manfaatnya dengan adanya perubahan *mindset* dalam perencanaan dan penganggaran serta adanya efisiensi anggaran. Dengan adanya efisiensi program/kegiatan akan berdampak terhadap efisiensi anggaran.

Dengan penerapan sistem SAKIP di Kabupaten Badung maka berdampak pada efisiensi dan efektivitas anggaran. Efektivitas dan efisiensi dengan penerapan sistem SAKIP di Kabupaten Badung seperti grafik berikut :

Grafik 3.13

Perbandingan efisiensi Anggaran dan Program/Kegiatan dengan Penerapan SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2017-2020



Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2020



Hasil efisiensi anggaran pada tahun 2020 sebesar 1.633.375.252.323,32, tahun 2019 sebesar 1,6 triliun, tahun 2018 sebanyak Rp. 776.032.414.731,96,- sedangkan pada tahun 2017 sebanyak Rp. 133.232.647.500,-. Sedangkan efektivitas program dan kegiatan pada tahun 2017 sebanyak 420 program dan kegiatan sebanyak 2,930 menjadi 394 program dan 1.935 kegiatan pada tahun 2020 sehingga terjadi pengurangan program sebanyak 26 program dan kegiatan sebanyak 995 kegiatan. Hasil efisiensi anggaran dialokasikan untuk pemenuhan program dan kegiatan prioritas PPNB serta untuk peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) seperti Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

Analisis Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Barang Milik Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

1. **Opini WTP** diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
2. **Opini WDP** diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

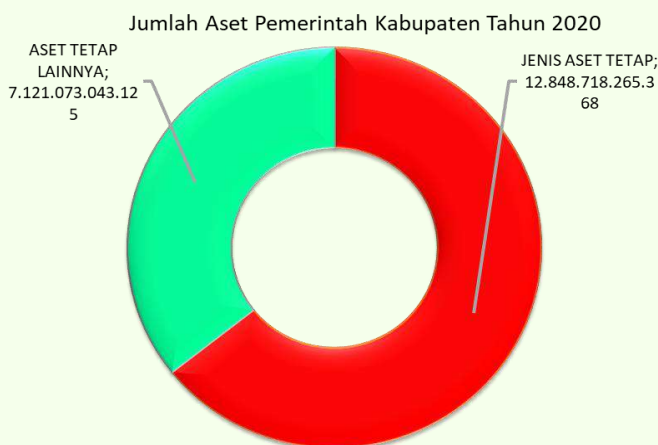


3. **Opini TMT** diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.
4. **Opini TW** diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, dilakukan berbagai upaya melalui penyajian laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang baik mulai dari perencanaan sampai penatausahaan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga dapat menyajikan data dan informasi nilai asset yang sebenarnya sesuai jenis-jenis asset, jumlah, keberadaan dan kondisinya.

Total asset Pemerintah Kabupaten Badung sampai Tahun 2020 Sebesar Rp.19.969.791.308.492,9,- terdiri dari asset tetap sebesar Rp. 12.848.718.265.368,3 dan asset tetap lainnya sebesar Rp. 7.121.073.043.124,62





Dengan komitmen dan upaya tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Badung telah enam kali berturut-turut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Kabupaten Badung pada tahun 2014 - 2019 telah berhasil mempertahankan opini WTP sesuai dengan target yang ditetapkan. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) berarti opini audit terhadap laporan keuangan yang diterbitkan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung oleh auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Sedangkan untuk tahun 2020 diharapkan mampu mempertahankan WTP sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun hasilnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 saat ini masih dalam proses audit sehingga capaian kinerja sasaran ini tahun 2020 masih menunggu pengumuman resmi dari BPK RI perwalikan Provinsi Bali.

Target dan capaian indikator kinerja opini BPK dari tahun 2017 sampai 2021 seperti grafik berikut:

Grafik 3.14

Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Keterangan : 1. Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion) 2. Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) 3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion) 4. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion).

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2020



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah didukung oleh 5 program dan 6 kegiatan. Program pendukung meliputi: program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program peningkatan dan pengembangan aset daerah dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.821.293.872,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.704.865.246,- dengan serapan anggaran sebesar 93,61%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini dengan indikator opini BPK terhadap laporan keuangan daerah antara lain : penerapan pengelolaan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP), prioritas transaksi keuangan secara non tunai, realisasi anggaran disesuaikan dengan anggaran kas, rekonsiliasi aset barang milik daerah, pembinaan aset serta monitoring dan evaluasi keuangan dan aset BMD.

Analisis Kinerja Sasaran 6 : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Dan Bebas KKN

Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan perwujudan pemerintahan yang bebas dari berbagai penyimpangan khususnya dalam penggunaan wewenang dan pengelolaan keuangan negara, bebas KKN dalam setiap pelaksanaan tugas khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik, Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan program reformasi birokrasi melalui percepatan 8 area perubahan RB dengan menetapkan sasaran terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN dengan indikator indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks reformasi birokrasi diperoleh dari hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (*Enablers*) dan Hasil (*Results*). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.



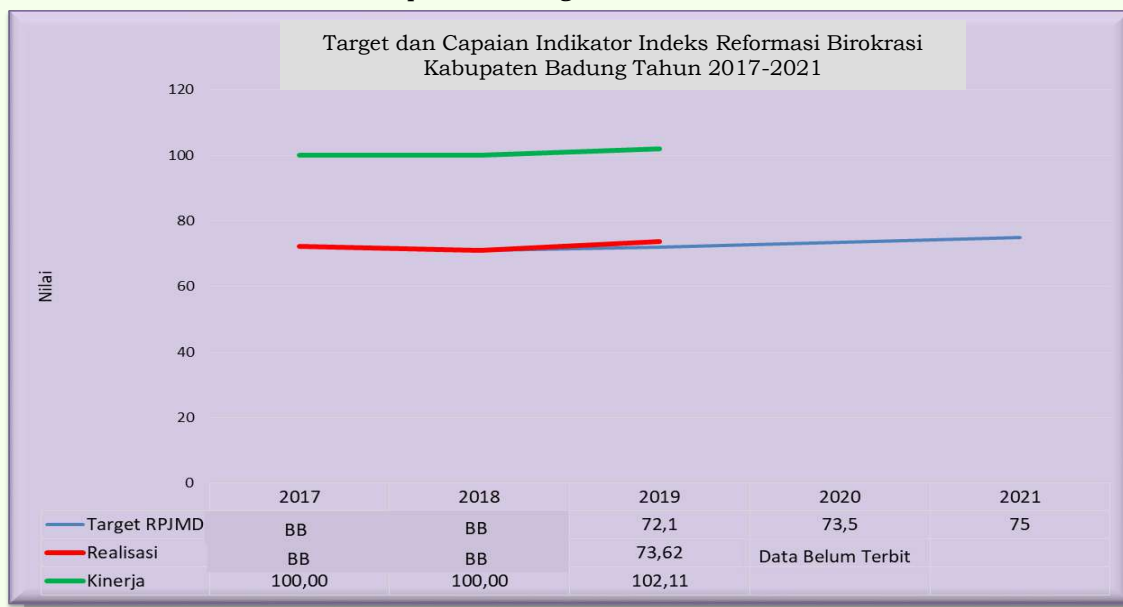
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi membuat kategori hasil evaluasi seperti berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	> 90 - 100	Istimewa
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Sasaran Terwujudnya Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN dengan indikator indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada tahun 2017 ditargetkan

B dengan nilai (65.50) dan hasilnya Badung berhasil meraih predikat BB dengan nilai 72,15. Selanjutnya tahun 2018, indeks PMPRB ditargetkan dengan kategori BB dan realisasi BB (70,92). Indeks RB tahun 2019 ditargetkan sebesar 72,1 dengan realisasi sebesar 73,62 sehingga kinerjanya sebesar 102,11% sedangkan untuk tahun 2020 target ditetapkan sebesar 73,5 dan hasilnya belum terbit/direlease dari Kementerian PAN-RB. Hasil capaian indikator indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung seperti tabel berikut:

Grafik 3.15
Target dan Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



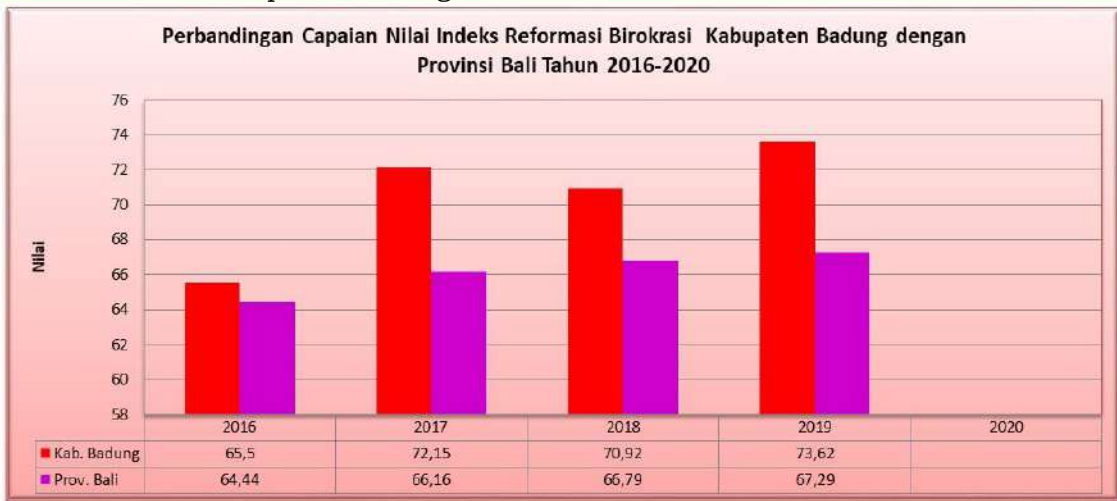
Sumber Data : Sekretariat Daerah Kab. Badung, 2019



Hasil capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 belum mencapai target jika dibandingkan dengan target Akhir RPJMD semesta berencana 2016-2021 dengan kategori BB (75), namun capaian indikator untuk tahun 2019 telah sesuai dengan target.

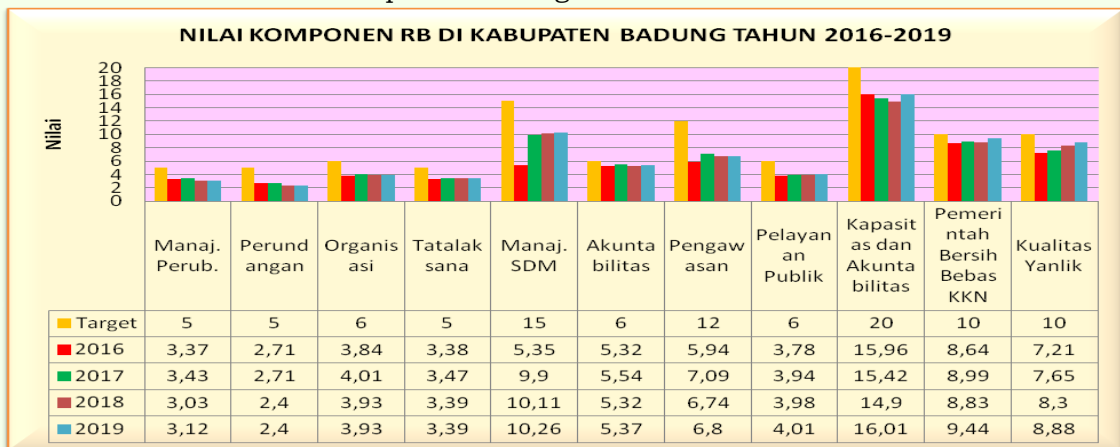
Hasil capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Bali untuk tahun 2019 sebesar 67,29.

Grafik 3.16
Perbandingan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020



Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan 2 komponen yaitu komponen pengungkit dan hasil. Hasil secara lengkap terhadap evaluasi reformasi birokrasi komponen pengungkit dan hasil Kabupaten Badung Tahun 2016-2019 seperti grafik berikut :

Grafik 3.17
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit dan Hasil
Kabupaten Badung Tahun 2016-2019





Hasil Penilaian komponen pengungkit pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN-RB tahun 2019 diperoleh informasi bahwa dari 8 (delapan) area perubahan terdapat 5 (lima) area perubahan yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu komponen manajemen perubahan, manajemen SDM, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, sedangkan tiga area perubahan lainnya nilainya sama (tetap) seperti tahun 2018.

Sedangkan hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dari komponen hasil diperoleh informasi, dari tiga unsur yang dinilai semua komponen nilainya meningkat dibandingkan dengan 2018. Dari hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tahun 2019 mengalami peningkatan baik untuk komponen pengungkit maupun komponen hasil.

Upaya untuk mewujudkan sasaran terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN didukung oleh 3 program dan 11 kegiatan. Program pendukung meliputi: program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.932.501.015,98,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.006.083.378,- dengan serapan anggaran sebesar 68,41%.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN antara lain: penguatan komitmen pimpinan, adanya tim pengarah dan pelaksana RB kabupaten, adanya Tim internal RB perangkat daerah, penguatan implementasi terhadap 8 area perubahan.

Faktor yang menjadi kendala antara lain: belum ada pemahaman yang sama tim

RB internal OPD terhadap pelaksanaan rencana kerja RB, minimnya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi.



Sekretaris Daerah Kabupaten Badung menerima penghargaan atas prestasi yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung atas Predikat WBK



Upaya yang dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan RB antara lain melalui perubahan *mindset* dan gerakan revolusi mental ASN, penancangan ZI, Penetapan WBK/WBBM, pelaksanaan seleksi terbuka JPT, seleksi CPNS melalui CAT, penguatan APIP, Penerapan SAKIP, penandatanganan fakta Integritas oleh seluruh ASN dan pembentukan MPP.

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan RB diantaranya melalui pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana RB, Penyusunan *Road Map* RB 2019 – 2021, penetapan zona integritas, Penyusunan Budaya Kerja, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang merupakan instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Analisis Kinerja Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Kategori nilai indeks pembangunan manusia di bagi menjadi 4 antara lain:

- a. Sangat tinggi : IPM >80
- b. Tinggi : $70 \leq \text{IPM} < 80$
- c. Sedang : $60 \leq \text{IPM} < 70$
- d. Rendah : IPM <60

Hasil capaian sasaran strategis RPJMD meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti grafik berikut:



Tabel 3.18
Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Hasil capaian indikator IPM Kabupaten Badung Tahun 2020 sebesar 81,60 dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 81,37 berarti capaian kinerja sebesar 100,28%. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung tahun 2020 termasuk kategori sangat tinggi.

Adapun distribusi tiga dimensi dasar indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sebagai berikut:

Tabel 3.19
Capaian Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Badung Tahun 2018-2020





Berdasarkan dimensi dasar indeks pembangunan manusia untuk tahun 2020 diperoleh informasi bahwa dari dimensi kesehatan diukur dengan angka umur harapan hidup masyarakat Badung sebesar 75,1 Tahun. Dari dimensi pendidikan diukur dengan harapan lama sekolah selama 13,98 tahun dan rata-rata lama sekolah selama 10,39 tahun. Sedangkan dari dimensi ekonomi yang diukur pengeluaran per kapita sebesar Rp. 17.503.000,-. Dari tiga dimensi menunjukkan bahwa dari dimensi ekonomi mengalami penurunan, hal ini dampak langsung dari pandemi COVID-19.

Capaian indikator IPM Kabupaten Badung tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 81,59. Capaian IPM tahun 2020 telah melampaui target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD semesta berencana sebesar 81,57 dan setiap tahun menunjukkan trend peningkatan capaian.

Hasil capaian IPM Kabupaten Badung bila dibandingkan dengan hasil capaian Kabupaten/Kota se Bali, menunjukkan bahwa capaian IPM Kabupaten Badung menduduki peringkat kedua setelah Kota Denpasar. Demikian pula hasil capaian IPM Kabupaten Badung lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Bali dan angka Nasional. Perbandingan capaian IPM Kabupaten Badung dengan Kab./Kota di Provinsi Bali dan Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2020

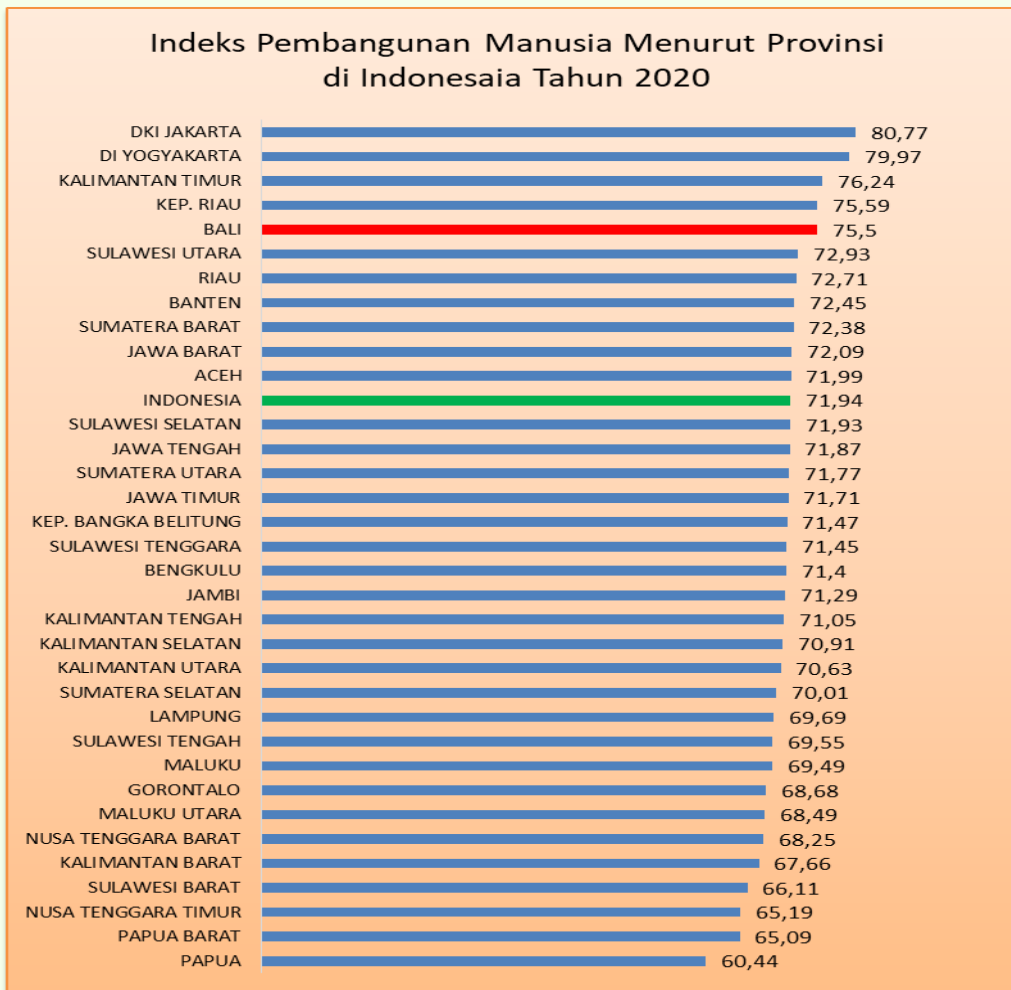
No.	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		
		2020	2019	2018
1	Kab. Badung	81,6	81,59	80,87
2	Kab. Bangli	69,36	69,35	68,96
3	Kab. Buleleng	72,55	72,3	71,7
4	Kab. Gianyar	77,36	77,14	76,61
5	Kab. Jembrana	72,36	72,35	71,65
6	Kab. Karangasem	67,35	67,34	66,49
7	Kab. Klungkung	71,73	71,71	70,9
8	Kab. Tabanan	76,17	76,16	75,45
9	Kota Denpasar	83,93	83,68	83,3
	Provinsi Bali	75,5	75,38	74,77
	INDONESIA	71,94	71,92	71,39

Sumber Data : BPS Pusat Tahun 2020

Gambaran capaian IPM menurut Provinsi di Indonesia diperoleh informasi bahwa IPM tertinggi Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,77 dan yang terendah Provinsi Papua sebesar 60,44. Distribusi IPM menurut provinsi di Indonesia seperti berikut:



Tabel 3.20
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2020



Sumber Data: BPS Pusat, 2020

Hasil capaian indikator IPM Kabupaten Badung jika dibandingkan dengan Negara asia tenggara berdasarkan data *CNBC Indonesia*, 16 Desember 2020 berada diatas Negara Malaysia dengan IPM 81,0 jika dibandingkan dengan Kabupaten Badung dengan capaian 81,60.

Distribusi IPM di antara Negara ASEAN menunjukkan bahwa IPM tertinggi Negara Singapura sebesar 93,8 berada pada urutan 11 di dunia, sedangkan Indonesia dengan IPM sebesar 71,8 berada pada urutan 107 di dunia dengan capaian IPM sama dengan Negara Filipina.



Tabel 3.6
Indeks Pembangunan Manusia Negara-Negara ASEAN
Tahun 2020

No.	Negara	Ranking	IPM	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	GNI/Kapita (US\$)
1	Singapura	11	0.938	83.6	16.4	11.6	88.16K
2	Brunei Darussalam	47	0.838	75.9	14.3	9.1	63.97K
3	Malaysia	62	0.810	76.2	13.7	10.4	27.53K
4	Thailand	79	0.777	77.2	15.0	7.9	17.78K
5	Filipina	107	0.718	71.2	13.1	9.4	9.78K
6	Indonesia	107	0.718	71.7	13.6	8.2	11.46K
7	Vietnam	117	0.704	75.4	12.7	8.3	7.43K
8	Laos	137	0.613	67.9	11.0	5.3	7.41K
9	Kamboja	144	0.594	69.8	11.5	5.0	4.25K
10	Myanmar	147	0.583	67.1	10.7	5.0	4.96K

Catatan : IPM (Indeks Pembangunan Manusia), UHH (Usia Harapan Hidup), HLS (Harapan Lama Sekolah), RLS (Rata-rata Lama Sekolah), GNI (Gross National Income)

Sumber Data : CNBC Indonesia, 16 Desember 2020

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pencapaian indikator IPM tidak terlepas dari upaya yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan program untuk meningkatkan ketiga aspek indeks pembangunan manusia.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia didukung oleh 13 program dan 42 kegiatan. Program pendukung meliputi:

1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
2. Pengembangan Lingkungan Sehat
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
4. Program Pencegahan dan Penularan Penyakit Menular
5. Program perbaikan gizi
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
7. Program Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
8. Program Pengelolaan BLUD RSUD
9. Program Pendidikan Non Formal
10. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
11. Program Keluarga Berencana
12. Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga



13. Program Pengendalian Penduduk

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebesar Rp. 370.447.804.475,91,- dengan realisasi sebesar Rp. 333.535.502.976,55,- dengan serapan anggaran sebesar 90,04%.

Faktor pendorong meningkatnya indeks pembangunan manusia antara lain: peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat (*total coverage*) yang ditanggung pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS kesehatan, pelayanan kesehatan tambahan untuk penyakit yang diluar tanggungan BPJS, pembangunan gedung rumah sakit dan puskesmas rawat inap, peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan ruang kelas belajar, pendidikan formal dan non formal paket A,B dan C serta peningkatan kesempatan kerja pada sektor pertanian dan pariwisata.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dari aspek kesehatan melalui: peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pendirian puskesmas dan rumah sakit, peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak. Untuk peningkatan pendidikan ditengah pandemi COVID-19 maka proses belajar mengajar dilakukan secara daring (siswa belajar dirumah) dengan pemberian paket internet kepada siswa, peningkatan pembangunan ruang belajar siswa untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan luar sekolah, Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan penunjang pariwisata, infrastruktur, pertanian hortikultura, perikanan yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga berdampak terhadap penghasilan atau daya beli masyarakat.

Analisis Kinerja Sasaran 8 : Meningkatnya Tingkat Kebahagiaan Masyarakat

Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi yaitu : kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*Affect*) dan makna hidup (*Eudaimonia*) dengan skala 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya semakin rendah nilai indeks, maka penduduk semakin tidak bahagia. Beberapa variabel utama, dalam menentukan Indeks Kebahagiaan antara lain : Kepuasan terhadap kondisi kesehatan, Kepuasan terhadap pendidikan dan keterampilan, Kepuasan terhadap pekerjaan, Kepuasan terhadap pendapatan rumah



tangga, Kepuasan terhadap kondisi keamanan, Kepuasan terhadap hubungan sosial, Kepuasan terhadap ketersediaan waktu luang, Kepuasan terhadap kondisi rumah, Kebahagiaan hidup, Harapan/keinginan yang sudah tercapai, Kepuasan hidup, Kepuasan terhadap kondisi lingkungan, Kepuasan terhadap keharmonisan keluarga.

Pengukuran sasaran meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat diukur dengan indikator indeks kebahagiaan untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan oleh karena adanya refocusing anggaran untuk pengendalian COVID 19, pelaksanaan survey tidak bisa dilakukan ditengah pandemi COVID19 dengan penerapan protokol kesehatan serta adanya penurunan pendapatan daerah yang signifikan/bermakna terutama penerimaan pajak hotel dan restoran (PHR) dari sektor pariwisata dampak pandemi COVID 19. Oleh karena itu indikator indeks kebahagiaan tahun 2020 tidak ada dan kinerjanya tidak bisa diukur.

Oleh karena survey terhadap indikator indeks kebahagiaan tahun 2020 tidak dilaksanakan maka nilai indeks kebahagiaan dan capaian kinerja tidak dapat diukur. Sehubungan hal tersebut maka dalam laporan kinerja ini hanya ditampilkan hasil capaian indikator indeks kebahagiaan pada tahun 2019 sebesar 76,14 dari target RPJMD yang ditetapkan sebesar 72,5 berarti capaian kinerjanya sebesar 105,02%. Secara lengkap target dan capaian indikator indeks kebahagiaan Kabupaten Badung seperti grafik berikut:

Grafik 3.21
Target dan Capaian Indikator Indeks Kebahagiaan
Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Badung, 2019



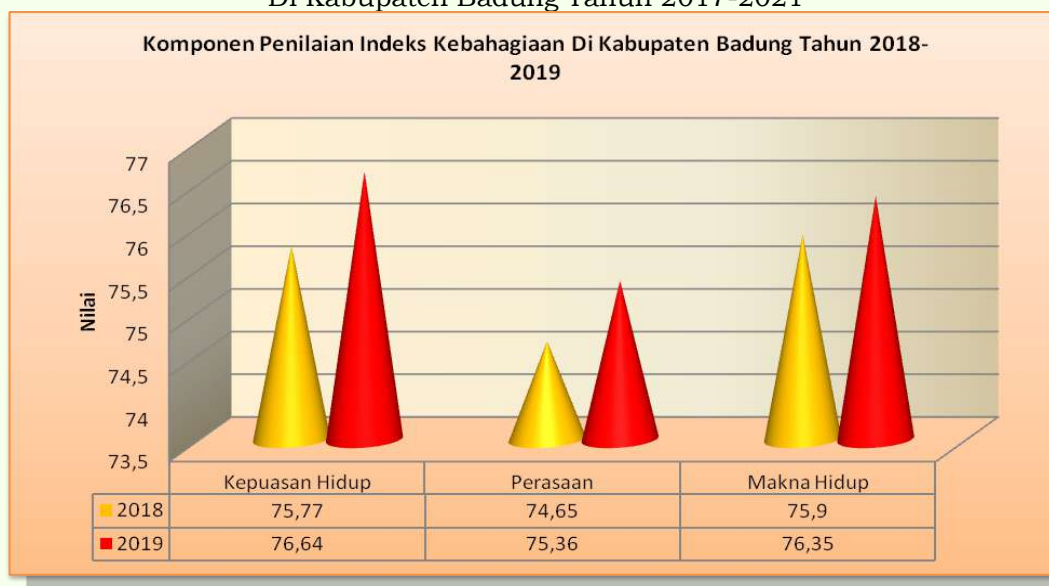
Hasil capaian indikator indeks kebahagiaan tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 75,47. Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2019 mencapai angka 76,14, meningkat 0,67 poin dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 75,47. Demikian juga capaian indikator tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir RPJMD semesta berencana tahun 2016-2021 dengan target 74,50. Sedangkan capaian indeks kebahagiaan Kabupaten Badung lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian indikator kebahagiaan Provinsi Bali sebesar 72,48 (data indeks kebahagiaan tahun 2017).

Pencapaian Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali yang berada pada nilai indeks 72,48 pada tahun 2017. Bahkan dari 3 (tiga) dimensi untuk mengukur Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung menunjukkan skala yang lebih tinggi dibandingkan capaian di tingkat Provinsi Bali. Sedangkan indeks kebahagiaan Kabupaten Badung lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Kebahagiaan penduduk Indonesia tahun 2017 sebesar 69,51 pada skala 0 sampai 100.

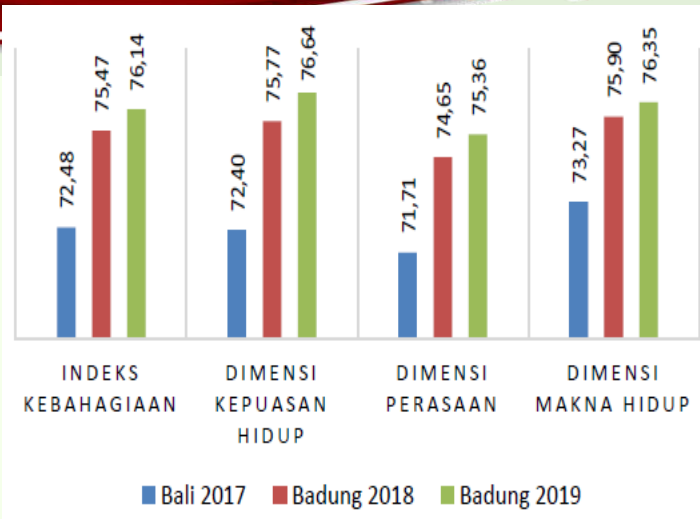
Jika dilihat menurut dimensi/komponen indeks kebahagiaan, masyarakat Kabupaten Badung memiliki skala indeks yang paling tinggi sebesar 76,64 pada dimensi kepuasan hidup, meningkat 0,87 poin dari tahun 2018 yaitu sebesar 75,77. Selanjutnya dimensi makna hidup mencapai indeks sebesar 76,36, lebih tinggi 0,46 poin dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 75,90. Terakhir dari dimensi perasaan sebesar 75,36, juga meningkat dari tahun 2018 yaitu sebesar 74,64.

Grafik 3.22

Perbandingan Hasil penilaian Indikator Indeks Kebahagiaan menurut komponen Di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Badung, 2019



Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2019 diperoleh hasil indeks dalam dimensi kepuasan hidup. Dimensi kepuasan hidup atau yang disebut dimensi *life satisfaction* merupakan dimensi yang menggambarkan bahwa kepuasan hidup akan timbul dan dialami apabila kebutuhan dan keinginan seseorang pada waktu tertentu dapat terpenuhi dan terpuaskan.

Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2019 berdasarkan hasil indeks dalam dimensi kepuasan hidup berkisar antara 70,19 sampai 82,41.



Dimensi perasaan (*affect*) pada Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) Kabupaten Badung Tahun 2019 bertujuan untuk memperoleh tingkat kebahagiaan hidup responden yang didekati dengan ukuran perasaan (*afeksi*) yang dirasakan responden dalam hidupnya. *Afeksi* merupakan kondisi perasaan yang bersifat relatif stabil, bukan emosi sesaat, dan tidak mudah berubah dalam waktu singkat akibat keadaan dan *mood*.

Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2019 menggambarkan bahwa dimensi perasaan senang dan riang atau gembira mencapai indeks sebesar 78,96, diikuti perasaan tidak tertekan 75,16, dan perasaan tidak khawatir atau cemas 73,05.



Dimensi makna hidup bertujuan untuk memperoleh penilaian terkait dengan makna hidup (*Eudaimonia*) yang alami masyarakat. Dimensi makna hidup (*eudaimonia*) Kabupaten Badung Tahun 2019 ini terdiri atas 6 (enam) indikator, yaitu (1) kemandirian (*autonomy*); (2) penguasaan lingkungan (*environmental mastery*), (3) pengembangan diri (*personal growth*); (4) hubungan positif dengan orang lain (*positive relation with others*), (5) tujuan hidup (*purpose in life*) dan (6) penerimaan diri (*self acceptance*).

Indeks Dimensi Perasaan Kabupaten Badung Tahun 2019



Sumber: Hasil SPTK Kabupaten Badung Tahun 2019



Sumber: Hasil SPTK Kabupaten Badung Tahun 2019

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat didukung oleh 7 program dan 11 kegiatan. Program pendukung meliputi: Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Upaya Kesehatan Masyarakat, Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan, Pengawasan Obat dan makanan, Standarisasi Pelayanan kesehatan, Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya, Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Pengadaan Bahan Penunjang medis. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 144.168.766.753,22,- dengan realiasi sebesar Rp. 128.660.767.640,- dengan serapan anggaran sebesar 89,24%.

Faktor pendorong meningkatnya indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Badung antara lain: program pelayanan kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah dengan total coverage, pendidikan gratis bagi usia sekolah dasar dan



menengah, pemberian laptop untuk siswa, pemberian pakaian sekolah bagi siswa, pembangunan sekolah menengah (SMP) beserta penambahan ruang kelas, jaminan sosial (santunan lansia) untuk penduduk lanjut usia diatas 72 tahun keatas, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan, program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan untuk perbaikan rumah, pemberian bantuan usaha ekonomi kreatif, bantuan usaha pertanian dan peternakan, bantuan sosial kemasyarakatan untuk keagamaan serta program lainnya sehingga tidak membebani masyarakat.

Upaya-upaya akan terus dilakukan untuk lebih meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat dengan terus melaksanakan program-program yang telah ada antara lain: peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan akses terhadap pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang dan papan), rasa aman, peningkatan jaminan sosial, serta perbaikan lingkungan pemukiman.

Analisis Kinerja Sasaran 9 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Faktor kemiskinan bukan saja akibat masalah fisik atau rumah semata-mata, namun dipengaruhi faktor kemudahan akses dan mentalitas.

Pemerintah Kabupaten Badung sangat serius dalam pengetasan kemiskinan sebagai upaya untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen maka sasaran strategis RPJMD salah satunya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin dengan formula jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk kali 100.

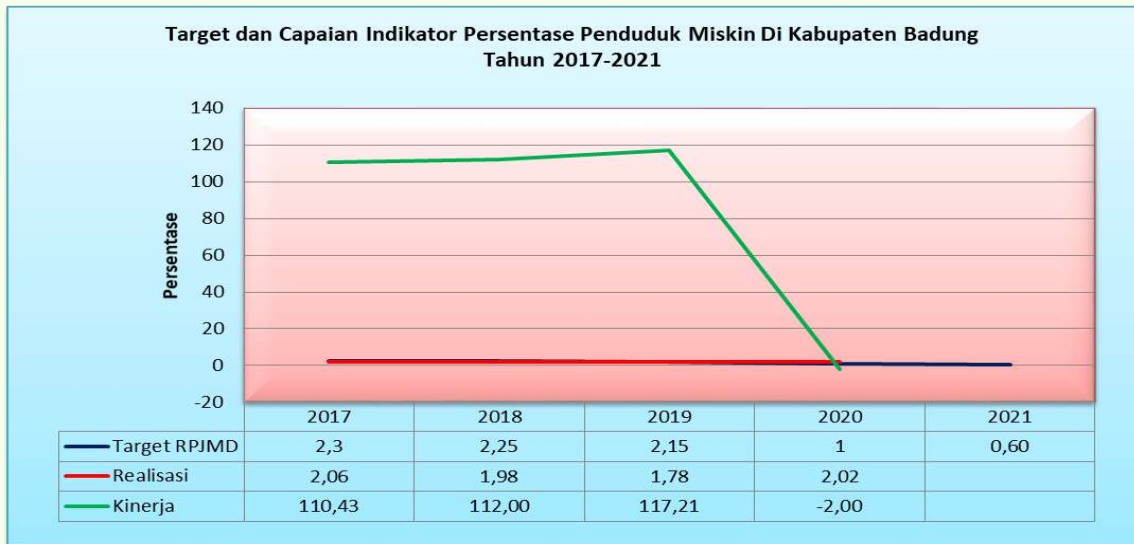
Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 2,02% dari target sebesar 1,0%-0,60% berarti capaian kinerjanya sebesar -2,0% berarti belum mencapai target yang ditetapkan. Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 1,78% dari target kisaran 2,15-1,50%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian telah mencapai target sebesar 0,60-0,40%.

Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin tahun 2020 menunjukkan peningkatan persentase penduduk miskin dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1,78% dari target sebesar 2,15%-2,10%. Secara lengkap target dan



realisasi indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.23
Target dan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020

Data jumlah penduduk tergolong miskin di Kabupaten Badung pada tahun 2019 sebanyak 11.890 orang menjadi sebanyak 13.750 orang pada tahun 2020. Peningkatan penduduk miskin di Kabupaten Badung pada tahun 2020 sebanyak 1.860 orang diakibatkan dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap sektor pariwisata Kabupaten Badung. Adapun rincian perkembangan jumlah penduduk miskin periode 2015-2020 seperti grafik berikut :

Grafik 3.24
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2015-2020



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020

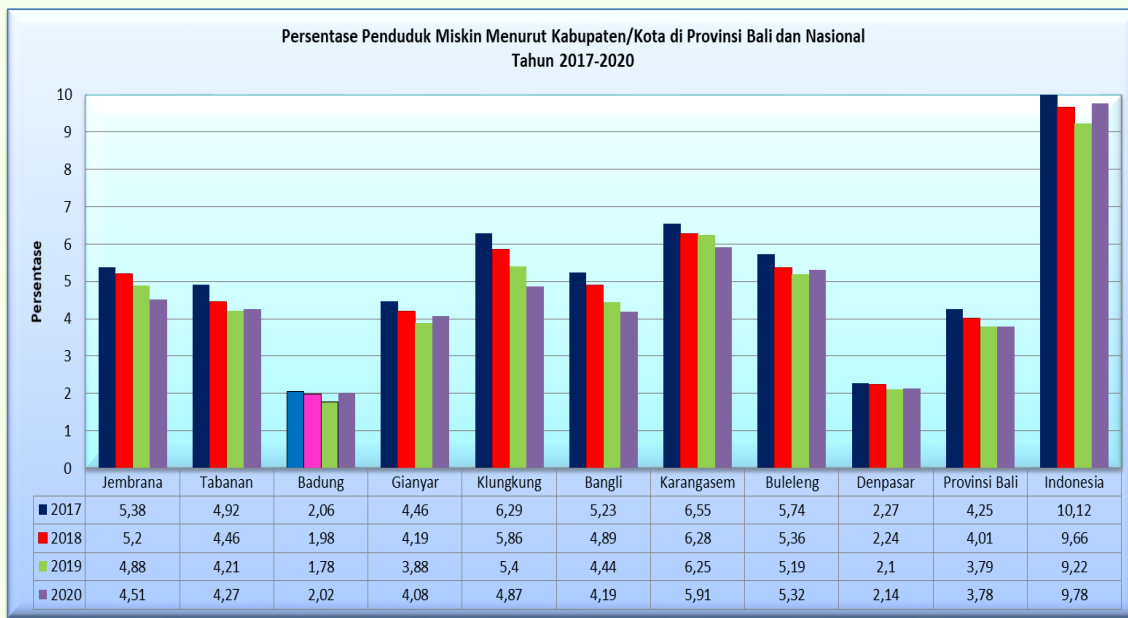


Tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung termasuk *hardrock poverty*, dimana kondisi kemiskinan sudah sangat rendah, sehingga memerlukan komitmen dan kerja keras karena sudah sangat sulit untuk diturunkan bagaikan memecah batu karang yang sangat keras. Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Bali, dalam 10 tahun terakhir tingkat trend kemiskinan di Badung selalu berada dibawah kemiskinan Provinsi Bali.

Distribusi Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali periode tahun 2017-2020 menunjukkan persentase penduduk miskin yang paling rendah Kabupaten Kabupaten Badung, sedangkan yang paling tinggi yaitu Kabupaten Karangasem sebesar 6,25%. Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Bali tahun 2017-2020 menunjukkan kabupaten dengan persentase kemiskinan terus mengalami penurunan seperti Kabupaten Jembrana, Klungkung, Bangli dan Karangasem. Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung tahun 2020 dibawah angka Nasional sebesar 9,78%. Secara Lengkap distribusi persentase penduduk miskin menurut Kabupaten Kota di Provinsi Bali dan Nasional seperti grafik berikut:

Grafik 3.25

Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2017-2020



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020

Distribusi Persentase penduduk miskin menurut provinsi di Indonesia tahun 2020 menunjukkan persentase penduduk miskin yang paling rendah Provinsi Bali sebesar 3,78%, sedangkan yang paling tinggi di Provinsi Papua sebesar 26,64%. Distribusi persentase penduduk miskin menurut Provinsi Bali di Indonesia seperti tabel berikut:



Tabel 3.7

Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2020

No	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (Tahun)			
		2020	2019	2018	2017
1	Aceh	14,99	15,01	15,68	15,92
2	Sumatera Utara	8,75	8,63	8,94	9,28
3	Sumatera Barat	6,28	6,29	6,55	6,75
4	Riau	6,82	6,90	7,21	7,41
5	Jambi	7,58	7,51	7,85	7,90
6	Sumatera Selatan	12,66	12,56	12,82	13,10
7	Bengkulu	15,03	14,91	15,41	15,59
8	Lampung	12,34	12,30	13,01	13,04
9	Kep. Bangka Belitung	4,53	4,50	4,77	5,30
10	Kep. Riau	5,92	5,80	5,83	6,13
11	DKI Jakarta	4,53	3,42	3,55	3,78
12	Jawa Barat	7,88	6,82	7,25	7,83
13	Jawa Tengah	11,41	10,58	11,19	12,23
14	DI Yogyakarta	12,28	11,44	11,81	12,36
15	Jawa Timur	11,09	10,20	10,85	11,20
16	Banten	5,92	4,94	5,25	5,59
17	Bali	3,78	3,61	3,91	4,14
18	Nusa Tenggara Barat	13,97	13,88	14,63	15,05
19	Nusa Tenggara Timur	20,90	20,62	21,03	21,38
20	Kalimantan Barat	7,17	7,28	7,37	7,86
21	Kalimantan Tengah	4,82	4,81	5,10	5,26
22	Kalimantan Selatan	4,38	4,47	4,65	4,70
23	Kalimantan Timur	6,10	5,91	6,06	6,08
24	Kalimantan Utara	6,80	6,49	6,86	6,96
25	Sulawesi Utara	7,62	7,51	7,59	7,90
26	Sulawesi Tengah	12,92	13,18	13,69	14,22
27	Sulawesi Selatan	8,72	8,56	8,87	9,48
28	Sulawesi Tenggara	11,00	11,04	11,32	11,97
29	Gorontalo	15,22	15,31	15,83	17,14
30	Sulawesi Barat	10,87	10,95	11,22	11,18
31	Maluku	17,44	17,65	17,85	18,29
32	Maluku Utara	6,78	6,91	6,62	6,44
33	Papua Barat	21,37	21,51	22,66	23,12
34	Papua	26,64	26,55	27,43	27,76
	Indonesia	9,78	9,22	9,66	10,12

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021



Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan program-program strategis dalam penanganan kemiskinan. Program tersebut dapat memberikan nilai yang strategis dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas penetapan sasaran untuk program perlindungan sosial. Penanganan kemiskinan ini telah tercantum dalam program *Asta Marga Utama Desa* yang utamanya untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

Upaya untuk mewujudkan sasaran menurunnya angka kemiskinan didukung oleh 6 program dan 21 kegiatan. Program pendukung meliputi: Peningkatan penelitian dan pengembangan, dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 29.912.848.174,13,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.105.726.460,- dengan serapan anggaran sebesar 90,62%.

Dengan kondisi pandemi COVID19 berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Badung. Dalam kondisi demikian Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen dalam percepatan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program seperti program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan, program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, serta upaya mencegah bertambahnya kemiskinan melalui program pemberian santunan penunggu pasien, dan pemberian perlindungan sosial bagi lansia (santunan lansia).

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Badung melalui : pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga sasaran melalui pelatihan keterampilan, pemberian bantuan untuk kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

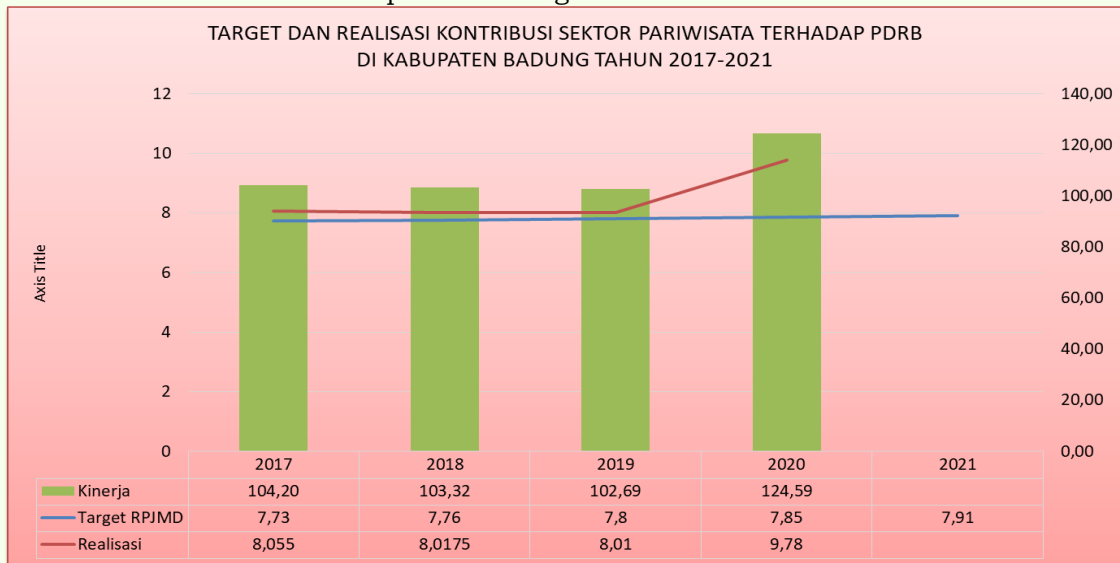


Analisis Kinerja Sasaran 10 : Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB

Sasaran meningkatnya kontribusi sektor UMKM Terhadap PDRB dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB yang dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Penetapan target kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB berdasarkan 3 lapangan usaha yaitu industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Khusus untuk sektor UMKM dipakai 75% dari kontribusi 3 lapangan usaha tersebut.

Grafik 3.26

Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB dengan indikator persentase kontribusi sektor UMKM Terhadap PDRB diperoleh hasil untuk tahun 2020 sebesar 9,78% dari target yang ditetapkan sebesar 7,85% sehingga kinerjanya sebesar 124,59%. Hasil capaian tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan capaian 8,01% dengan kinerja sebesar 102,69%. Demikian juga capaian tahun 2020 telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 7,91%.

Upaya pencapaian target 2020 didukung oleh bertambahnya industri pengolahan/manufacturing serta meningkatnya komponen perdagangan yang dilakukan oleh UMKM melalui program pemberdayaan dan pengembangan UMKM



serta adanya program inovasi berupa Klinik UMKM serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan tera ulang sekaligus memberikan perlindungan/keamanan kepada konsumen. Dengan demikian, sektor UMKM diharapkan semakin meningkat serta mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Terjadinya peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB didukung oleh berkembangnya industri pengolahan yang berasal dari kayu dan rotan yang sangat diminati oleh wisatawan dan kebutuhan lokal serta lapangan usaha perdagangan mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya namun masih memberikan sumbangan terhadap kontribusi PDRB Badung.

Tabel 3.8
Distribusi PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	6,57	6,35	6,00	5,82	7,45
B	Pertambangan dan Penggalian	0,29	0,29	0,28	0,27	0,34
C	Industri Pengolahan	3,99	3,74	3,67	3,63	4,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,20	0,20	0,19	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,23	0,22	0,21	0,27
F	Konstruksi	8,24	8,36	8,72	8,79	11,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,31	6,32	6,35	6,38	7,78
H	Transportasi dan Pergudangan	25,43	25,48	25,65	25,99	17,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28,50	28,93	28,84	28,67	24,61
J	Informasi dan Komunikasi	5,59	5,49	5,50	5,60	7,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,49	2,41	2,46	3,05
L	Real Estate	3,16	3,18	3,17	3,14	4,07
M,N	Jasa Perusahaan	0,69	0,68	0,67	0,67	0,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,14	3,25	3,28	3,13	4,05
P	Jasa Pendidikan	3,06	2,99	3,00	2,99	3,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,28	1,28	1,28	1,75
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,72	0,74	0,76	0,78	0,95
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2016-2020



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB didukung oleh 11 program dan 23 kegiatan. Program pendukung meliputi: Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, Pengembangan dan Peningkatan ekspor, Peningkatan Tertib Ukur, Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha kecil dan menengah yang kondusif, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Data/informasi, Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan, Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri, Perencanaan Pembangunan ekonomi dan Penyiapan Potensi Sumber Daya, sarana dan prasarana daerah. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.026.351.759,- dengan realiasi sebesar Rp. 1.701.381.408,- dengan serapan anggaran sebesar 83,96%.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB antara lain peningkatan manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM, pendidikan dan pelatihan wirausaha, peningkatan kemudahan akses modal, promosi/pameran kerajinan, Pelayanan klinik UMKM, revitalisasi pasar rakyat serta kegiatan yang meningkatkan pemasaran hasil produksi UMKM.

Analisis Kinerja Sasaran II : Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda Dan Perkada

Sesuai visi RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 Kabupaten Badung berkomitmen untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat, artinya pemerintah menjamin masyarakat untuk merasa aman dan nyaman terhadap terjadinya berbagai pelanggaran terhadap Perda dan Perkada khususnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kebersihan lingkungan. Komitmen tersebut tertuang dalam sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya pencegahan pelanggaran peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) dengan indikator persentase pencegahan perda dan perkada. Formula dari indikator persentase pencegahan perda dan perkada adalah Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat dicegah dibagi seluruh indikasi pelanggaran Perda dan Perkada kali 100.

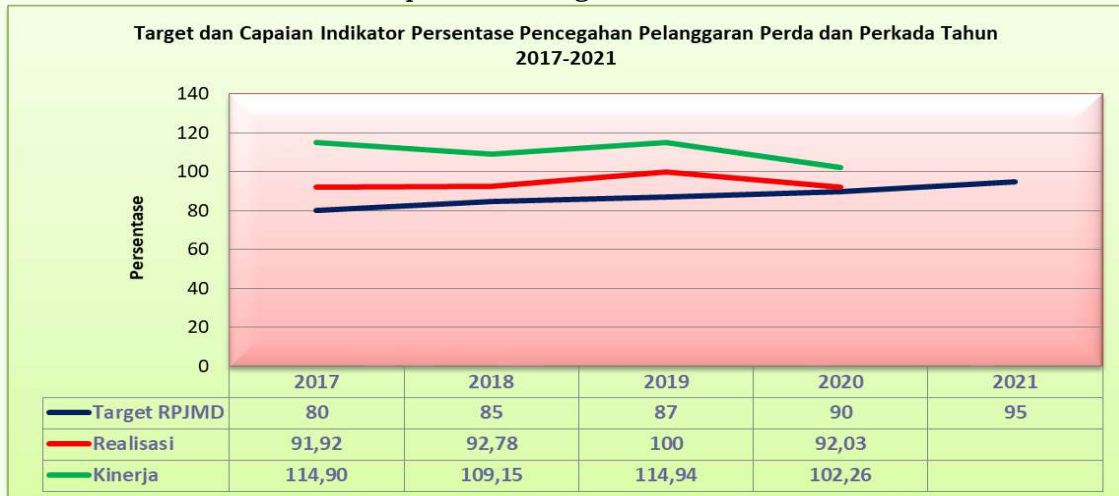
Hasil capaian indikator persentase pencegahan perda dan perkada tahun 2020 sebesar 92,03% dari target sebesar 90% berarti capaian kinerjanya sebesar 102,26%. Hasil capaian indikator persentase pencegahan perda dan perkada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 100%. Sedangkan hasil capaian indikator persentase pencegahan perda dan perkada tahun 2020 masih dibawah target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 95%. maka capaian telah mencapai



target sebesar 100%. Gambaran target dan capaian indikator persentase pencegahan perda dan perkada seperti tabel berikut :

Grafik 3.27

Target dan Capaian Indikator Persentase Pencegahan Perda dan Perkada di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2020

Berdasarkan data yang ada selama tahun 2020 terdapat indikasi pelanggaran perda/perkada sebanyak 2.107 potensi pelanggaran, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 2.198 berarti terdapat penurunan potensi pelanggaran perda dan perkada di Kabupaten Badung. Dari 2.017 kasus potensi pelanggaran yang ada maka yang dapat dicegah sebanyak 1.939 atau sebesar 92,03%. Berbagai upaya pencegahan dilakukan terhadap indikasi pelanggaran melalui tindakan preventif serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Secara lengkap jenis potensi pelanggaran yang dapat dicegah seperti tabel berikut:

Tabel 3.9

Jenis Potensi Pelanggaran yang dapat di Cegah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2020

Kecamatan	Jenis Potensi Pelanggaran								Jum lah	Potensi Pelanggaran Di Cegah								Jum lah	Realis asi
	1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7	8		
PETANG	5	0	1	0	0	1	20	112	139	5	0	1	0	0	0	15	105	126	90,65
ABIANSEMAL	27	1	19	8	7	5	118	244	429	27	1	15	5	5	1	110	238	402	93,71
MENGWI	91	5	26	0	0	1	41	188	352	91	3	17	0	0	0	35	135	281	79,83
KUTA UTARA	194	7	16	0	5	1	30	320	573	194	4	12	0	3	0	24	311	548	95,64
KUTA	36	0	14	3	2	0	60	203	318	36	0	12	3	2	0	53	198	304	95,60
KUTA SELATAN	26	0	8	7	0	2	33	220	296	26	0	6	4	0	2	28	212	278	93,92
KABUPATEN	379	13	84	18	14	10	302	1287	2107	379	8	63	12	10	3	265	1199	1939	92,03

Keterangan : 1. IMB + Usaha tanpa ijin 2. Jalur Hijau 3. Reklame 4. Gepeng dan orang terlantar 5. Usaha Pariwisata 6. Pencemaran Lingkungan 7. Pelanggaran Trotoar 8. Pelanggaran Proses



Distribusi jenis potensi pelanggaran yang paling banyak berupa potensi pelanggaran protokol kesehatan. Sedangkan berdasarkan kecamatan maka pelanggaran yang paling banyak di Kecamatan Kuta Utara dengan potensi pelanggaran sebanyak 573 kasus.



Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Badung menggelar Penerapan Protokol Kesehatan (Memakai Masker).

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada didukung oleh 6 program dan 9 kegiatan. Program pendukung meliputi: program pendidikan politik masyarakat, program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pemberantasan penyakit masyarakat, program penguatan ideologi dan pengembangan wasbang dan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.077.013.829,2,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.878.002.850,- dengan serapan anggaran sebesar 93,53%.

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator persentase pencegahan perda dan perkada tahun 2020 yaitu :

1. Belum optimal ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada
2. Ketidak patuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan pada saat pandemi COVID 19.
3. Belum dipahami dengan jelas tentang penetapan jalur hijau serta informasi tentang jalur hijau.

Upaya – upaya yang dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini melalui: sosialisasi tentang peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, patroli



keliling secara rutin, meningkatkan kemitraan dengan satuan keamanan lainnya serta koordinasi dengan lintas sektor seperti dinas perijinan, dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup serta perangkat daerah lainnya.

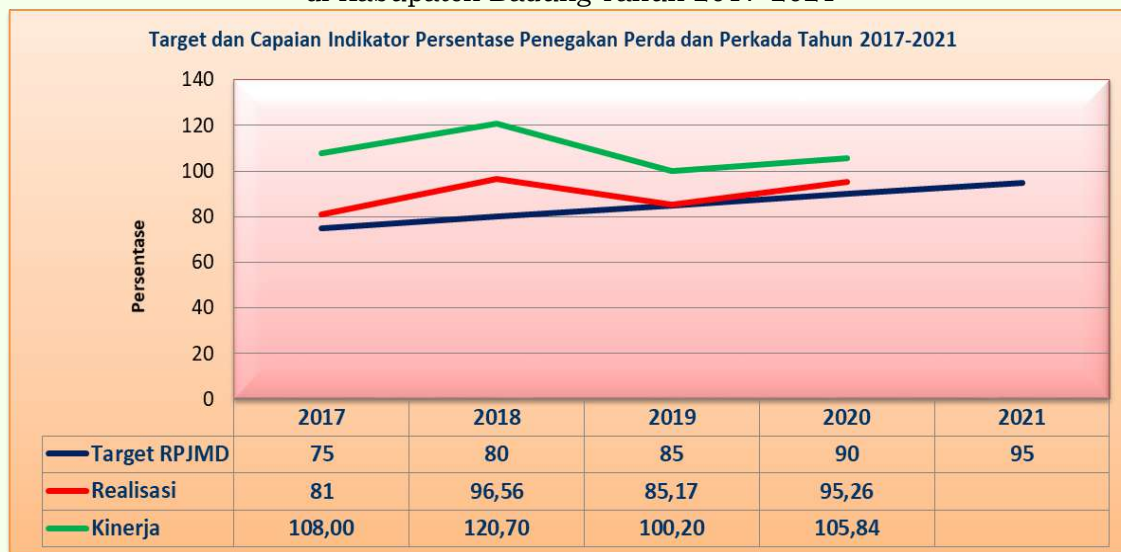
Analisis Kinerja Sasaran 12 : Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dimaksudkan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari pencapaian visi sesuai tertuang dalam RPJMD dengan sasaran strategis meningkatnya penegakan perda dan perkada dan indikatornya persentase penegakan perda dan perkada. Adapun formula dari indikator persentase penegakan perda dan perkada adalah Jumlah pengaduan pelanggaran perda dan perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran perda dan perkada kali 100.

Hasil capaian indikator persentase penegakan Perda dan Perkada tahun 2020 sebesar 95,26% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, berarti capaian kinerjanya sebesar 105,84%. Hasil capaian indikator persentase penegakan perda dan perkada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 85,17% dari target sebesar 85%. Hasil capaian indikator persentase penegakan Perda dan Perkada tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan pada akhir RPJMD. Gambaran target dan capaian persentase penegakan Perda dan Perkada sebagai berikut:

Grafik 3.28

Target dan Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2020



Berdasarkan hasil pendataan penegakan perda dan perkada tahun 2020 sebanyak 359 jenis pelanggaran, dan yang tertangani sebanyak 342 jenis pelanggaran atau sebesar 95,26%. Distribusi jenis pelanggaran perda dan perkada menurut kecamatan yang paling banyak terjadi di Kecamatan Kuta sebanyak 132 pelanggaran dan tertangani sebanyak 129 pelanggaran atau sebesar 97,7%.

Penegakan Perda dilakukan melalui program pemeliharaan ketertiban umum dan pencegahan tindak kriminal berupa kegiatan operasi Tibum dan Tranmas, Tipiring dan Pengamanan Event-event penting, penanganan pelanggaran yang melalui pemanggilan sampai dengan pembongkaran serta pemberkasian sesuai prosedur yang berlaku. Secara lengkap jenis pelanggaran perda dan perkada serta jumlah yang ditangani seperti tabel berikut:

Tabel 3.10

Jenis Pelanggaran yang Ditangani Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Badung Tahun 2020

No	KECAMATAN	JENIS PELANGGARA							JML	DITANGANI							JML	%
		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		
1	Petang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2	Abiansemal	0	13	2	0	17	0	17	49	0	13	2	0	17	0	15	47	95,9
3	Mengwi	0	0	15	0	0	0	17	32	0	0	15	0	0	0	13	28	87,5
4	Kuta Utara	1	15	24	0	18	18	35	111	1	15	24	0	18	18	30	106	95,5
5	Kuta	1	0	49	0	42	15	25	132	1	0	49	0	42	15	22	129	97,7
6	Kuta Selatan	0	0	7	0	0	10	18	35	0	0	7	0	0	10	15	32	91,4
	Kabupaten	2	28	97	0	77	43	112	359	2	28	97	0	77	43	95	342	95,26

Keterangan : 1. Pembongkaran Reklame 2. Tipiring 3. Pengaduan Masyarakat 4. Penyegehan Usaha 5. Operasi 6. Sipamanpadu 7. Surat Pernyataan

Perbandingan jumlah pelanggaran perda dan perkada yang ditangani pada tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran perda/perkada dan jumlah yang ditangani pada tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan tahun 2019.

Tabel 3.11

Jumlah Pelanggaran dan Pelanggaran yang Ditangani
di Kabupaten Badung Tahun 2019-2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PELANGGARAN		JUMLAH DITANGANI	
		2019	2020	2019	2020
1	Petang	19	0	19	0
2	Abiansemal	70	49	67	47
3	Mengwi	134	32	128	28
4	Kuta Utara	153	111	130	106
5	Kuta	102	132	76	129
6	Kuta Selatan	176	35	137	32
	Kabupaten	654	359	557	342



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya penegakan perda dan perkara didukung oleh 3 program dan 6 kegiatan. Program pendukung meliputi: program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program penguatan ideologi dan pengembangan wasbang, program pemeliharaan tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal serta program peningkatan disiplin aparatur dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.351.520.927,37,- dengan realiasi sebesar Rp. 3.157.405.100,- dengan serapan anggaran sebesar 94,21%.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran yaitu : rata - rata usia personil PNS diatas umur 50 tahun sehingga gerak dan tindakan sudah melambat, Berkurangnya PPNS karena mutasi pada saat ini masih ada 4 orang PPNS, Belum semua personil memiliki sertifikat Diklatsar Polisi Pamong Paja dan kurangnya pemahaman terhadap perkembangan peraturan perundang - undangan. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian sasaran antara lain : Satpol PP Kabupaten Badung tipe A, Jumlah personil yang cukup banyak yaitu, 195 PNS, 2 THL, 115 tenaga kontrak, sarana dan prasarana kerja cukup bagus dan lengkap, loyalitas personil yang baik dengan adanya jaminan keselamatan kerja oleh Pemerintah Kabupaten Badung, dan Sejak awal tahun 2017 bergabungnya Linmas pada masing - masing desa atau kelurahan dalam wadah Sat Pol PP merupakan mata telinga dalam menjaga ketertiban umum ketentraman masyarakat.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian sasaran ini antara lain : Memberi kesempatan Diklat dan tes kopetensi untuk jampung Sat Pol PP, melibatkan linmas dan aparat desa atau kelurahan saat pelaksanaan penertiban wilayah di 6 Kecamatan. Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan capaian sasaran pada tahun kedepan sinergitas semua perangkat daerah, instansi vertikal, Instansi Penegak Peraturan dalam pelaksanaan oprasional di lapangan secara bersama untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membuat MOU antar aparat dan penegak hukum yan terkait dengan tindak lanjut membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran ini melalui: penegakan perda dan perkara seperti penandatanganan pernyataan, pelaksanaa tindak pidana ringan, dan pembongkaran.



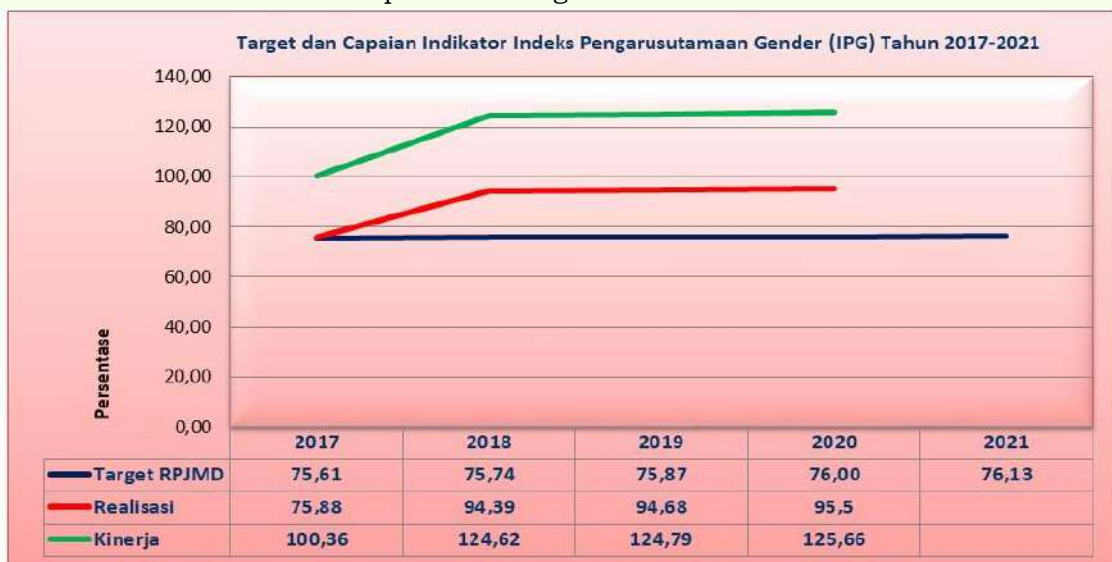
Analisis Kinerja Sasaran 13 : Meningkatnya Pengarustamaan Gender

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDP). IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari 4 indikator yang lebih menekankan pada status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini, mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender.

Pada dasarnya IPG dihitung dari variabel yang sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya dalam penghitungan IPG, rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Dalam konteks pembangunan manusia, IPG dapat digunakan untuk menjelaskan kemajuan pembangunan yang berbasis gender. Semakin tinggi IPG suatu wilayah atau negara, semakin rendah kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Hasil pengukuran terhadap indikator indeks pembangunan gender (IPG) di Kabupaten Badung seperti grafik berikut:

Grafik 3.29
Target dan Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021



Sumber Data : Diolah dari data DP2KBP3A Kabupaten Badung Tahun 2020



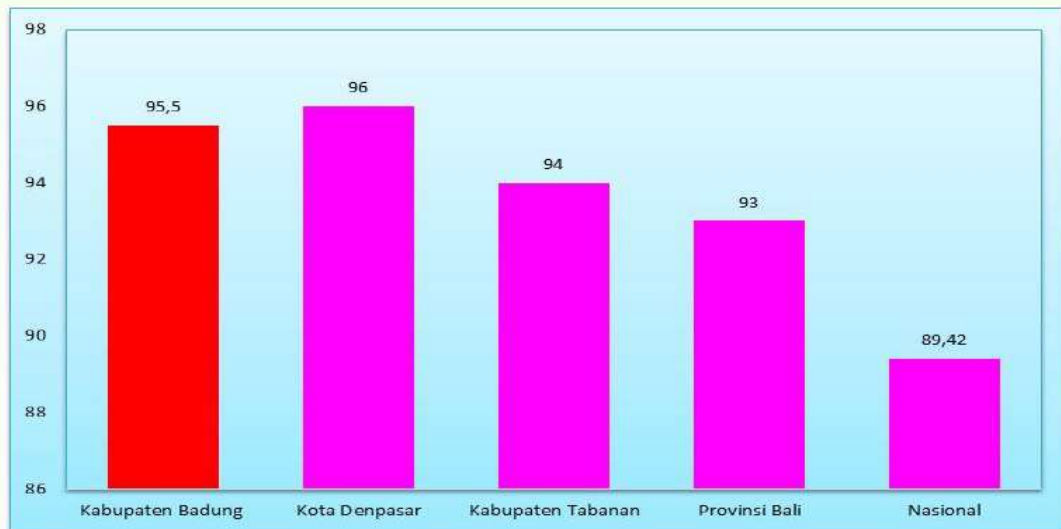
Hasil capaian indikator indeks pembangunan gender (IPG) tahun 2020 sebesar 95,50 dari target sebesar 76,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 125,66%. Hasil capaian indikator indeks pembangunan gender tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 94,68 dengan kinerja sebesar 124,79%.

Hasil capaian indikator indeks pembangunan gender (IPG) tahun 2020 lebih tinggi bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 76,13. Hasil capaian IPG yang tinggi menunjukkan bahwa di Kabupaten Badung hampir tidak ada ketimpangan yang cukup berarti dalam pembangunan jika dilihat dari perspektif gender.

Hasil capaian indikator indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Badung tahun 2020 dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional menunjukkan indeks pembangunan gender masih dibawah Kota Denpasar, namun telah melampaui capaian tingkat Provinsi Bali dan Nasional. Hasil perbandingan capaian kinerja indeks pembangunan gender seperti grafik berikut :

Grafik 3.30

Perbandingan indeks pembangunan gender di Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020



Sumber Data : Diolah dari data DP2KBP3A Kabupaten Badung Tahun 2020

Upaya untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya pengarusutamaan gender didukung oleh 2 program dan 8 kegiatan. Program pendukung meliputi: program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 666.114.240,- dengan realiasi sebesar Rp. 575.394.550,- dengan serapan anggaran sebesar 86,38%.

Faktor pendorong meningkatnya capaian indeks pembangunan gender (IPG) di Kabupaten Badung, antara lain :

1. Adanya Komitmen Kepala Daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kab. Badung



2. Tersedianya anggaran program untuk mendukung kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)
3. Terbentuknya POKJA PUG, FOCAL POINT serta FORUM DATA

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian indeks pembangunan gender (IPG) di Kabupaten Badung, antara lain :

1. Kapasitas SDM yang belum mampu sepenuhnya memahami Pengarusutamaan Gender (PUG) terutama menganalisis bagian kegiatan yang responsif gender
2. Masih kurangnya ketersediaan Sistem Informasi Gender (Data Terpilah dan Anak)
3. Masih rendahnya Aspek Keterwakilan Perempuan dalam jabatan publik dan parlement.
4. Belum optimalnya keterpaduan program dan kegiatan antar OPD dengan jejaring/partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan indeks pembangunan gender (IPG) antara lain :

1. Memperkuat komitmen penganggaran yang responsif gender di OPD/LM/Non LM
2. Mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif gender
3. Peningkatan kapasitas kemampuan SDM dalam Program Kegiatan di OPD/LM/Non LM
4. Mendorong peran aktif perempuan dalam bidang ekonomi, hukum serta politik
5. meningkatkan program pendidikan vokasional (keterampilan) khususnya pada perempuan usia kerja.

Analisis Kinerja Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas lingkungan hidup merupakan data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung terkait dengan Tiga indikator yaitu kualitas udara, air dan tutupan hutan. IKLH disusun berdasarkan basis data hasil pengamatan yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan. IKLH menjadi hal yang sangat penting diketahui mengingat saat ini tantangan yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan pembangunan semakin berat dan kompleks.



IKLH berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan Pemerintah Kabupaten Badung tentang kondisi lingkungan, sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Kabupaten Badung di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

- 1) Unggul : > 90
- 2) Sangat Baik : 82 - 90
- 3) Baik : 74 - 82
- 4) Cukup : 66 - 74
- 5) Kurang : 58 - 66
- 6) Sangat Kurang : 50 - 58
- 7) Waspada : < 50

Hasil capaian indikator indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari IPU, IPA dan ITH tahun 2020 sebesar 70,85 dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 69,30 sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,24%. Hasil capaian indikator IKLH tahun 2020 termasuk kategori cukup karena nilainya berkisar antara 66 – 74. Hasil capaian indikator tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 70,077. Hasil capaian indikator indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 69,40. Gambaran target dan realisasi indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) seperti grafik berikut:

Grafik 3.31

Target dan Capaian Indikator IKLH Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung, 2020



Distribusi capaian Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan maka diperoleh IKLH Kabupaten Badung pada tahun 2016-2020 seperti tabel berikut:

Grafik.32

Capaian Komponen IKLH Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

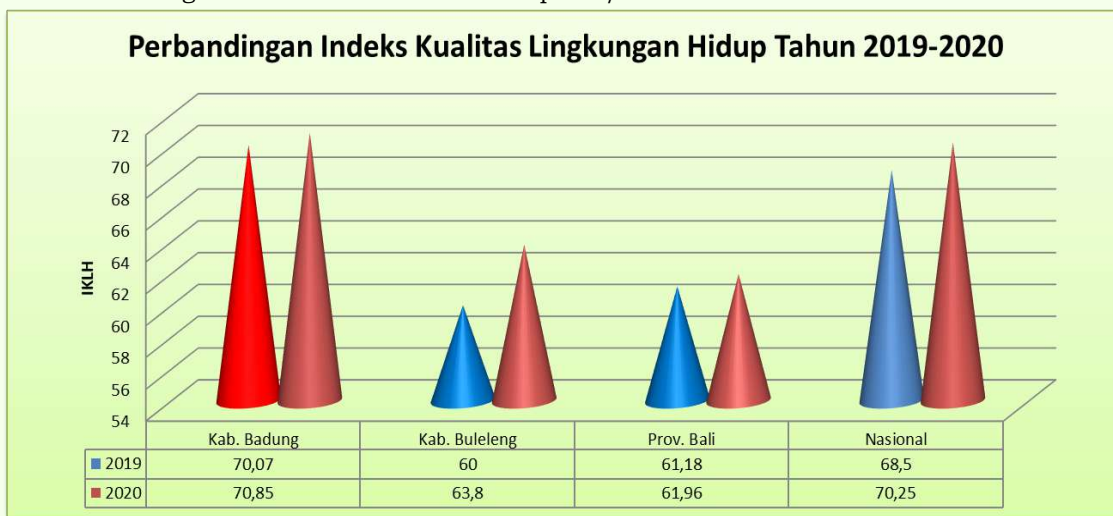


Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung 2020

Hasil capaian indikator IKLH Kabupaten Badung tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Kabupaten Buleleng sebesar 63,8 dan capaian IKLH Provinsi Bali sebesar 61,96 serta IKLH nasional sebesar 70,25. Perbandingan IKLH Kabupaten Badung dengan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan nasional seperti grafik berikut :

Grafik 3.33

Perbandingan Hasil IKLH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2020



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2020



Pemakaian indikator indeks kualitas lingkungan hidup bagi Kabupaten Badung, terkait erat dengan kebutuhan prioritas pembangunan berkelanjutan sesuai 6 (enam) prinsip dasar pembangunan Kabupaten Badung, salah satunya adalah *pro environment* dan selaras dengan sasaran RPJMN, target sasaran IKLH tahun 2019 berkisar : 66,5-68,5. Indeks kualitas Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjaga kualitas udara, air sungai dan tutupan lahan di Kabupaten Badung.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup didukung oleh 8 program dan 31 kegiatan. Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran ini meliputi: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Peningkatan dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 70.848.124.400,32,- dengan realisasi sebesar Rp. 54.901.817.398,- dengan serapan anggaran sebesar 77,49%.

Faktor pendorong meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung antara lain :

1. Komitmen kepala daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan kebijakan *pro environment* dalam pembangunan di Kabupaten Badung.
2. Adanya pandemi COVID 19 berdampak pada pengurangan aktivitas masyarakat sehingga secara tidak langsung mengurangi pencemaran terhadap lingkungan udara serta air sungai.
3. Dukungan pendanaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui dana hibah pariwisata dalam menunjang bangkitnya kepariwisataan di Kabupaten Badung.
4. Mempertahankan Luas tutupan hutan dengan tidak melakukan alih fungsi hutan ke peruntukan yang lain.
5. Adanya kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan yang ikut berperan aktif menjaga kualitas lingkungan.
6. Melakukan inventarisasi potensi dan masalah pengelolaan wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi salah satu sumber pencemar pada badan air sungai. Kajian geofisik kimia, biologi dan inventarisasi kegiatan serta studi masalah sosial ekonomi masyarakat di sekitar DAS perlu dilakukan untuk mencari solusi dalam mengurangi pencemaran pada badan sungai.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan IKLH di Kabupaten Badung adalah :



1. belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mengurangi pencemaran pada badan sungai
2. belum optimalnya program pemulihan terhadap sungai-sungai yang tercemar melalui berbagai program aksi, seperti prokasih (program kali bersih)
3. Belum dimanfaatkan sungai sebagai sarana pariwisata dan kegiatan ekonomi
4. adanya pandemi covid 19 yang berdampak pada refocusing dan realokasi anggaran.

Strategi yang ditempuh untuk lebih optimalnya peningkatan IKLH di Kabupaten Badung yaitu:

1. Mengurangi Daerah Rawan bencana dan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
2. Pemantauan dan Pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Badung
3. Membangun TPS 3R di seluruh desa/kelurahan secara bertahap
4. Membangun taman berkualitas internasional yang berwujud bersih dan hijau di Kabupaten Badung
5. Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup,
6. Peningkatan Pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup.
7. Penanaman pohon perindang untuk penyerapan gas karbondioksida yang berasal dari kendaraan melalui program *green transportation*.
8. Pemantauan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup (UKL-UPL)

2. Indeks Pertanaman (IP)

Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup melalui penghijauan lahan maka dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 ditetapkan indikator Indeks Pertanaman. Indeks Pertanaman (IP) menunjukkan kerapatan pertanaman pada sebidang lahan. IP ini menunjukkan berapa kali melakukan penanaman padi, palawija dan hortikultura dalam setahunnya. Formula untuk menghitung indeks pertanaman adalah Luas tanam dibagi luas lahan kali 100.

Hasil capaian indikator indeks pertanaman tahun 2020 sebesar 205,3% dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 233% sehingga kinerjanya sebesar 88,11%. Hasil capaian indikator tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 218,22% dan tahun 2018 sebesar 231,58%.

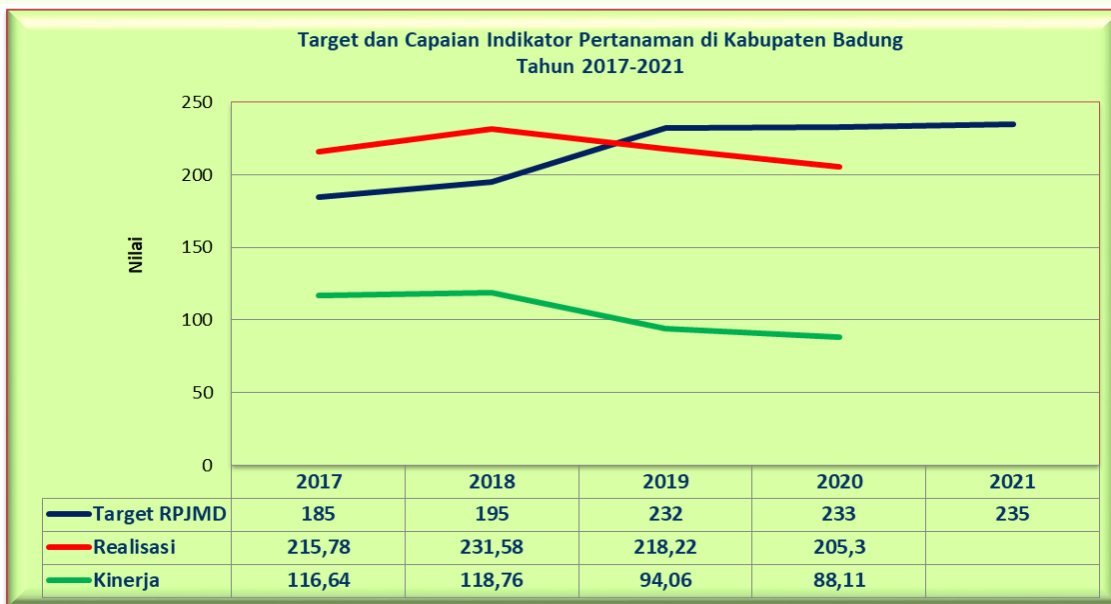
Hasil capaian indikator indeks pertanaman tahun 2020 masih dibawah target yang ditetapkan pada Akhir RPJMD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 235%.



Secara lengkap Indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.34

Target dan Capaian Indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Diolah dari data DP2KBP3A Kabupaten Badung Tahun 2020

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya indeks pertanaman didukung oleh 3 program dan 5 kegiatan. Program pendukung meliputi: Program peningkatan produksi pertanian dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 316.210.527,85,- dengan realiasi sebesar Rp. 310.170.294,- dengan serapan anggaran sebesar 98,09%.

Faktor yang menghambat pencapaian indikator indeks pertanaman adalah adanya perbaikan saluran irigasi yang rusak berat dan sedang, musim kemarau yang berkepanjangan, pola tanam masyarakat, kondisi tanah sebagai lahan pertanian serta pemilihan bibit unggul.

Faktor yang mendorong indeks pertanaman (IP) di Kabupaten Badung adalah Adanya bantuan Sarana produksi padi serta Adanya Asuransi Tanaman Padi.

Strategi untuk meningkatkan indeks pertanaman adalah meningkatkan intensifikasi tanaman dan Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan indeks pertanaman adalah Meningkatkan intensifikasi tanaman, Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna, Meningkatkan pendampingan Penyuluh untuk pemanfaatan pekarangan serta penambahan irigasi/pengairan (pembangunan sumber-sumber air).



Analisis Kinerja Sasaran 15 : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Kapasitas daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Tujuan peningkatan kapasitas adalah untuk menurunkan indeks resiko bencana. Sedangkan manfaatnya adalah memberikan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sehingga dapat meningkatkan ketahanan daerah serta menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, merujuk pada peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana yaitu dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan resiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian – capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.

Hasil capaian indikator tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana tahun 2020 pada level IV dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar level IV sehingga kinerjanya sebesar 100%. Hasil capaian indikator tahun 2020 sama dengan tahun tahun sebelumnya 2017-2019 dengan kategori level IV. Sedangkan capaian tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan pada Akhir RPJMD tahun 2021 dengan kategori level IV. Secara lengkap tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :



Grafik 3.35
Target dan Capaian Kriteria Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung tahun 2017-2021



Keterangan : 4) Angka 4 berarti Level 4

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Badung, 2020

Berdasarkan kriteria tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Badung diperoleh informasi bahwa dari 7 kriteria maka Kabupaten Badung tahun 2019 memperoleh nilai 0,82 dari nilai 1. Dari 7 kriteria yang ada baru terpenuhi 1 (satu) kriteria yaitu Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu dengan nilai 1 (satu). Hasil capaian kriteria tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana tahun 2020 seperti grafik berikut:

Grafik 3.36
Capaian Kriteria Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung tahun 2020

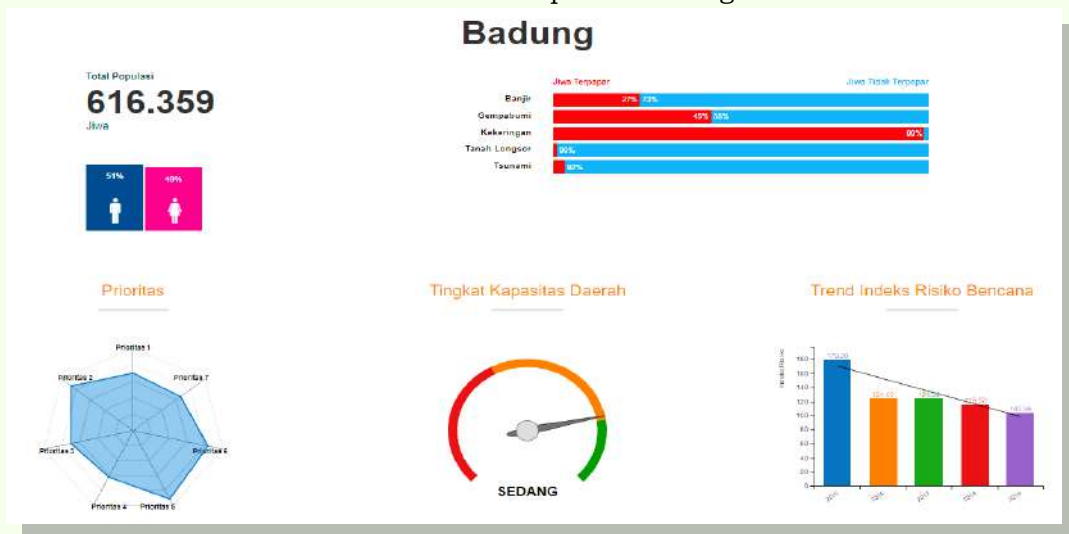


Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Badung, 2020



Kabupaten Badung pada tahun 2019, telah melakukan penilaian mandiri terhadap indeks resiko bencana yang mengacu pada 7 indikator dengan menggunakan instrument indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dari hasil penilaian IKD menunjukkan telah terjadi penurunan indeks resiko bencana sebagai akibat dari peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Nilai 111 menunjukkan tingkat resiko bencana di Kabupaten Badung berada pada kategori sedang.

Gambar 3.1
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Badung Tahun 2019



Sumber Data : Inarisk Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2020

Rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Badung antara lain:

Prioritas 1 : Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan

1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD
3. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB
4. Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan
5. Optimalisasi Fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana
6. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana
7. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Penguatan Forum PRB



9. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah

Prioritas 2 : Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu

1. Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
2. Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
3. Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
4. Optimalisasi Penerapan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas 3 : Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik

1. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah
2. Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungannya
3. Komunikasi bencana lintas lembaga
4. Mengoptimalkan Fungsi dan Peran Pusdalops PB untuk Efektivitas Penanganan Darurat Bencana
5. Pemanfaatan Sistem Pendataan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pendataan Nasional
6. Meningkatkan Kapasitas Respon Personil PB sesuai dengan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB
7. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
8. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
9. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
10. Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah
11. Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana
12. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana
13. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana

Prioritas 4 : Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
2. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan Ruang Daerah untuk Pengurangan Risiko bencana
3. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
4. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana
5. Pembangunan Desa Tangguh Bencana



Prioritas 5 : Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana

1. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori
2. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air
3. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai
4. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng
5. Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan
7. Penguatan Kerjasama Lintas Batas untuk Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang
8. Penegakan Hukum untuk pelanggaran penerapan IMB khususnya bangunan tahan gempabumi
9. Pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah berisiko
10. Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di Daerah Berisiko Banjir
11. Restorasi lahan gambut di daerah berisiko Kebakaran Hutan dan Lahan
12. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS

Prioritas 6 : Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana

1. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempa bumi melalui Perencanaan Kontijensi
2. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tsunami melalui Perencanaan Kontijensi
3. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami Daerah
4. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami
5. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi
6. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah
7. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi
8. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah



9. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi
10. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah
11. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi gunung api melalui Perencanaan Kontijensi
12. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana erupsi gunung api Daerah
13. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunung api
14. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi
15. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah
16. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi
17. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah
18. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana
19. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
20. Pelaksanaan Kaji Cepat untuk Penetapan Status Darurat Bencana
21. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis
22. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana
23. Pengerahan bantuan Kemanusiaan saat darurat bencana hingga Masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme
24. Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana

Prioritas 7 : Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

1. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana
2. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana
3. Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana
4. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana

Capaian penurunan indeks resiko bencana ini lebih tinggi dari target Nasional yaitu 30% pada tahun 2019. Dengan capaian tersebut maka tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Badung adalah berada pada level IV sesuai dengan target yang ditetapkan. **Klasifikasi Level 4** berarti dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas



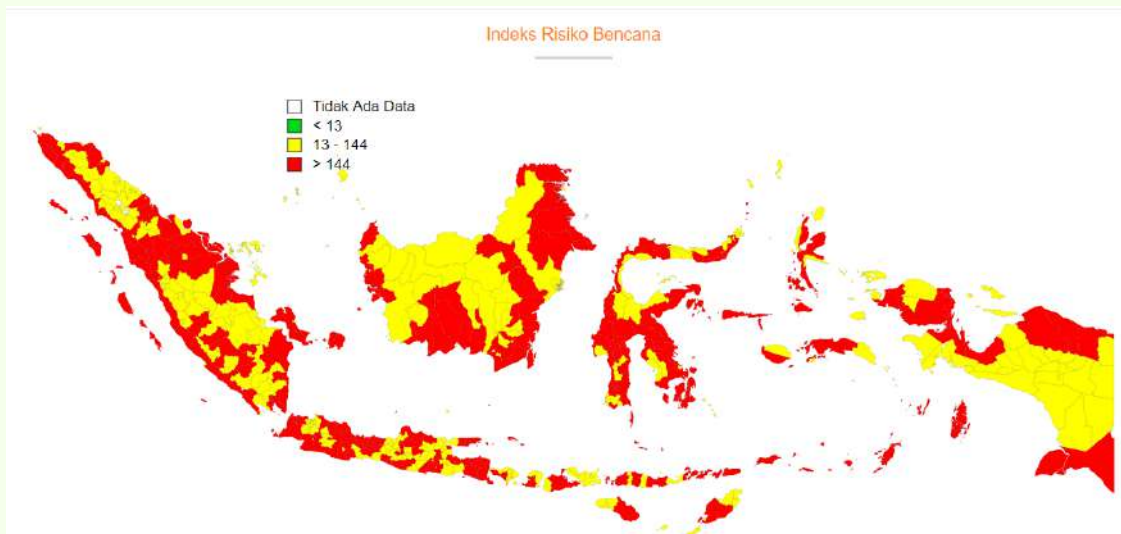
operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut. Pada akhir periode RPJMD semesata berencana tahun 2016-2021, harapan capaian penurunan indeks resiko bencana menjadi 100 (penurunan 40%) dengan tingkat kapasitas level V.

Tabel 3.12
Tingkat Kapasitas Daerah dan Indeks Resiko Bencana
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Tingkat Kapasitas Daerah	Indeks Resiko Bencana
1	Kab. Jembrana	Sedang	155,1
2	Kab. Tabanan	Sedang	159,83
3	Kab. Badung	Sedang	103,59
4	Kab. Gianyar	Sedang	123,48
5	Kab. Klungkung	Tinggi	134,53
6	Kab. Bangli	Sedang	129,68
7	Kab. Karangasem	Tinggi	128,16
8	Kab. Buleleng	Tinggi	98,76
9	Kota Denpasar	Sedang	102,92

Sumber Data : Inarisk Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2020

Gambar 3.2
Indeks Resiko Bencana di Indonesia Tahun 2019



Sumber Data : Inarisk Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2019



Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana antara lain menyiapkan desa/kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana. Di Kabupaten Badung telah memiliki 42 desa/kelurahan tangguh bencana dari 62 desa/kelurahan yang ada, atau capaian 67,74%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 31 Desa/kelurahan. Sedangkan untuk sekolah aman bencana sudah ada sebanyak 29 sekolah dari 32 sekolah di daerah rawan bencana atau 90,63%. Perkembangan desa tangguh bencana dan sekolah aman bencana seperti berikut:

Tabel 3.13

Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana
Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	KECAMATAN	DESA/KEL.	DESA/KEL TANGGUH BENCANA	%	SEKOLAH DI DAERAH RAWAN	SEKOLAH AMAN BENCANA	%
1	Petang	7	7	100,00	0	0	0
2	Abiansemal	18	14	77,78	0	0	0
3	Mengwi	20	11	55,00	1	0	0
4	Kuta Utara	6	2	33,33	0	0	0
5	Kuta	5	4	80,00	18	16	88,89
6	Kuta Selatan	6	4	66,67	13	13	100,00
	Kabupaten	62	42	67,74	32	29	90,63

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Badung, 2020

Perkembangan desa aman bencana di Kabupaten Badung tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa desa/kelurahan aman bencana terus meningkat setiap tahunnya yang awalnya tahun 2014 sebanyak 4 desa menjadi 42 pada tahun 2019. Perkembangan desa/kelurahan aman bencana seperti grafik berikut :

Grafik 3.37

Desa Tangguh Bencana Kabupaten Badung Tahun 2014-2020



Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Badung, 2020



Perkembangan sekolah aman bencana di Kabupaten Badung tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa sekolah aman bencana terus meningkat setiap tahunnya yang awalnya tahun 2014 sebanyak 2 sekolah menjadi 29 sekolah pada tahun 2019. Perkembangan sekolah aman bencana seperti grafik berikut :

Grafik 3. 38
Sekolah Aman Bencana Kabupaten Badung Tahun 2013-2018



Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Badung, 2020

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana didukung oleh 7 program dan 21 kegiatan. Program pendukung meliputi: program pencegahan dan kesiapsiagaan, program penanganan darurat bencana, program pemulihan pasca bencana, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 40.744.271.926,41,- dengan realiasi sebesar Rp. 35.529.450.683,- dengan serapan anggaran sebesar 87,20%.

Faktor yang mendorong peningkatan indikator tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Badung yaitu:

1. Komitmen pemerintah pusat dan daerah mewujudkan upaya pengurangan resiko bencana
2. Terselenggaranya koordinasi antara penyelenggara penanggulangan bencana (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha)

Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam peningkatan tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Badung yaitu:



1. Masih kurangnya penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana
 2. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi bencana maupun saat tanggap darurat
 3. Masih kurangnya regulasi ditingkat desa/kelurahan yang mengatur upaya pengurangan resiko bencana maupun kerjasama dengan pihak terkait
 4. Belum terbentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tingkat Kabupaten.
 5. Perlu adanya penguatan struktur dan mekanisme penyampaian informasi kebencanaan
 6. Belum tersedia strategi, SOP dan mekanisme untuk ketersediaan energi listrik pada masa tanggap darurat
 7. Belum tersedia strategi, SOP dan mekanisme untuk pemenuhan kebutuhan pangan pada masa tanggap darurat
 8. Belum *update* kajian resiko bencana dan rencana penanggulangan bencana
 9. Penegakan hukum terkait RTRWK sesuai pengurangan resiko bencana
 10. Belum tersedia rencana kontinjensi banjir, kekeringan
 11. Menyusun program desa tangguh bencana sesuai standar
 12. Menambah jumlah sekolah aman bencana
 13. Akreditasi Rumah sakit dan Puskesmas aman bencana
- Strategi kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yaitu :
1. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait
 2. Peningkatan pengelolaan informasi, dan percepatan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana vital
 3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan dalam pemulihan pasca bencana



Analisis Kinerja Sasaran 16 : Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah bahkan negara maju sekalipun. Masalah pengangguran, tidak hanya tentang masalah sosial tetapi juga berkaitan dengan permasalahan ekonomi, karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berupaya untuk menekan pengangguran. Hal ini tercermin dalam prioritas pembangunan untuk menekan tingkat pengangguran penduduk dengan sasaran strategis meningkatnya daya saing tenaga kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dengan formula jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100.

Berdasarkan data BPS, hasil capaian indikator tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 6,92% dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 0,320% sehingga kinerjanya sebesar -1.962,5%. Hasil capaian indikator tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 lebih tinggi dari capaian tahun 2019 sebesar 0,306%. Hasil capaian indikator tahun 2020 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target Akhir RPJMD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 0,310%. Secara lengkap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.39

Target dan Capaian Pengangguran Terbuka di Kabupeten Badung Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Badung, 2020



Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Bali sebesar 5,63%. Distribusi tingkat pengangguran menurut kabupaten/kota di Bali menunjukkan tingkat pengangguran di 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar dengan tingkat pengangguran yang paling tinggi. Adapun penyebab tingginya tingkat pengangguran di 3 kabupaten/kota oleh karena dampak pandemi COVID 19 yang melumpuhkan sektor pariwisata. Adapun distribusi tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Bali seperti tabel berikut :

Tabel 3.14

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2020

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengangguran			Persentase Pengangguran		
		2020	2019	2018	2020	2019	2018
1	Badung	27.324	1.543	1.670	6,92	0,306	0,46
2	Bangli	2.727	1.104	1.217	1,86	0,75	0,81
3	Buleleng	19.861	10.960	7.198	5,19	3,12	1,88
4	Gianyar	22.028	4.506	5.091	7,53	1,46	1,61
5	Jembrana	7.485	2.102	2.321	4,52	1,44	1,41
6	Karangasem	6.284	1.590	2.665	2,42	0,62	1,03
7	Klungkung	5.794	1.679	1.596	5,42	1,57	1,47
8	Tabanan	11.663	3.527	4.035	4,21	1,29	1,45
9	Kota Denpasar	41.334	12.277	10.018	7,62	2,29	1,87
	Provinsi Bali	144.500	39.288	35.811	5,63	1,57	1,4

Sumber : BPS Kabupaten Badung, 2020

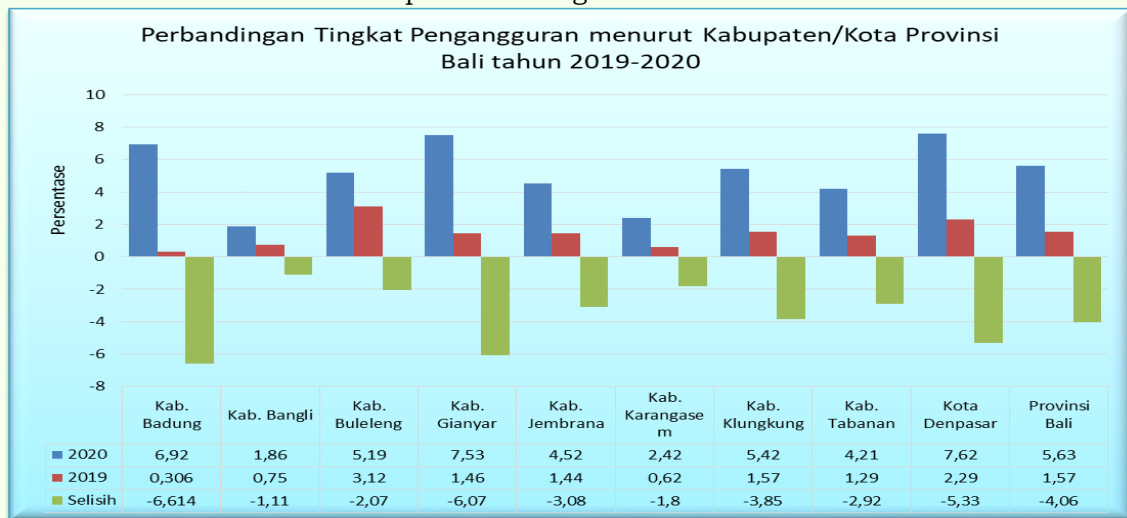




Perbandingan tingkat pengangguran menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bali menunjukkan semua kabupaten/kota mengalami peningkatan pengangguran pada tahun 2020 dan yang terbanyak dialami oleh Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. Perbandingan tingkat pengangguran menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali seperti grafik berikut :

Grafik 3.40

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Badung Tahun 2019-2020



Sumber : BPS Kabupaten Badung, 2020

Tingkat pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2020 sebesar 6,92% lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran Provinsi Bali sebesar 5,63% serta lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran tingkat nasional sebesar 7,07%. Secara lengkap perbandingan tingkat pengangguran Kabupaten Badung dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia seperti tabel berikut:

Tabel 3.15

Tingkat Pengangguran terbuka di Indonesia Tahun 2018-2020

No	Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)			Pengangguran (2019 dengan 2020)
		2020	2019	2018	
1	Aceh	6,59	6,17	6,34	-0,42
2	Sumatera Utara	6,91	5,39	5,55	-1,52
3	Sumatera Barat	6,88	5,38	5,66	-1,50
4	Riau	6,32	5,76	5,98	-0,56
5	Jambi	5,13	4,06	3,73	-1,07
6	Sumatera Selatan	5,51	4,53	4,27	-0,98
7	Bengkulu	4,07	3,26	3,35	-0,81
8	Lampung	4,67	4,03	4,04	-0,64
9	Kep. Bangka Belitung	5,25	3,58	3,61	-1,67



No	Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)			Pengangguran (2019 dengan 2020)
		2020	2019	2018	
10	Kep. Riau	10,34	7,50	8,04	-2,84
11	DKI Jakarta	10,95	6,54	6,65	-4,41
12	Jawa Barat	10,46	8,04	8,23	-2,42
13	Jawa Tengah	6,48	4,44	4,47	-2,04
14	Di Yogyakarta	4,57	3,18	3,37	-1,39
15	Jawa Timur	5,84	3,82	3,91	-2,02
16	Banten	10,64	8,11	8,47	-2,53
17	Bali	5,63	1,57	1,40	-4,06
18	Nusa Tenggara Barat	4,22	3,28	3,58	-0,94
19	Nusa Tenggara Timur	4,28	3,14	2,85	-1,14
20	Kalimantan Barat	5,81	4,35	4,18	-1,46
21	Kalimantan Tengah	4,58	4,04	3,91	-0,54
22	Kalimantan Selatan	4,74	4,18	4,35	-0,56
23	Kalimantan Timur	6,87	5,94	6,41	-0,93
24	Kalimantan Utara	4,97	4,49	5,11	-0,48
25	Sulawesi Utara	7,37	6,01	6,61	-1,36
26	Sulawesi Tengah	3,77	3,11	3,37	-0,66
27	Sulawesi Selatan	6,31	4,62	4,94	-1,69
28	Sulawesi Tenggara	4,58	3,52	3,19	-1,06
29	Gorontalo	4,28	3,76	3,70	-0,52
30	Sulawesi Barat	3,32	2,98	3,01	-0,34
31	Maluku	7,57	6,69	6,95	-0,88
32	Maluku Utara	5,15	4,81	4,63	-0,34
33	Papua Barat	6,80	6,43	6,45	-0,37
34	Papua	4,28	3,51	3,00	-0,77
	Indonesia	7,07	5,23	5,30	-1,84

Sumber : BPS Pusat, 2020

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja didukung oleh 5 program dan 16 kegiatan. Beberapa Program pendukung meliputi: program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja, program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.088.845.309,35,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.967.602.110,- dengan serapan anggaran sebesar 94,20%.

Faktor penyebab meningkatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Badung antara lain:

1. pandemi Covid-19 sehingga banyak perusahaan yang menon aktifkan karyawannya.



2. Perusahaan belum semua menerapkan sistem pengupahan menggunakan struktur dan skala upah
3. Monitoring upah belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena banyaknya perusahaan di Kabupaten Badung dan terbatasnya waktu dan personil.
4. Perusahaan yang memiliki pekerja diatas 10 orang belum semua memiliki peraturan perusahaan
5. Perusahaan belum semua menerapkan norma-norma ketenagakerjaan.
6. Masih kurangnya fasilitas penunjang dalam memfasilitasi proses mediasi.
7. Belum optimalnya penyedia tenaga kerja (job creator) dan pencari kerja (job seeker) memanfaatkan bursa kerja elektronik
8. Minimnya jumlah LPKS yang terakreditasi
9. Kewajiban Dinas tenaga kerja untuk menerbitkan rekomendasi ijin LPKS

Beberapa faktor pengendali terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Badung antara lain:

1. Adanya Kebijakan pemberian insentif/Bantuan Sosial (Bansos) bagi Pekerja Formal di Sektor Pariwisata dan sektor lainnya yang terkena PHK dan dirumahkan akibat dampak Covid-19, masing-masing menerima Rp. 600 ribu setiap bulannya selama tiga bulan.
2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja melalui pelatihan yang dilanjutkan dengan uji kompetensi dan sertifikasi.
3. Adanya fasilitas sistem informasi industri dan tenaga kerja (SINAGA) yang berbasis teknologi berupa aplikasi yang dapat diunduh oleh pencari kerja untuk mencari lowongan pekerjaan dan bagi pengguna tenaga kerja (perusahaan) dapat memasukan lowongan yang ada pada sistem tersebut
4. Peluang menggunakan anggaran yang digunakan untuk uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi sangat terbuka (APBD)

Strategi kedepan yang akan dilaksanakan untuk lebih mengoptimalkan penurunan tingkat pengangguran yaitu :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan Peraturan Perusahaan dan pengesahannya.
2. Melakukan pembinaan tentang norma-norma ketenagakerjaan secara berkesinambungan.
3. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan baik di dalam maupun di luar negeri
4. Meningkatkan sosialisasi sistem informasi industri dan tenaga kerja (SIINAGA) yang berbasis teknologi berupa aplikasi yang dapat diunduh oleh pencari kerja untuk mencari lowongan pekerjaan dan bagi pengguna tenaga kerja (perusahaan)



5. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan 8 standar mutu LPK
6. Melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan ke lokasi LPKS (pemohon) yang didukung dengan anggaran

Analisis Kinerja Sasaran 17 : Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

Infrastruktur wilayah yang mantap dan berkualitas diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional. Sebagai daerah tujuan wisata yang sudah terkenal Kabupaten Badung dituntut mampu menyediakan infrastruktur wilayah yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan para kompetitor dari negara lain yang sama-sama mengandalkan sektor kepariwisataan. Salah satu infrastruktur jalan, jembatan dan trotoar serta saluran irigasi di Kabupaten Badung diharapkan semakin meningkatkan kualitasnya.

Indikator infrastruktur kondisi mantap merupakan indikator penilaian terhadap kondisi kemantapan jalan yang berkondisi sedang dan baik. Formula pengukuran infrastruktur kondisi mantap adalah Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100.

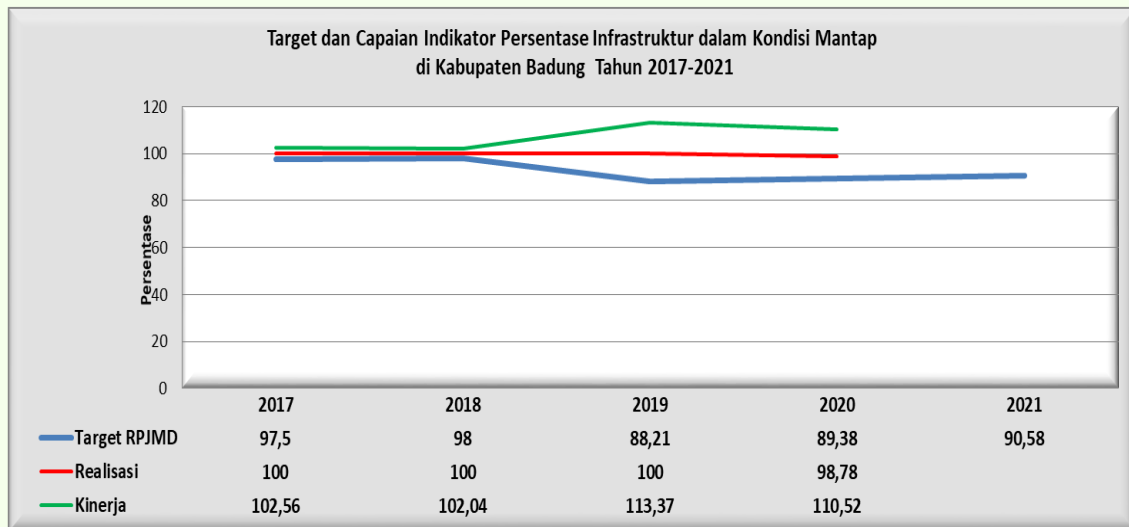
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Badung nomor 13 tahun 2016 terdapat perubahan target Indikator infrastruktur kondisi mantap untuk tahun 2020 menjadi 89,38% dan tahun 2021 sebesar 90,58%. Perubahan target diakibatkan oleh karena kondisi fiskal keuangan pemerintah Kabupaten Badung mengalami penurunan.

Hasil capaian indikator infrastruktur kondisi mantap pada tahun 2020 sebesar 98,78% dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 89,38% sehingga kinerjanya sebesar 110,52%. Hasil capaian kinerja tahun 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun terdapat penurunan capaian dibandingkan tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 99,25%. Hasil capaian indikator tahun 2020 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2019 dan tahun 2018 sebesar 100%. Sedangkan capaian infrastruktur kondisi mantap Kabupaten Badung Akhir RPJMD tahun 2020 dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 90,58% telah mencapai target yang ditetapkan. Secara lengkap infrastruktur kondisi mantap di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :



Grafik 3.41

Target dan Capaian Indikator Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Badung Tahun 2020

Hasil capaian indikator infrastruktur kondisi mantap tahun 2020 telah mencapai 98,78%, berarti masih ada jalan dalam kondisi rusak. Berdasarkan data dari Dinas PUPR diperoleh data, dari **686.324** km Panjang Jalan, terdapat jalan kondisi rusak sepanjang 24,020 km (3,50 %). Distribusi kondisi jalan di Kabupaten Badung berdasarkan kategorinya seperti tabel berikut :

Tabel 3.16

Distribusi Panjang Jalan dan Kondisi Jalan per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020

No	KECAMATAN	PANJANG JALAN (km)	KONDISI JALAN			PANJANG JEMBATAN	KONDISI JEMBATAN			% INFRASTRUKTUR MANTAP
			BAIK	SEDANG	RUSAK		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	Petang	97,553	65,603	25,645	6,305	275,550	275,550	-	-	98,31
2	Abiansemal	131,228	110,148	10,925	10,155	251,600	246,300	5,300	-	97,34
3	Mengwi	169,171	145,029	24,142	-	240,200	230,500	9,700	-	100,00
4	Kuta Utara	101,751	93,905	7,846	-	64,000	64,000	-	-	100,00
5	Kuta	68,052	63,714	4,338	-	121,800	98,300	23,500	-	100,00
6	Kuta Selatan	118,569	92,429	18,580	7,560	327,750	327,750	-	-	98,31
	Kabupaten	686,324	570,828	91,476	24,020	1.280,900	1.242,400	38,500	-	98,78

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, 2020



Disamping kondisi jalan dan jembatan, prioritas infrastruktur lainnya seperti irigasi pertanian yang merupakan *crosscutting* program dalam menunjang keberhasilan sektor pertanian dalam arti luas. Kondisi saluran irigasi di Kabupaten Badung tahun 2020 dalam kondisi baik sebesar 95,95%, rusak ringan sebesar 2,07% dan kondisi rusak berat sebesar 1,98%. Kondisi saluran irigasi di Kabupaten Badung dari tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan perbaikan dimana saluran irigasi yang rusak sebesar 1,98% dari kondisi tahun 2016 sebesar 30,75%. Kondisi saluran irigasi di Kabupaten Badung tahun 2016-2020 seperti berikut:

Tabel 3.17

Kondisi Saluran Irigasi di Kabupaten Badung Tahun 2020

No	TAHUN	KONDISI IRIGASI					
		Baik	%	Rusak Ringan	%	Rusak Berat	%
1	2016	364,634	50,11	139,291	19,14	223,7622	30,75
2	2017	391,428	52,69	134,147	18,06	217,297	29,25
3	2018	712,27	95,88	10,81	1,46	19,78	2,66
4	2019	712,86	95,96	10,22	1,38	19,78	2,66
5	2020	224,07	95,95	4,83	2,07	4,62	1,98

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas didukung oleh 18 program dan 77 kegiatan. Program pendukung meliputi: program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, program peningkatan pelayanan angkutan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program pembangunan prasarana dan fasilitas dan program pengembangan perumahan dan pemukiman dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 353.286.789.637,78,- dengan realisasi sebesar Rp. 343.072.609.490,01,- dengan serapan anggaran sebesar 97,11%.

Faktor yang menjadi pendorong seluruh jalan di Kabupaten Badung dalam kondisi mantap antara lain:

1. Komitmen pimpinan kepala daerah untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur di Kabupaten Badung pada masa pertama pemerintahan 2016-2021.
2. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan stimulus/hibah pariwisata memberikan dampak positif dalam pembangunan infrastruktur sektor pariwisata.

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mewujudkan infrastruktur dalam kondisi mantap adalah :

1. Adanya pandemi COVID 19 sehingga berdampak pada penurunan pendapatan dari sector pariwisata di Kabupaten Badung.
2. Sinkronisasi anggaran yang belum memadai terhadap target sasaran yang seharusnya diselesaikan untuk pencapaian kondisi infrastruktur di Kabupaten Badung



3. belum optimalnya Koordinasi lintas instansi pemerintah terhadap rencana pembangunan infrastruktur seperti : PLN, PDAM, Telkom

Strategi kedepan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan jalan di Kabupaten Badung yaitu Peningkatan kualitas infrastruktur dan penganggaran melalui skema KPBU, kolaborasi antar instansi dalam peningkatan dan pembangunan insfrasrtuktur.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk pencapaian sasaran ini antara lain: peningkatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan baru dan rehabilitasi saluran irigasi dan pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, peningkatan lingkungan Sehat Perumahan, penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan prioritas daerah pariwisata.

Analisis Kinerja Sasaran 18 : Meningkatnya Produksi Pangan Nabati Dan Hewani

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencakupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dari jumlah, kualitas maupun keragamannya dan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa. Pola Pangan Harapan digunakan sebagai basis perencanaan dan penilaian kecukupan gizi seimbang pada tingkat makro. Pola Pangan Harapan sebagai salah satu indikator output pembangunan pangan termasuk evaluasi penyediaan pangan, konsumsi pangan, dan diversifikasi pangan.

Skor Pola Pangan Harapan diperoleh dengan cara mengalikan antara persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Keragaman konsumsi pangan berdasarkan energi aktual dari Sembilan (9) kelompok pangan berdasarkan metode PPH dikelompokkan menjadi sangat kurang (<55), kurang (55-69), cukup (70-84), dan baik (≥85) (Prasetyo *et al.* 2013).

Pengukuran indikator Skor Pola Pangan Harapan untuk tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan oleh karena adanya pandemi COVID 19, yang mengakibatkan aktivitas masyarakat terbatas dengan penerapan protocol kesehatan sehingga survei pola pangan harapan yang rencananya dilaksanakan oleh politeknik kesehatan Denpasar tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu nilai Skor Pola Pangan Harapan untuk tahun 2020 tidak ada dan kinerjanya tidak bisa diukur.

Sebagai perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan tahun 2019 sebesar 95,95 dari target sebesar 96.00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,95%. Capaian skor PPH sebesar 95,95 termasuk

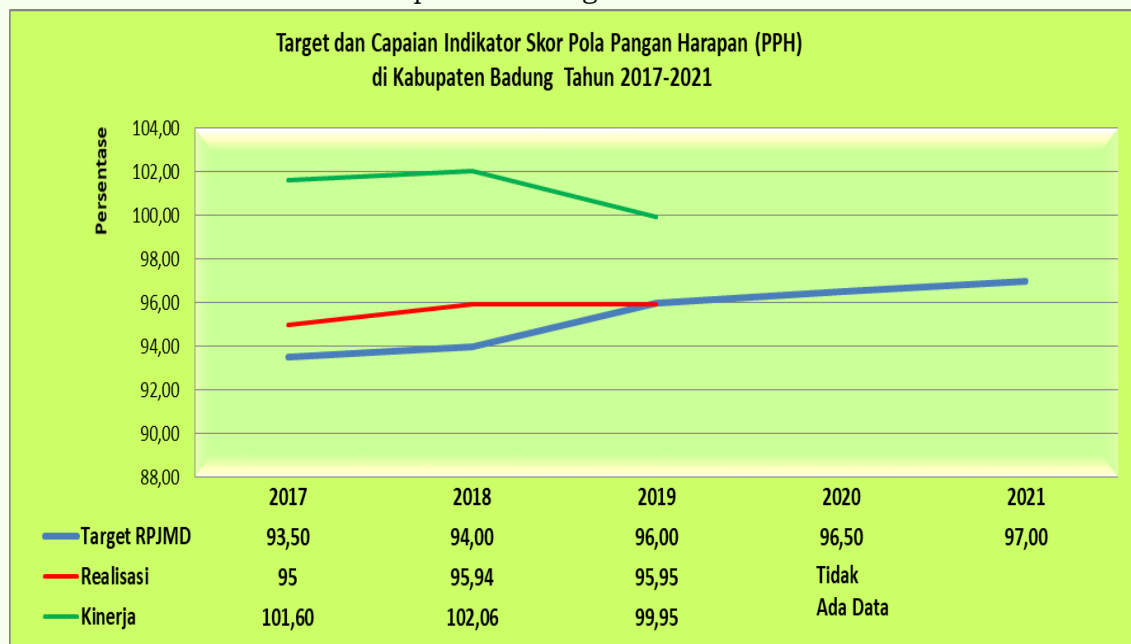


kategori baik, Hal ini menggambarkan bahwa keragaman sumber kalori yang dikonsumsi masyarakat sudah beraneka ragam tidak hanya nasi, tetapi juga sumber kalori lain seperti umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Skor Pola Pangan Harapan tahun 2019 lebih tinggi capaiannya jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 95,94 dari target 94,00. Sedangkan capaian 2019 masih dibawah target akhir RPJMD semesta berencana 2016-2021 sebesar 97,0. Secara lengkap target dan capaian skor pola pangan harapan di Kabupaten Badung seperti grafik berikut:

Grafik 3.42

Target dan Capaian Indikator Skor Pola Panga Harapan (PPH) di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Badung Tahun 2020

Sedangkan hasil capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Badung tahun 2019 dibandingkan dengan kabupaten Buleleng dan Denpasar menunjukkan skor PPH Kabupaten Badung lebih tinggi berarti kualitas konsumsi pangan masyarakat Badung lebih baik. Nilai skor PPH Kabupaten Badung juga lebih tinggi dibandingkan dengan skor PPH Provinsi Bali sebesar 95,70.



Grafik 3.43

Perbandingan Skor PPH Kabupaten Badung dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2019



Untuk perbandingan skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Badung lebih tinggi jika dibandingkan dengan target Nasional tahun 2019 sebesar 92,5 dan realisasi tahun 2018 sebesar 91,3.

Skor Pola Pangan Harapan salah satunya ditentukan oleh jumlah produksi pertanian serta perikanan yang menentukan keanekaragaman konsumsi pangan. Hasil produksi perikanan diperoleh data jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) terus meningkat, dengan gambaran produksi pada Tahun 2015 sebanyak 6.760,7 Ton dan tahun 2019 sebanyak 8.546,9 ton. Trend tingkat pemenuhan ikan di Kabupaten Badung tertinggi tahun 2018 sebesar 60,7% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 52,38%.

Tabel 3.18

Jumlah Produksi Perikanan dan Kebutuhan Ikan di Kabupaten Badung Tahun 2015-2020

No	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PRODUKSI IKAN (TON)		TOTAL (TON)	STANDAR KONSUMSI IKAN/Org/THN (TON)	TOTAL KEBUTUHAN IKAN (TON/THN)	% PEMENUHAN IKAN
			TANGKAP	BUDI DAYA				
1	2	3	4	5	6	7	8 (3x7)	9 (6/8*100)
1	2015	602.700	6.173,9	586,8	6.760,7	0,024	14.673,0	46,1
2	2016	616.400	6.458,8	595,4	7.054,2	0,024	15.006,6	47,0
3	2017	630.000	6.691,6	580,2	7.271,8	0,024	15.337,7	47,4
4	2018	643.500	8.780,3	735,2	9.515,5	0,024	15.666,3	60,7
5	2019	656.900	8.833,6	730,2	9.563,8	0,024	15.992,6	59,8
6	2020	670.200	7.922,3	624,5	8.546,9	0,024	16.316,4	52,38

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020



Peningkatan produksi perikanan ini oleh karena bantuan kepada masyarakat berupa pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta adanya pembinaan dan temu teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung. Distribusi produksi perikanan menurut kecamatan di Kabupaten Badung seperti tabel berikut :

Tabel 3.19

Target dan capaian Produksi Perikanan di Kabupaten Badung Tahun 2020

No	KECAMATAN	TARGET PRODUKSI PERIKANAN (TON)			JUMLAH	REALISASI PRODUKSI PERIKANAN			JUMLAH	%
		TANGKAP	BUDI DAYA	DLL		TANGKAP	BUDI DAYA	DLL		
1	Petang	2	68	-	70	2,89	135,68	-	138,57	197,96
2	Abiansemal	2	326	-	328	3,02	244,60	-	247,62	75,49
3	Mengwi	143	175	-	318	257,29	153,45	-	410,74	129,16
4	Kuta Utara	123	48	-	171	123,57	90,80	-	214,37	125,36
5	Kuta	5.191	-	-	5.191	5.896,23	-	-	5.896,23	113,59
6	Kuta Selatan	1.355	-	-	1.355	1.639,34	-	-	1.639,34	120,98
	Kabupaten	6.816	617		7.433	7.922,34	624,53		8.546,87	114,99

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Badung 2020

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya produksi pangan harapan didukung oleh 14 program dan 48 kegiatan. Program pendukung meliputi: program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, program peningkatan pelayanan angkutan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program pembangunan prasarana dan fasilitas dan program pengembangan perumahan dan pemukiman dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 10.145.176.095,5,- dengan realiasi sebesar Rp. 8.865.988.955,- dengan serapan anggaran sebesar 87,39%.

Faktor pendorong meningkatnya capaian indikator skor Pola Pangan Harapan adalah pengetahuan masyarakat tentang peningkatan gizi sangat tinggi seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat, ketersediaan keaneka ragaman pangan, meningkatnya pola hidup sehat yang mengurangi asupan karbohidrat yang berlebihan, peningkatan pembenihan ikan dengan membangun benih ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan produksi pertanian dan perikanan antara lain :

- Pola pikir masyarakat yang masih mengutamakan konsumsi beras
- Konsumsi pangan masyarakat belum beragam
- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan fungsi ekonomi.
- Perubahan cuaca yang menyebabkan banyaknya kematian ikan budidaya dan susahnya nelayan untuk melaut.
- Tingkat penguasaan teknologi yang masih terbatas di kalangan pembudidaya ikan dan nelayan di Kabupaten Badung



- f) Banyaknya terjadi alih profesi dari pembudidaya, terutama budidaya rumput laut dan nelayan yang menjadi pelaku usaha pariwisata.
- g) Masih rendahnya kemampuan Balai Benih Ikan dalam memproduksi bibit ikan yang diperlukan kelompok pembudidaya.
- h) Terbatasnya lokasi pemeliharaan dan pengembalaan itik.

Upaya-upaya untuk meningkatkan skor pola pangan harapan meliputi : Meningkatkan sosialisasi mengenai keanegaraman konsumsi makanan, meningkatkan pengolahan hasil pertanian dan perikanan sehingga memberi nilai tambah, menumbuhkan gerakan generasi muda sebagai petani, mengalakkan asuransi pertanian, meningkatkan pertanian organic.

Analisis Kinerja Sasaran 19 : Meningkatnya Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dan motor penggerak roda pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung, sehingga menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, sasaran meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing dengan indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing merupakan bentuk komitmen menjaga keberlangsungan sektor kepariwisataan. Formula dari indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing adalah Jumlah obyek wisata yang berdaya saing dibagi seluruh jumlah obyek wisata kali 100.

Daya Tarik Wisata (DTW) dalam laporan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 tahun 2010 tentang standarisasi Daya Tarik Wisata (DTW). Berdasarkan Peraturan Gubernur disebutkan bahwa standar daya tarik wisata harus memenuhi persyaratan standar antara lain: memiliki manajemen pengelolaan, fasilitas toilet, P3K, loket penjualan tiket, petugas keamanan, petugas parkir, tempat sampah, media informasi dan memiliki usaha penunjang seperti *art shop*. Oleh karena itu, setiap obyek wisata perlu dilakukan penataan agar memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga bisa kompetitif dengan DTW daerah lainnya.

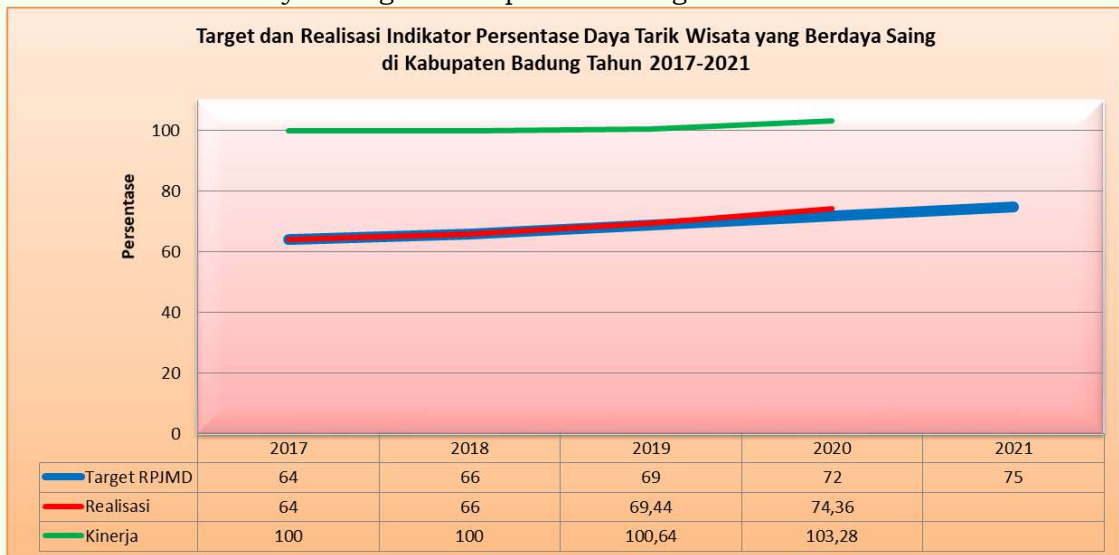
Hasil pengukuran capaian indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing tahun 2020 sebesar 74,36% dari target yang ditetapkan sebesar 72%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,28%. Hasil capaian kinerja indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 69,44% dari target yang ditetapkan sebesar 65%.

Hasil capaian indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing tahun 2020 bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan capaian masih dibawah target namun telah sesuai dengan target tahunan. Data capaian kinerja persentase daya tarik wisata yang berdaya saing disajikan dalam grafik 3.44 berikut ini:



Grafik 3.44

Target dan Capaian Indiaktor Persentase Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing di Kabupeten Badung Tahun 2017-2020



Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Kabupaten Badung sebanyak 39 DTW dengan DTW yang telah sesuai standar sebanyak 29 DTW atau sebesar 74,36%. Distribusi daya tarik wisata menurut kecamatan di Kabupaten Badung tahun 2020 menunjukkan kecamatan dengan daya tarik wisata yang sesuai standar yang tertinggi di Kecamatan Kuta utara dan Abiansemal sebesar 100% dan terendah di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara sebesar 40%. Distribusi DTW dan Desa Wisata di Kabupaten Badung seperti tabel berikut:

Tabel 3.20

Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupeten Badung Tahun 2020

No	KECAMATAN	JUMLAH DTW	JUMLAH DTW	%	JUMLAH DESA WISATA	JUMLAH DESA WISATA BERKEMBANG / MAJU	%
		YANG ADA	SESUAI STANDAR				
1	Petang	5	4	80,00	5	2	18,18
2	Abiansemal	4	4	100,00	2	2	18,18
3	Mengwi	5	2	40,00	4	3	27,27
4	Kuta Utara	3	3	100,00			
5	Kuta	5	4	80,00			
6	Kuta Selatan	17	12	70,59			
	Kabupaten	39	29	74,36	11	7	63,63

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung tahun 2021

Dengan adanya daya tarik wisata yang memenuhi standar dapat meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing, sehingga Kabupaten Badung



tetap menjadi daerah tujuan wisata utama di Provinsi Bali dengan didukung oleh program pemasaran pariwisata dengan kegiatan promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata di Kabupaten Badung tahun 2020 sebanyak 158.365 orang, dengan jumlah terbanyak ke wilayah Kuta Selatan sebanyak 78,044 orang. Distribusi kunjungan wisatawan ke DTW per kecamatan seperti tabel berikut :

Tabel 3.21

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Daerah Tujuan Wisata
Di Kabupaten Badung Tahun 2020

No	KECAMATAN	JUMLAH USAHA SARANA PARIWISATA				
		DTW	RESTORAN	RUMAH MAKAN	BAR	CATERING
1	Petang	6.776	-	-	-	-
2	Abiansemal	19.927	1	-	-	-
3	Mengwi	53.618	2	1	1	-
4	Kuta Utara		147	55	1	1
5	Kuta		399	85	56	4
6	Kuta Selatan	78.044	132	14	4	-
	Kabupaten	158.365	681	155	62	5

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2020

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing didukung oleh 5 program dan 26 kegiatan. Program pendukung meliputi: Pengembangan dan Pengelolaan produk wisata dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 10.232.699.744,47,- dengan realiasi sebesar Rp. 9.539.124.799,- dengan serapan anggaran sebesar 93,22%.

Permasalahan/faktor penghambat dalam pencapaian persentase daya tarik wisata yang berdaya saing adalah sumber daya (anggaran) yang belum memadai oleh karena dampak pandemi COVID19 sehingga mengakibatkan adanya refocusing dan realokasi anggaran, kesiapan sumber daya manusia kepariwisataan, belum lengkapnya fasilitas umum seperti toilet, tempat pengelolaan sampah, belum lengkapnya fasilitas pendukung kegiatan wisata seperti penginapan, home stay, pondok wisata dll, belum lengkapnya fasilitas atraksi wisata dan kesiapan organisasi pengelola obyek wisata.

Strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini meliputi: pengalokasian anggaran untuk perbaikan daya tarik wisata, Menyusun strategi recovery pasca pandemi covid - 19, yaitu dengan melengkapi destinasi wisata dengan prokes sesuai standar kesehatan, pengembangan destinasi wisata, Melaksanakan pemasaran pariwisata baik di dalam dan luar negeri serta melalui media elektronik, pengembangan pengelolaan produk-produk wisata, Melaksanakan penataan kawasan wisata dan DTW, Melaksanakan pembinaan dan



pengawasan industri pariwisata, Melaksanakan pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada daya tarik wisata.

Analisis Kinerja Sasaran 20 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Produkt domestik regional bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah yang disebabkan berbagai sektor, salah satunya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain tenaga kerja, kapital, sumber daya alam, tingkat teknologi dan kondisi sosial suatu daerah.

Salah satu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata memiliki peran dalam menunjang pembangunan, sebagai sumber devisa negara dan pendapatan bagi daerah, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Selain itu, sektor pariwisata mampu membuka dan menggerakkan berbagai lapangan pekerjaan yang memungkinkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha lebih luas dan merata bagi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, tidak heran jika sektor pariwisata dianggap sebagai salah satu industri terbesar di dunia dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah tujuan wisata.

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung berdampak terhadap semakin besarnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan bertumbuhnya kegiatan ekonomi mikro yang tersebar di seluruh Kabupaten Badung. Dampak lainnya dapat dilihat dari semakin tersedianya berbagai lapangan pekerjaan disektor pariwisata. Terbukanya kesempatan kerja dengan ketrampilam terbatas seperti pelayanan porter di airport, pekerjaan kasar di hotel, pemandu wisata, dan beragam pekerjaan di berbagai usaha layanan wisata lainnya.

Dengan besarnya peran sektor pariwisata dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Badung maka sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Badung dengan sasaran RPJMD meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil pengukuran sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB untuk tahun 2020 sebesar 24,61% dari target yang ditetapkan sebesar 28,97% sehingga



capaian kinerjanya sebesar 84,95%. Hasil capaian kinerja indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 dengan capaian sebesar 28,67%, sehingga pada tahun 2020 terjadi penurunan kontribusi PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Badung sebesar 15,94%.

Hasil capaian kinerja indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2020 masih dibawah target yang ditetapkan pada target akhir RPJMD 2016-2021 sebesar 29,00%. Data capaian kinerja indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB disajikan dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.45
Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung, 2020

Distribusi PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2016-2020 diperoleh informasi bahwa kontribusi sektor pariwisata memiliki kontribusi yang tinggi terhadap PDRB. Rata-rata kontribusi PDRB dari sektor pariwisata di Kabupaten Badung tahun 2016-2019 berkisar diatas 28%, sedangkan untuk tahun 2020 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal Maret 2020 yang berdampak terhadap lumpuhnya sektor pariwisata melebihi dampak kejadian bom Bali I dan II. Data Distribusi PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.22
Distribusi PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	6,57	6,35	6,00	5,82	7,45
B	Pertambangan dan Penggalian	0,29	0,29	0,28	0,27	0,34
C	Industri Pengolahan	3,99	3,74	3,67	3,63	4,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,20	0,20	0,19	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,23	0,22	0,21	0,27
F	Konstruksi	8,24	8,36	8,72	8,79	11,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,31	6,32	6,35	6,38	7,78
H	Transportasi dan Pergudangan	25,43	25,48	25,65	25,99	17,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28,50	28,93	28,84	28,67	24,61
J	Informasi dan Komunikasi	5,59	5,49	5,50	5,60	7,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,49	2,41	2,46	3,05
L	Real Estate	3,16	3,18	3,17	3,14	4,07
M,N	Jasa Perusahaan	0,69	0,68	0,67	0,67	0,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,14	3,25	3,28	3,13	4,05
P	Jasa Pendidikan	3,06	2,99	3,00	2,99	3,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,28	1,28	1,28	1,75
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,72	0,74	0,76	0,78	0,95
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2016-2020

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sangat ditentukan oleh kunjungan pariwisata. Distribusi kunjungan pariwisata ke Kabupaten Badung tahun 2015 – 2019 menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun untuk tahun 2020 kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara (domestik) mengalami penurunan yang sangat tajam. Adapun penyebab turunnya wisatawan oleh karena pandemi COVID 19 yang mengakibatkan pengaturan jadwal penerbangan ke Bali melalui bandara I Gusti Ngurah Rai serta penutupan obyek wisata di wilayah Kabupaten Badung. Data kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Badung tahun 2015 -2020 disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 3.46
Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Badung
Tahun 2015-2020



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kab. Badung, 2020

Kunjungan wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung ke Kabupaten Badung antara lain : Australia, Cina, India, Rusia, Inggris dan Amerika. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung tahun 2020 seperti grafik berikut :

Grafik 3.47
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Badung Tahun 2020



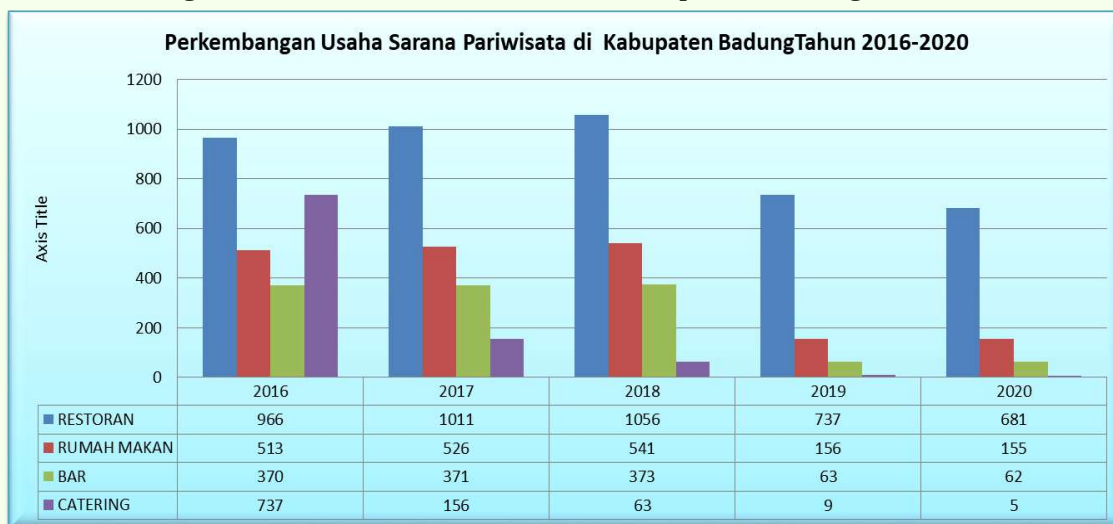
Sumber Data : Dinas Pariwisata Kab. Badung, 2020



Perkembangan usaha sarana pariwisata di Kabupaten Badung tahun 2016-2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah usaha sarana pariwisata dari tahun 2016-2018, namun dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Perkembangan usaha sarana pariwisata di Kabupaten Badung tahun 2016-2020 seperti grafik berikut:

Grafik 3.48

Perkembangan Usaha Sarana Pariwisata di Kabupaten Badung tahun 2016-2020



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2020

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan. Program pendukung meliputi: Pengembangan dan Pengelolaan produk wisata. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.320.916.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.147.595.400,- dengan serapan anggaran sebesar 86,88%.

Faktor yang paling utama menyebabkan penurunan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Badung oleh karena pandemi COVID-19. Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan maka Pemerintah Pusat memberi bantuan hibah melalui Program Penanggulangan Ekonomi Nasional sesuai Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 sebesar Rp. 948.006.720.000,-. Alokasi hibah pariwisata ditujukan kepada Industri Pariwisata (hotel dan restoran) sebesar 70% atau sebanyak Rp. 663.604.704.000 dan untuk Pemerintah Daerah sebesar 30% atau sebanyak Rp. 284.402.016.000,-. Berdasarkan pagu yang ada dialokasikan untuk rencana kegiatan industri pariwisata sebesar Rp. 561.665.455.000,00 dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 500.825.252.099,21 atau sebesar 89,17%. Sedangkan rencana kegiatan



untuk kegiatan pariwisata oleh pemerintah daerah sebanyak 284.402.016.000,00 dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 140.477.258.229,36 atau sebesar 75,80%. Secara lengkap anggaran bantuan hibah untuk pariwisata di Kabupaten Badung seperti table berikut :

Tabel 3. 23

Anggaran Hibah Pariwisata untuk Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu Hibah	Rencana Kegiatan	Realisasi	%
1.	Penyaluran kepada Industri Pariwisata	663.604.704.000,00	561.665.455.000,00	500.825.252.099,21	89,17
2.	Pelaksanaan kegiatan pariwisata di daerah	284.402.016.000,00	284.402.016.000,00	140.477.258.229,36	49,39
3.	Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi				
	Total	948.006.720.000,00	846.067.471.000,00	641.302.510.328,57	75,80

Berbagai Upaya untuk pemulihan pariwisata di Kabupaten Badung melalui dana bantuan hibah pariwisata dalam kondisi pandemi COVID-19 tahun 2020 seperti berikut :

- a. **Bantuan hibah pariwisata untuk industri pariwisata terdiri dari 653 wajib pajak hotel dan 272 wajib pajak restoran.**



Sosialisasi Implementasi Protokol Kesehatan CHSE



b Implementasi Program CHSE di Destinasi Wisata dalam rangka Penerapan Standarisasi Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru untuk seluruh Masyarakat

- 1 Informasi Kepariwisataaan Kabupaten Badung tentang Protokol Kesehatan CHSE
- 2 Gathering Kepariwisataaan : Implementasi Protokol Kesehatan menuju Pariwisata Kab. Badung berkualitas di Kec. Kuta Utara
- 3 Gathering Kepariwisataaan : Implementasi Protokol Kesehatan menuju Pariwisata Kab. Badung berkualitas di Kec. Kuta Selatan
- 4 Gathering Kepariwisataaan : Implementasi Protokol Kesehatan menuju Pariwisata Kab. Badung berkualitas di Kec. Kuta
- 5 Pemulihan Kepariwisataaan Badung dalam Masa Pandemi Covid-19 melalui Program Explore Badung dengan mengutamakan Implementasi Protokol Kesehatan CHSE di Destinasi Wisata
- 6 Indonesia *Tourism Outlook* 2021 di Kabupaten Badung
- 7 Gerakan Bisa (Bersih, Indah,sehat dan Aman) Di Daya Tarik Wisata Pantai Petitenget Lurah Kerobokan Kelod
- 8 Gerakan Bisa (Bersih, Indah,sehat dan Aman) Di Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Alas Pala Sangeh Desa Sangeh
- 9 Gerakan Bisa (Bersih, Indah,sehat dan Aman) Di Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Taman Ayun Desa Mengwi
- 10 Gerakan Bisa (Bersih, Indah,sehat dan Aman) Di Daya Tarik Wisata Air Terjun Nungnung, desa Nungnung
- 11 Gerakan Bisa (Bersih, Indah,sehat dan Aman) Di Daya Tarik Wisata Pantai Legian Kelurahan Legian
- 12 Gerakan Bisa (Bersih, Indah,sehat dan Aman) Di Daya Tarik Wisata Pantai Melasti Desa Ungasan
- 13 Gerakan Bisa (Bersih, Indah,sehat dan Aman) Di Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa Desa kutuh
- 14 Gerakan Bisa (Bersih, Indah,sehat dan Aman) Di Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu Desa Pecatu
- 15 Stimulus Protokol CHSE pada Wisata Minat Khusus Paralayang Gunung Payung
- 16 Stimulus Protokol CHSE pada Wisata Minat Khusus Via Ferrata Malini Agropark
- 17 Stimulus Protokol CHSE pada Wisata Minat Khusus Royal Sporthorse Bali
- 18 Stimulus Protokol CHSE pada Wisata Minat Khusus Bali Swing
- 19 Stimulus Protokol CHSE pada Wisata Minat Khusus Penglukatan Air Panas Pinikit
- 20 Stimulus Protokol CHSE pada Wisata Minat Khusus Taman Bunga Belok/Sidan



- 21 Stimulus Protokol CHSE pada Wisata Minat Khusus Healing Tanah Hyang
- 22 Stimulus Protokol CHSE pada Wisata Minat Khusus Klinik Sadha Jiwa
- 23 Gerakan Era New Normal Di Desa Wisata Munggu
- 24 Gerakan Era New Normal Di Desa Wisata Carangsari
- 25 Gerakan Era New Normal Di Desa Wisata Baha
- 26 Peduli Covid 19 di Desa wisata Pangsan
- 27 Peduli Covid 19 di Desa wisata Belok
- 28 Peduli Covid 19 di Desa wisata Kapal
- 29 Peduli Covid 19 di Desa wisata Petang
- 30 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Padang-Padang Kabupaten Badung
- 31 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Pandawa Kabupaten Badung
- 32 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Uluwatu Kabupaten Badung
- 33 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Legian Kabupaten Badung
- 34 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Kuta Kabupaten Badung
- 35 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Sangeh dan Taman ayun Kabupaten Badung
- 36 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Nusa Dua Kabupaten Badung
- 37 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Geger Kabupaten Badung
- 38 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Peninsula Kabupaten Badung
- 39 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Melasti Kabupaten Badung
- 40 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Jembatan Tukad Bangkung, Air Terjun Nung Nung, Kawasan Pura Sada Kapal Kabupaten Badung
- 41 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pengelola Pasar di Kecamatan Petang, Abiansemal, dan Mengwi Kabupaten Badung
- 42 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pengelola Pasar di Kecamatan Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan Kabupaten Badung
- 43 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Koperasi di Kecamatan Abiansemal dan Petang
- 44 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Koperasi di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan
- 45 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Koperasi di Kecamatan Mengwi
- 46 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan



Petang Kabupaten Badung

- 47 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
- 48 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
- 49 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung
- 50 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
- 51 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung
- 52 Pemantauan Penegakan Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, Kelestarian Lingkungan Hidup (CHSE) dan Perubahan Prilaku Masyarakat di Kabupaten Badung menuju Pemulihan Sektor Pariwisata
- 53 Desinfeksi di Destinasi Wisata di Kabupaten Badung
- 54 Sosialisasi Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Nelayan di Era "New Normal"
- 55 Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pendukung Pariwisata
- 56 Pemenuhan Kebutuhan Ketahanan Pangan
- 57 Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian di Perkotaan
- 58 Publikasi Potensi Pertanian di Kabupaten Badung dalam menunjang pariwisata di era new normal melalui media digital
- 59 Pembuatan dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Pada Media Elektronik
- 60 Pembuatan dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Pada Media Cetak

c. Dukungan revitalisasi sarana prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan

- 1 Pemulihan kesehatan lingkungan, perekonomian, keamanan dan edukasi Pelaku Industri Pariwisata diantaranya Hotel, Restoran dan Obyek Wisata serta Faskes di Kabupaten Badung
- 2 Pembersihan Sampah di Badan Air di Kabupaten Badung
- 3 Pengoperasian TPST3R Di Kabupaten Badung
- 4 Pembersihan Sampah Pantai di Kabupaten Badung
- 5 Pengadaan Bahan Agregat
- 6 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- 7 Pengadaan Dump Truk
- 8 Pemeliharaan Container
- 9 Pemeliharaan Alat Angkut Sampah
- 10 Pemeliharaan saluran air dan atap TPST Terminal Mengwi
- 11 Pengadaan Ban Wheel Loader
- 12 Pengadaan Mesin Incenerator



- 13 Pengadaan Alat Pengolah Sampah
- 14 Pengadaan Wheel Loader
- 15 Pengadaan Excavator
- 16 Pendataan Timbulan Sampah Organik dan Anorganik
- 17 Pengadaan Truk Compactor
- 18 Pengadaan Pick Up
- 19 Pengadaan Road Sweeper
- 20 Pengadaan Mini Spider Excavator
- 21 Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 22 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung
- 23 Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Bagi Masyarakat/Pelaku Usaha di Sepanjang DAS Tukad Mati (seminyak, legian, kuta)
- 24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan
- 25 Pengadaan Sarana Pertamanan Penunjang Pariwisata
- 26 Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang Di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan
- 27 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- 28 Pengadaan dan Pemasangan Tiang Penyangga Tanaman Hias di Taman Median
- 29 Penyusunan DED Penataan Kawasan Taman Gumi Banten Giri Lestari di Kecamatan Petang
- 30 Penyusunan DED Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Tukad Mati Kelurahan Legian
- 31 Penyusunan DED Penamaan Taman - Taman di Kabupaten Badung
- 32 Pemutahiran Data Usaha dan Kegiatan yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung
- 33 Pemeliharaan Pos Balawista
- 34 Pengecatan Mobil Ambulance
- 35 Pengadaan Perlengkapan Sarana Prokes pada Pos Balawista Kabupaten Badung
- 36 Kegiatan Padat Karya pada Tanjung Benoa I
- 37 Kegiatan Padat Karya pada Tanjung Benoa II
- 38 Kegiatan Padat Karya pada Ayung River
- 39 Penataan Kolam Beji Taman Tirta pada Era New Normal di Desa Wisata Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal
- 40 Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pendukung Pariwisata di Kecamatan Petang
- 41 Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pendukung Pariwisata di Kec. Abiansemal
- 42 Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pendukung Pariwisata di Kec. Mengwi
- 43 Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pendukung Pariwisata di Kec. Kuta Utara



- 44 Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pendukung Pariwisata di Kec. Kuta
- 45 Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pendukung Pariwisata di Kec. Kuta Selatan
- 46 Pemeliharaan lampu penerangan jalan pada kawasan pariwisata Kabupaten Badung
- 47 Peningkatan jalan desa di kelurahan kuta kecamatan Kuta, gang di banjar pengabetan (bene sari dan komala sari)
- 48 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- 49 Pengadaan Alat - Alat Berat Penunjang Kepariwisataaan
- 50 Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Penunjang Kepariwisataaan
- 51 Pengadaan dan Pemasangan Pompa UPA Siligita di Kecamatan Kuta Selatan
- 52 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pompa UPA Siligita di Kecamatan Kuta Selatan
- 53 Revitalisasi Pariwisata di Tukad Mati Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
- 54 Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Penunjang Kepariwisataaan di Kabupaten Badung
- 55 Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Pantai Pandawa menuju Pantai Timbis di Kecamatan Kuta Selatan
- 56 Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Pantai Pandawa menuju Pantai Timbis di Kecamatan Kuta Selatan
- 57 Penataan Taman Pada Areal Lingkungan Abianbase Kecamatan Kuta
- 58 Pembangunan Toilet pada Objek Wisata Pantai Geger
- 59 Pembangunan Toilet pada Objek Wisata Pantai Pandawa
- 60 Pembangunan Toilet pada Objek Wisata Sangeh

d. Pelaksanaan Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel & Restoran serta Masyarakat

- 1 Bimbingan Teknis CHSE (Cleanliness, Hygiene, Safety, Environment) di Kabupaten Badung Tahun 2020
- 2 Pelatihan CHSE kepada Anggota Gahawistri Kabupaten Badung
- 3 Pelatihan Desa Wisata terkait program CHSE Kabupaten Badung
- 4 Pelatihan Pramuwisata terkait program CHSE Kabupaten Badung
- 5 Pelatihan CHSE Terhadap Anggota Balawista Kabupaten Badung
- 6 Bimtek Pengurangan Resiko Bencana Covid 19
- 7 Bimbingan Teknis Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana Wabah covid 19
- 8 Pelatihan Karang Taruna se-Kabupaten Badung
- 9 Bimbingan Teknis Fire Safety dan CHSE (Cleanlines, Hygine, Safety, Environment)
- 10 Bimbingan Teknis Penanganan Mutu Ikan
- 11 Pelatihan Penerapan Protokol CHSE di Tempat Kerja bagi ASN Pemkab Badung



- 12 Pembinaan dan pelatihan pengemudi pariwisata di Kabupaten Badung
 - 13 Pelatihan Barista
 - 14 Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Bagi Kelompok Wanita Tani
 - 15 Evaluasi Kebijakan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Menyongsong Pembukaan Pariwisata di Kabupaten Badung
 - 16 Diseminasi Inovasi Teknologi Penangkapan Ikan Berbasis Android (FishGo) dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Pariwisata
- e. Pengawasan penerapan protokol kesehatan pada hotel dan restoran**
- 1 Sistem Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan Terhadap Covid-19 Kabupaten
 - 2 Penerapan disiplin oleh Satlinmas dalam penerapan Prokes Covid-19 di Kab. Badung
- f. Kegiatan pemulihan ekonomi**
- g. Biaya operasional pelaksanaan Hibah dan Pengawasan APIP Daerah**
- 1 Rapat koordinasi
Pelaksanaan Program Hibah Pariwisata di Kab. Badung
 - 2 Reviu oleh APIP Daerah
Review Dana Hibah Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2020
 - 3 Perjalanan dinas ke lokasi kegiatan
 - 4 Honorarium pelaksanaan kegiatan



3.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks memantapkan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang menganut prinsip “*Money Follows Program*” yaitu perubahan paradigma pendekatan anggaran yang lebih



focus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan money follows program, belanja tidak

lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi (*money follows function*). Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2020 sebesar Rp. 1.356.993.556.381,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.223.623.428.734,- sehingga persentase penyerapan sebesar 90,17%. Sasaran strategis didukung program sebanyak 143 dan kegiatan sebanyak 487. Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing program kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis seperti table berikut:



Tabel 3.24
Sasaran Strategis, Jumlah Program/Kegiatan, Pagu dan Realisasi Anggaran
Kabupaten Badung Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target/ Satuan	Jml Prog	Jml Keg	PAGU	REALISASI	%
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	78,35	1	1	118.582.574.538	108.192.474.157	91,24
2	Meningkatnya pelestarian adat dan BUDAYA	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	84%	3	44	118.571.440.727	108.183.603.657	91,24
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	81,00	18	69	71.367.516.733	49.625.458.652	69,54
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kab	Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	78,40 (BB)	4	9	1.084.775.545	962.403.530	88,72
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP	5	6	1.821.293.872	1.704.865.246	93,61
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kategori penilaian Mandiri	73,50 (BB)	3	11	2.932.501.016	2.006.083.378	68,41
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81,37	13	42	370.447.804.476	333.535.502.977	90,04
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	75,50	7	11	144.168.766.753	128.660.767.640	89,24
9	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk Miskin	1,00-0,60%	6	21	29.912.848.174	27.105.726.460	90,62
10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	7,85%	11	23	2.026.351.759	1.701.381.408	83,96
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase pencegahan pelanggaran Perda	90%	6	9	3.077.013.829	2.878.002.850	93,53
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	90%	3	6	3.351.520.927	3.157.405.100	94,21
13	Meningkatnya pengarusutamaan	Indeks Pembangunan Gender	76,00	2	8	666.114.240	575.394.550	86,38



No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target/ Satuan	Jml Prog	Jml Keg	PAGU	REALISASI	%
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	69,30	8	31	70848124400	54901817398	77,49
14		Indeks Pertanaman	233,00	3	5	316.210.528	310.170.294	98,09
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Level 4	7	21	40.744.271.926	35.529.450.683	87,20
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran	0,32%	5	16	2.088.845.309	1.967.602.110	94,20
17	Meningkatnya infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur	89,38%	18	77	353.286.789.638	343.072.609.490	97,11
18	Meningkatnya produksi pangan	Skor Pola Pangan	96,50	14	48	10.145.176.096	8.865.988.955	87,39
19	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	72%	5	26	10.232.699.744	9.539.124.799	93,22
20	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	28,97%	1	3	1.320.916.150	1.147.595.400	86,88
Total				143	487	1.356.993.556.381	1.223.623.428.734	90,17

3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. Kriteria penilaian dari analisis efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 99% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 99%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Analisis efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi sasaran dengan realisasi anggaran. Kriteria penilaian analisis efektivitas yaitu: Nilai positif berarti efektif (semakin tinggi nilainya berarti semakin efektif program dan kegiatan dalam mencapai sasaran), sedangkan nilai minus (negatif) berarti tidak efektif. Hasil



Analisis efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan untuk mencapai sasaran seperti tabel berikut :

Tabel 3.25
Hasil analisis Efektivitas dan Efisiensi Program/Kegiatan
di Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Realisasi Sasaran	Realisasi Anggaran	Efektifitas	Efisiensi
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	-	91,24	-	-
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	88,57	91,24	- 2,67	Tidak Efisien
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	-	69,54		-
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	-	88,72		-
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	-	93,61		-
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	-	68,41		-
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	100,28	90,04	10,25	Efisien
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	-	89,24		-
9.	Menurunnya angka kemiskinan	- 2,00	90,62	- 92,62	Tidak Efisien
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	124,59	83,96	40,62	Efisien
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	102,32	93,53	8,79	Efisien
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	105,84	94,21	11,64	Efisien
13.	Meningkatnya pengarasutamaan gender	125,66	86,38	39,28	Efisien
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	95,17	82,35	12,83	Tidak Efisien
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	100,00	87,20	12,80	Efisien
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	- 1.962,50	94,20	- 2.056,70	Tidak Efisien
17.	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	109,92	97,11	12,82	Efisien
18.	Meningkatnya produksi pangan harapan	-	87,39		-



NO	Sasaran Strategis	Realisasi Sasaran	Realisasi Anggaran	Efektifitas	Efisiensi
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	103,28	93,22	10,06	Efisien
20.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	84,95	86,88	- 1,93	Tidak Efisien
	Total	-34,70	90,17	- 124,87	Tidak Efisien

3.5. PRESTASI/PENGHARGAAN

Program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Badung memprioritaskan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Upaya yang sungguh-sungguh tersebut diapresiasi oleh pemerintah pusat serta pihak-pihak terkait dalam bentuk penghargaan dan prestasi. Kabupaten Badung tahun 2020 mendapat 14 penghargaan/prestasi, secara rinci seperti table berikut :

Tabel 3.26

Penghargaan/Prestasi Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Penghargaan Peringkat BB Penerepan Sakip Pemerintah Kabupaten / Kota Wilayah Ii Tahun 2019	Evaluasi Atas Penerapan Sakip Pemerintah Kabupaten / Kota Wilayah Ii Tahun 2019	27 Januari 2020	Deputi Reformasi Birokrasi
2	Penghargaan Kategori A Pengawasan Kearsipan 2020	Pengawasan Kearsipan Tahun 2020	26 Februari 2020	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
3	Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan	15 Juni 2020	Kepala BPK RI
4	Penghargaan Dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk Online	Pelaksanaan Sensus Penduduk Online	3 Agustus 2020	Kepala BPS Badung
5	Penghargaan Natamukti Bukti Komitmen Bupati Giri Prasta Dorong Keberlangsungan UMKM	Komitmen Dan Perhatian Bupati Badung Terhadap Keberadaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	17 September 2020	International Council For Small Business (ICSB) Indonesia & Kementerian Koperasi Dan UMKM



NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
6	Top 30 Anugerah 2020 Dengan Materi " Reformasi Pelayanan Publik Pada DPMPPTSP Kabupaten Badung Keluar Dari Zona Nyaman Menuju Zona Integritas"	Reformasi Pelayanan Publik Pada DPMPPTSP Kabupaten Badung 'Keluar Dari Zona Nyaman Menuju Zona Integritas'	18 Oktober 2020	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Ri
7	Penghargaan TPID Berprestasi Tahun 2020	Berhasil Jaga Tingkat Inflasi Di Tengah Pandemi	22 Oktober 2020	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
8	Penghargaan TPID Berprestasi Tahun 2020	Menjaga Tingkat Inflasi	10 November 2020	Asisten Deputi Moneter Dan Sektor Eksternal Kemenko Bidang Perekonomian
9	Raih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 Kali Berturut-Turut	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	16 November 2020	Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJB Provinsi Bali)
10	Mitra Kerja Terbaik Kpw Bi Bali Kategori Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Program Pengendalian Inflasi	03 Desember 2020	Wakil Gubernur Bali
11	Penghargaan Sebagai Instansi Dengan Pengolahan LHKPN Terbaik Tahun 2020	Upaya Dan Usaha Dalam Mecegah Terjadinya Praktik Korupsi	16 Desember 2020	KPK RI
12	Penghargaan Sebagai Salah Satu Dari 34 Daerah Peraih Did (Dana Insentif Daerah) Untuk Capaian Indeks Pencegahan Korupsi	Upaya Dan Usaha Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Korupsi	16 Desember 2020	KPK RI
13	Peningkatan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Peran Masyarakat Serta Peningkatan Daya Saing Daerah.	Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan (BPP) Kemendagri Matheos Tan	18 Desember 2020	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas
14	Penghargaan Wilayah Bersih Dari Korupsi (WBK) 2020	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)	21 Desember 2020	Penghargaan WBK 2020



BAB IV PENUTUP

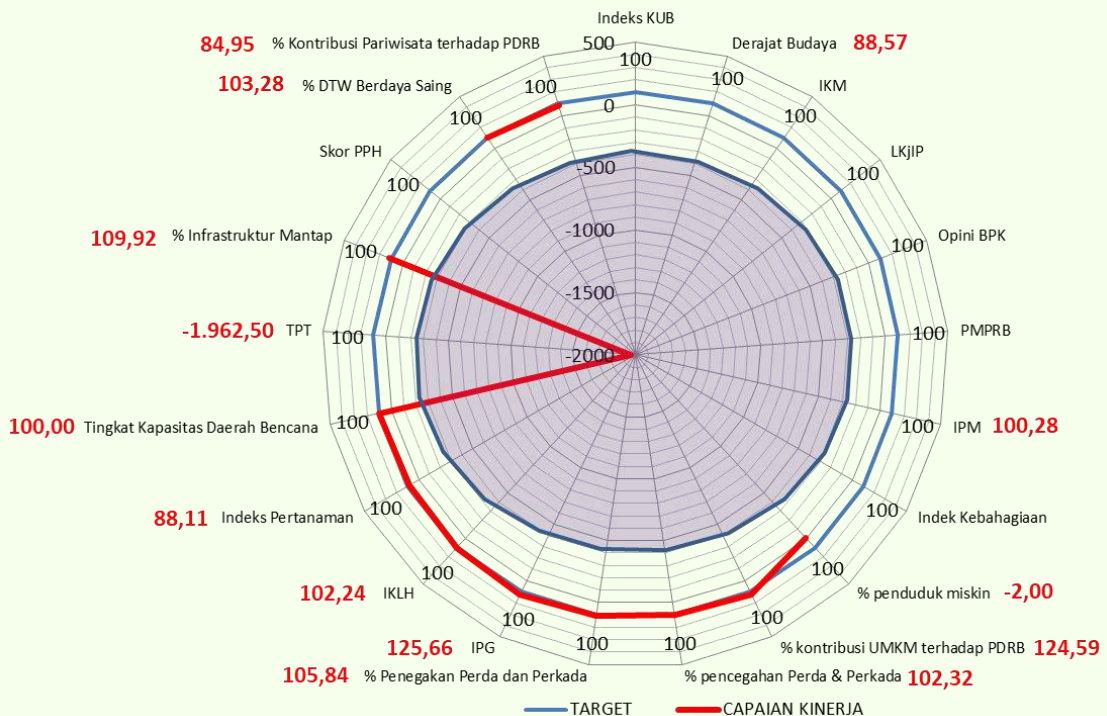
4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan maka dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2020, seperti berikut :

1. Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 merupakan gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Badung terhadap capaian kinerja sasaran strategis sesuai RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 beserta keberhasilan dan kegagalan serta perkembangan capaian IKU tahun sebelumnya sebagai perbandingan kinerja.
2. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 13 tujuan, 20 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja utama (IKU). Untuk tahun 2020 (sampai Maret 2020) terdapat 7 (Tujuh) indikator kinerja utama (IKU) yang belum dapat dilaporkan hasil capaian kerjanya terdiri dari:
 - a. Indikator Kinerja Utama yang tidak dilaksanakan pengukuran melalui survey sebanyak 4 indikator, yaitu: **Indeks kerukunan umat beragama, Indeks kepuasan masyarakat, Indeks Kebahagiaan, dan Skor Pola Pangan Harapan.**
 - b. Indikator Kinerja Utama yang belum di *release*/terbit sebanyak 3 indikator, yaitu: **Opini BPK** dari BPK RI dan indikator **Kategori akuntabilitas Kinerja Kabupaten, Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)** dari Kementerian PAN-RB Republik Indonesia.
3. Capaian kinerja dari 21 indikator kinerja utama (IKU) rata-rata sebesar - 34,70%.
4. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama diperoleh hasil seperti berikut :
 - a. Melebihi target (>100%) sebanyak 8 indikator kinerja utama (38,10%)
 - b. Sesuai target (100%) sebanyak 1 indikator kinerja utama (4,76%)



- c. dibawah target (<100%) sebanyak 5 indikator kinerja utama (23,81%)
- d. Tidak ada Hasil pengukuran/belum terbit sebanyak 7 indikator kinerja utama (33,33%)
- 5. Hasil pengukuran indikator kinerja utama (IKU) terhadap 14 indikator menunjukkan lebih dominan mencapai target yaitu sebanyak 9 indikator (64,30%) dan 5 indikator yang belum mencapai target (< 100%) sebesar 35,70%.
- 6. Hasil pengukuran indikator dengan nilai minus yaitu persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Kondisi ini disebabkan dampak pandemi COVID 19.
- 7. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 1.356.993.556.381,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.223.623.428.734,- sehingga persentase penyerapan sebesar 90,17%.
- 8. Hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD semesta berencana 2016-2021 untuk tahun 2020 seperti berikut :





4.2. UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Secara keseluruhan capaian kinerja pada tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan indikator kinerja yang dapat diukur terdapat 5 sasaran strategis capaiannya masih dibawah 100%, maka Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target RPJMD semesta berencana 2016-2021 antara lain :

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian adat dan budaya melalui :
 - a. mengidentifikasi dan mendata secara akurat cagar budaya dan sekaa (kelompok) seni yang ada
 - b. meningkatkan pembinaan serta perlindungan dari aspek legal dalam pengelolaan pelestarian budaya
 - c. pemberian bantuan anggaran untuk pemeliharaan/perawatan warisan budaya.
2. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan)
 - b. pemberdayaan ekonomi rumah tangga sasaran melalui pelatihan keterampilan, pemberian bantuan untuk kelompok usaha ekonomi produktif (UEP)
 - c. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
3. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indicator indeks pertanian melalui :
 - a. Meningkatkan intensifikasi tanaman
 - b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna
 - c. Meningkatkan pendampingan Penyuluh untuk pemanfaatan pekarangan serta penambahan irigasi/pengairan (pembangunan sumber-sumber air).
4. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing tenaga kerja melalui :
 - a. Melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan Peraturan Perusahaan dan pengesahannya.
 - b. Melakukan pembinaan tentang norma-norma ketenagakerjaan secara berkesinambungan.



- c. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan baik di dalam maupun di luar negeri.
 - d. Meningkatkan sosialisasi sistem informasi industri dan tenaga kerja (SIINAGA) yang berbasis teknologi berupa aplikasi yang dapat diunduh oleh pencari kerja untuk mencari lowongan pekerjaan dan bagi pengguna tenaga kerja (perusahaan)
 - e. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan 8 standar mutu LPK
 - f. Melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan ke lokasi LPKS (pemohon) yang didukung dengan anggaran
5. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pelestarian adat dan budaya melalui :
- a. Informasi Kepariwisataaan Kabupaten Badung tentang Protokol Kesehatan CHSE (*Cleanliness, Hygiene, Safety, Environment*).
 - b. Pemulihan Kepariwisataaan Kabupaten Badung dengan mengutamakan Implementasi Protokol Kesehatan CHSE di Destinasi Wisata.
 - c. Memperketat protokol kesehatan dan kebersihan di hotel dan obyek wisata destinasi atau atraksi budaya. Langkah ini ditunjang dengan penyediaan kelengkapan protocol kesehatan bagi wisatawan, seperti masker *hand sanitizer* dan wastafel dan sumber daya manusia pariwisata. Penyediaan fasilitas kesehatan serta pelengkap lainnya seperti ruang karantina mandiri, *termal detector, rapid test kit*.
 - d. Penyusunan rencana darurat dan penanganan sektor pariwisata yang menyangkut keamanan dan keselamatan wisatawan.
 - e. Penyusunan kebijakan transportasi kepariwisataan untuk kepastian perjalanan wisatawan.
 - f. Melakukan sinergisitas antar pemangku kepentingan pariwisata untuk mendukung Gerakan Era New Normal.
 - g. Melakukan koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi dengan pemerintah pusat tentang pemulihan kepariwisataan.

Bupati Badung,



IN YOMI GRI PRASTA

Lampiran I :

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1 Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	78,35
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2 Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	84
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	81
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4 Katagori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	78,40 (BB)
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5 Opini BPK	Nilai	WTP
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6 Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	73,50 (BB)
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7 Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,37
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8 Indek Kebahagiaan	Nilai	75,5
9	Menurunnya angka kemiskinan	9 Persentase penduduk miskin	%	1,00-0,60
10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10 Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,85
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11 Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	%	90
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12 Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	90
13	Meningkatnya pengarasutamaan gender	13 Indeks pembangunan gender (PG)	Nilai	76
14	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14 Indeks kualitas lingkungan hidup (KLH)	Nilai	69,30
		15 Indeks Pertanian (IP)	Nilai	233
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16 Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17 Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,320
17	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	18 Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	89,38
18	Meningkatnya produksi pangan harapan	19 Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	96,5
19	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20 Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	72
20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	28,97

Lampiran II :

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	78,35	Tidak dilaksanakan survei	
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	84	74,4	88,57
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3.	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	81	Tidak dilaksanakan survei	
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4.	Kategori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	78,40	Data belum diterbitkan	
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5.	Opini BPK	Nilai	WTP	Data belum diterbitkan	
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6.	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	73,50 (BB)	Data belum diterbitkan	
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,37	81,6	100,28
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8.	Indek Kebahagiaan	Nilai	75,5	Tidak dilaksanakan survei	
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Persentase penduduk miskin	%	1,00-0,60%	2,02	-2,00
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10.	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,85	9,78	124,59
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11.	Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	%	90	92,09	102,32
12.	Meningkatnya penegakan Perda	12.	Persentase penegakan Perda	%	90	95,26	105,84

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2		3	4	5	6	7
	dan Perkada		dan Perkada				
13.	Meningkatnya pengarasutamaan gender	13.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	76	95,5	125,66
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	69,3	70,85	102,24
		15.	Indeks Pertanian	Nilai	233	205,3	88,11
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16.	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4	Level 4	100,00
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17.	Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,32	6,92	- 1962,50
17.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	18.	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	89,38	98,25	109,92
18.	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	96,5	Tidak dilaksanakan survei	
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20.	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	72,00	74,36	103,28
20.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21.	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	28,97	24,61	84,95
Rata-rata Kinerja Kabupaten							-34,70

Lampiran III :
**Hasil Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Pemerintah
Kabupaten Badung Tahun 2020**

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target/ Satuan	Jml Prog	Jml Keg	PAGU	REALISASI	%
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	78,35	1	1	118.582.574.538	108.192.474.157	91,24
2	Meningkatnya pelestarian adat dan BUDAYA	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	84%	3	44	118.571.440.727	108.183.603.657	91,24
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	81,00	18	69	71.367.516.733	49.625.458.652	69,54
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kab	Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	78,40 (BB)	4	9	1.084.775.545	962.403.530	88,72
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP	5	6	1.821.293.872	1.704.865.246	93,61
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kategori penilaian Mandiri	73,50 (BB)	3	11	2.932.501.016	2.006.083.378	68,41
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81,37	13	42	370.447.804.476	333.535.502.977	90,04
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	75,50	7	11	144.168.766.753	128.660.767.640	89,24
9	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk Miskin	1,00-0,60%	6	21	29.912.848.174	27.105.726.460	90,62
10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	7,85%	11	23	2.026.351.759	1.701.381.408	83,96
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase pencegahan pelanggaran Perda	90%	6	9	3.077.013.829	2.878.002.850	93,53
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	90%	3	6	3.351.520.927	3.157.405.100	94,21
13	Meningkatnya pengarusutamaan	Indeks Pembangunan Gender	76,00	2	8	666.114.240	575.394.550	86,38

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target/ Satuan	Jml Prog	Jml Keg	PAGU	REALISASI	%
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	69,30	8	31	70848124400	54901817398	77,49
14		Indeks Pertanaman	233,00	3	5	316.210.528	310.170.294	98,09
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Level 4	7	21	40.744.271.926	35.529.450.683	87,20
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran	0,32%	5	16	2.088.845.309	1.967.602.110	94,20
17	Meningkatnya infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur	89,38%	18	77	353.286.789.638	343.072.609.490	97,11
18	Meningkatnya produksi pangan	Skor Pola Pangan	96,50	14	48	10.145.176.096	8.865.988.955	87,39
19	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	72%	5	26	10.232.699.744	9.539.124.799	93,22
20	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	28,97%	1	3	1.320.916.150	1.147.595.400	86,88
Total				143	487	1.356.993.556.381	1.223.623.428.734	90,17

**Lampiran IV :
Hasil Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Kabupaten
Badung Tahun 2020**

NO	Sasaran Strategis	Realisasi Sasaran	Realisasi Anggaran	Efektifitas	Efisiensi
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	-	91,24	-	-
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	88,57	91,24	- 2,67	Tidak Efisien
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	-	69,54		-
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	-	88,72		-
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	-	93,61		-
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	-	68,41		-
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	100,28	90,04	10,25	Efisien
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	-	89,24		-
9.	Menurunnya angka kemiskinan	- 2,00	90,62	- 92,62	Tidak Efisien
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	124,59	83,96	40,62	Efisien
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	102,32	93,53	8,79	Efisien
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	105,84	94,21	11,64	Efisien
13.	Meningkatnya pengarasutamaan gender	125,66	86,38	39,28	Efisien
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	95,17	82,35	12,83	Tidak Efisien
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	100,00	87,20	12,80	Efisien
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	- 1.962,50	94,20	- 2.056,70	Tidak Efisien
17.	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	109,92	97,11	12,82	Efisien
18.	Meningkatnya produksi pangan harapan	-	87,39		-
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	103,28	93,22	10,06	Efisien

NO	Sasaran Strategis	Realisasi Sasaran	Realisasi Anggaran	Efektifitas	Efisiensi
20.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	84,95	86,88	- 1,93	Tidak Efisien
	Total	-34,70	90,17	- 124,87	Efisien



LAMPIRAN V :

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Indeks kerukunan umat beragama	Survei kerukunan umat beragama	1 Meningkatkan toleransi hidup beragama	1. Indek kerukunan umat beragama	Survey : 1)Hubungan sosial antar kelompok agama, 2)Eksistensi keagamaan, konflik dan resolusi konflik, 3)Kebijakan pemerintah dan 4)Potensi lokal	Balitbang, Bakesbangpol, Disbud, Setda (Bag.Kesra)
			2 Meningkatkan pelestarian adat dan budaya	2 Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	(Jumlah desa budaya/adat maju dibagi dengan jumlah desa budaya/adat yang ada dikalikan seratus) + (Jumlah organisasi budaya/sekaa tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya/sekaa kali seratus) dibagi 2	Disbud, Bapenda/Pasedahan Agung

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
2 Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	2 Indeks kepuasan masyarakat	Survey indeks kepuasan masyarakat	3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3 Indeks kepuasan masyarakat	Survey indeks kepuasan masyarakat	Balitbang, Seluruh Perangkat Daerah
3 Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	3 Katagori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4 Katagori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Setda (Bagian Organisasi), Inspektorat, Bappeda
	4 Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan	5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik Daerah	5 Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan	BPKAD, Inspektorat, Setda (Bag.Pembanguna), seluruh Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
	5 Katagori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Katagori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi	6 Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6 Katagori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Katagori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi	Inspektorat Setda (Bagian Organisasi)
4 Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	6 Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	7 Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	7 Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	Balitbang, Disdikpora, Diskes, Diskop UKMP, SRUD
	7 Indek kebahagiaan	Survey tingkat kebahagiaan masyarakat	8 Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8 Indeks Kebahagiaan	Survey tingkat kebahagiaan masyarakat	Balitbang, Seluruh Perangkat Daerah
	8 Tingkat Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	9 Menurunnya angka kemiskinan	9 Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	Dinsos, Bappeda, Seluruh Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
5 Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	9 Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	10 Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10 Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	Diskop UKMP, Disperinaker, Setda (Bag.Perekonomian)
6 Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	10 Persentase pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	11 Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11 Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat dicegah dibagi indikasi pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	Satpol PP, Bakesbangpol, Seta (Bagian Hukum dan Ham), seluruh Kecamatan
			12 Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12 Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	Satpol PP, Bakesbangpol, Seta (Bagian Hukum dan Ham)

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
7 Terwujudnya Pengarasutamaan Gender	11 Indeks Pembangunan Gender	$IPG = 1/3(X + Y + Z)$ Dimana : Xede(1):Xede untuk harapan hidup, Xede(2):Xede untuk harapan pendidikan, I(inc-dls):Indeks distribusi pendapatan	13 Meningkatnya pengarusutamaan gender	13 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dimana: Xede(1) : Xede untuk harapan hidup, Xede(2) : Xede untuk harapan pendidikan, I(Inc-dls): Indeks distribusi pendapatan	DP2KBP3A, Balitbang, Disperinaker, Dinsos, Seluruh Perangkat Daerah
8 Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	12 Indeks pencemaran lingkungan hidup	Penghitungan indikator dari : Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan/lahan	14 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	Penghitungan Indikator dari : Indeks Kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan hutan/lahan	DLHK, DPKP, DPUPR, Diskes
				15 Indeks Pertanaman (IP)	Luas tanam dibagi luas lahan x 100% (dalam setahun)	Satpol PP, Disperpa, Setda (Bag.SDA)

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
9 Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	13 Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Jumlah pemenuhan kapasitas dibagi jumlah kebutuhan kapasitas kali 100%	15 Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana	16 Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Survei kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	BPBD, DPUPR, DPKP, Dinsos, Diskarmat, Satpol PP, Diskes, RSUD
10 Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	14 Tingkat pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	16 Meningkatkan daya saing tenaga kerja	17 Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	Disperinaker, Bappeda, Dispar, Dinsos, Diskop UKMP
11 Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	15 Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	17 Meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas	18 Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	DPUPR, Disbud, Bappeda, DPKP, Diskominfo, Setda(Bag. Pembangunan)
12 Meningkatnya ketersediaan pangan	16 Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	18 Meningkatkan produksi pangan nabati dan hewani	19 Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	Disperpa, Diskan, DPUPR

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
13 Meningkatkan daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	17 Indeks daya saing destinasi pariwisata	Suevei indeks daya saing dstinasi pariwisata	19 Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	20 Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	Jumlah obyek wisata yang berdaya saing dibagi seluruh jumlah obyek wisata kali 100%	Dispar, DPUPR, Disbud
			20 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Nilai produk sektor pariwisata dibagi total nilai PDRB kali 100%	Dispar, Disbud, Diperpa, Diskan, Diskominfo, Diskes, DLHK, PUPR